

**Laporan Penelitian**  
**Bisnis Militer**  
**di Poso**  
**Sulawesi Tengah**

**TIM PENELITIAN**  
**BISNIS MILITER DI POSO**  
**SULAWESI TENGAH**

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban**  
**Tindak Kekerasan**  
**(KONTRAS)**  
**FEBRUARI – MARET 2004**



# Daftar Isi

<b>BAB I PROFILE WILAYAH</b>	<b>5</b>
<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>5</b>
Kondisi Geografis dan Kependudukan	5
Kondisi Sosial dan Ekonomi Sulawesi Tengah	8
<b>KABUPATEN POSO</b>	<b>11</b>
Kondisi Geografis dan Penduduk Kabupaten Poso	11
Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Poso	18
<b>DESA TOKORONDO</b>	<b>24</b>
Kondisi Geografis dan Penduduk Desa Tokorondo	24
Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Tokorondo	25
Penelitian Bisnis Militer	27
<b>BAB II HUTAN DAN KAYU HITAM DI SULAWESI TENGAH</b>	<b>29</b>
Hutan	29
Kayu Hitam	36
<b>Bab III Militer, Polisi dan Bisnisnya di Sulawesi Tengah</b>	<b>41</b>
Profil Militer dan Polisi di Sulawesi Tengah	41
Bisnis Militer dan Polisi di Sulawesi Tengah	45
Dampak Bisnis Militer dan Polisi di Sulawesi Tengah	50
<b>BAB IV PT. GUNUNG LATIMOJONG (GULAT): SEBUAH STUDI KASUS</b>	<b>53</b>
Sejarah Pendirian	53
Wilayah Kerja PT Gulat	55
Pekerja dan kompensasinya	61
Perannya terhadap masyarakat	68
Dampaknya terhadap Masyarakat dan Lingkungan	70
Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan Gulat	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>73</b>
Kesimpulan	73
Rekomendasi	78



# Bab I

## Profile Wilayah

### I. SULAWESI TENGAH

#### 1. Kondisi Geografis dan Kependudukan

##### A. Kondisi Geografis<sup>1</sup>

Secara geografis, Sulawesi Tengah terletak di antara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan, serta 119°22' Bujur Barat dan 124°22' Bujur Timur. Di sebelah utara propinsi ini berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Propinsi Gorontalo, di sebelah timur berbatasan dengan propinsi Maluku, di sebelah selatan berbatasan dengan propinsi Sulawesi Selatan dan propinsi Sulawesi Tenggara, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar.

Luas wilayah Sulawesi Tengah 68.059,71 km<sup>2</sup>, secara administratif dibagi dalam 8 Kabupaten (Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Poso, Donggala, Tolitoli, Buol dan Palu), 1 Kotamadia dengan 81 Kecamatan serta 1.430 desa/kelurahan definitif, dengan 1.289 berstatus desa dan 141 berstatus kelurahan. Disamping itu terdapat pula 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

##### B. Penduduk<sup>2</sup>

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, penduduk propinsi Sulawesi Tengah berjumlah 2.066.000, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,97 %. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah merupakan 1,02 % dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, dengan kepadatan penduduk 32/km<sup>2</sup> (Indonesia 106/km<sup>2</sup>).

---

<sup>1</sup> Data BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka, 2003

<sup>2</sup> ibid

Tahun 2000, kepadatan penduduk Kota Palu telah mencapai 681 jiwa per km<sup>2</sup>, sementara kabupaten lain berkisar antara 10-44 jiwa per km<sup>2</sup>, dimana 10 jiwa per km<sup>2</sup> berada Kabupaten Morowali, 44 jiwa per km<sup>2</sup> di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Donggala.

Berdasarkan data BPS tahun 2002, jumlah Penduduk di Sulawesi Tengah berkisar 2 juta jiwa lebih, tersebar di 8 kabupaten dan 1 kotamadya. Penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Donggala (732.000 jiwa atau 35,21 % dari total penduduk Sulawesi Tengah). Sementara kabupaten dengan penduduk yang paling sedikit adalah Kabupaten Buol (98.000 jiwa atau 4,7 % dari total penduduk Sulawesi Tengah). Namun bila dilihat dari angka kepadatan penduduk, maka Kota Palu merupakan wilayah terpadat dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu propinsi penerima transmigran. Jika ditelusuri penempatan transmigrasi setiap kabupaten, secara umum Kabupaten Donggala merupakan daerah penempatan transmigrasi tertinggi, yaitu sebanyak 24.996 KK dengan 109.287 jiwa, dimana untuk transmigrasi umum di Kabupaten ini tercatat 12.174 KK dengan 52.080 jiwa, serta untuk transmigrasi swakarsanya mencapai 12.822 KK dengan 57.207 jiwa. Kemudian Kabupaten Banggai dan Poso merupakan jumlah terbesar kedua dan ketiga masing-masing tercatat 22.541 KK dan 19.865 KK. Sementara daerah yang merupakan penerima transmigrasi paling sedikit yakni hanya 680 KK berada di Kabupaten Buol.

Sensus Penduduk	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk *	Laju Pertumbuhan
	Laki-laki	Perempuan		
1971	467.166	446.496	913.662	2,83 %
1980	662.309	622.219	1.284.528	3,86 %
1990	876.815	834.075	1.710.890	2,91 %
2000	1.063.977	1.015.224	2.079.201	2,04 %

Sumber : Data BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka 2002

\*Dalam Jiwa

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tengah dari tahun 1971, 1980, 1990 dan 2000 mengalami peningkatan yang signifikan. Begitu juga dengan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan secara bertahap selama periode waktu tertentu. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2000 adalah 1.063.977, sedangkan penduduk perempuan 1.015.224 dari total keseluruhan jumlah penduduk Sulawesi Tengah yang berjumlah 2.079.201 dengan laju pertumbuhan 2,04.

Tahun 2000, Kabupaten Banggai memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi di Sulawesi Tengah, yaitu 271.725 jiwa, diikuti Kotamadya Palu sebagai ibukota dari Propinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk 269.083 jiwa, dan Kabupaten Poso dengan jumlah penduduk 232.765 jiwa. Untuk perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, penduduk laki-laki hanya sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Banggai Kepulauan	71.796	69.379	141.175
Banggai	138.580	133.145	271.725
Morowali	82.888	77.909	160.797
Poso	119.868	112.897	232.765
Donggala	376.228	355.898	732.126
Tolitoli	88.474	85.051	173.525
Buol	50.880	47.125	98.005
Palu	135.263	133.820	269.083
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>1.063.977</b>	<b>1.015.224</b>	<b>2.079.201</b>

Sumber : Data BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka 2002

\* Dalam Jiwa

No	Kabupaten/ Kota	Februari		April		Juni	
		Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
1	Banggai Kep.	8.201	140.626	8.222	141.172	8.243	141.710
2	Banggai	59.944	221.750	60.080	221.979	60.227	222.207
3	Morowali	11.882	150.930	11.979	151.394	12.072	151.846
4	Poso	37.849	232.517	38.011	233.009	38.171	233.496
5	Donggala	25.216	404.925	25.298	405.726	25.383	406.516
6	Toli-toli	38.560	150.727	38.676	151.166	38.791	151.598
7	Buol	8.890	98.616	8.912	99.030	8.936	99.427
8	Parigi Moutong	16.712	324.320	16.767	324.966	16.823	325.604
9	Palu	242.089	36.349	243.093	35.969	244.103	35.586
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>449.343</b>	<b>1.760.757</b>	<b>451.038</b>	<b>1.764.411</b>	<b>452.749</b>	<b>1.767.990</b>

Sumber : Data BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka, 2003

\* Dalam Jiwa

## 2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Sulawesi Tengah

### A. Kondisi Sosial

Faktor-faktor sosial di Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor Pendidikan dan faktor Agama.<sup>3</sup> Kedua faktor ini menjadi penting untuk melihat progresifitas hubungan sosial dan kemampuan pembangunan di Sulawesi Tengah. Persoalan Pendidikan penting untuk melihat pembangunan/kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Tengah. Sementara, Agama juga penting untuk melihat komposisi dan manajemen sosial yang berbasis agama. Persoalan agama juga semakin kontras untuk dilihat ketika konflik sosial muncul di Sulawesi tengah. Konflik yang bermunculan sejak 1998 tersebut dihembuskan dengan sentimen agama.

#### A. 1. Pendidikan<sup>4</sup>

##### a. Pendidikan Pra-sekolah (*Taman Kanak-Kanak*).

Jumlah sekolah TK pada tahun 2000/2001 sebanyak 542 buah dan pada tahun 2001/2002 jumlah tersebut berkurang menjadi 489 buah, serta jumlah guru TK dari 1.766 orang untuk tahun 2001/2002 turun menjadi 1.014 orang pada Tahun Anggaran 2001/2002. Sedangkan jumlah murid dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2000/2001 jumlah murid sebanyak 18.034 orang meningkat menjadi 18.204 murid tahun 2001/2002.

##### b. Pendidikan Dasar (*Sekolah Dasar*)

Jumlah sekolah, murid dan guru SD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (SD Negeri, Inpres dan swasta) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama periode 1997/1998-2001/2002. Rasio perbandingan murid dengan sekolah tahun 2001/2002 menunjukkan bahwa dari setiap SD terdapat 126 murid, sedangkan rasio murid-guru sebesar 18, yang berarti bahwa dari setiap seorang guru akan terdapat 18 orang murid SD dan rata-rata guru untuk setiap sekolah adalah 7 orang.

##### c. Pendidikan Menengah (*SLTP, SMU dan SMK*)

Pendidikan tingkat SLTP (termasuk SLTP terbuka) selama periode 1997/1998-2001/2002 dari segi jumlah murid dan guru mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 20,42 % dan 6,11 %. Namun untuk jumlah sekolah selama periode yang sama sebesar 29,29 %. Pada periode 1997/1998-2001/2002 pertumbuhan jumlah murid sekolah menengah (SMU & SMK) rata-rata sebesar 6,89 % tahun, sedangkan pertumbuhan jumlah guru sebesar 0,22 % per tahun dan pertumbuhan jumlah sekolah menengah rata-rata sebesar 1,70 % per tahun. Sedangkan rasio murid-guru sekolah menengah tahun 2001/2002 (tidak termasuk Kabupaten Bangkep) adalah sebesar 14 yang berarti

---

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> ibid



setiap seorang guru akan terdapat 14 murid, sedangkan rasio murid-guru adalah sebesar 317, yang berarti setiap sekolah menengah akan terdapat rata-rata sebanyak 301 murid.

#### d. Pendidikan Tinggi

Pada periode 1997/1998-2001/2002 pertumbuhan jumlah mahasiswa rata-rata sebesar 17,97 % tiap tahunnya dan pada periode yang sama jumlah dosen tumbuh rata-rata sebesar 25,25 % per tahun.

### A. 2. Agama

Jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Sulawesi Tengah per Juni 2003 (dikalikan dengan prosentase per 2002, tabel 4) adalah Islam (1.413.278 Jiwa), Kristen (610.037 Jiwa), Katholik (58.183 Jiwa), Hindu (96.602 Jiwa), Budha (42.638 Jiwa). Proporsi penduduk tersebut tidak menampakkan pergeseran yang berarti (kecenderungan tetap) sejak tahun 1998 sampai tahun 2002.

Kabupaten/Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
Banggai Kepulauan	50,52	45,47	3,68	0,01	0,03
Banggai	0	60,90	7,27	30,51	1,32
Morowali	72,98	23,55	0,81	2,34	0,33
Poso	57,20	40,18	4,12	12,71	9,45
Donggala	72,47	21,87	2,28	2,69	0,69
Tolitoli	0,10	0,67	0,85	1,44	0,30
Buol	89,98	6,99	0,47	2,32	0,24
Palu	82,22	11,97	2,44	0,93	2,44
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>63,64</b>	<b>27,47</b>	<b>2,62</b>	<b>4,35</b>	<b>1,92</b>

Sumber : Data BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka, 2003

### B. Kondisi Ekonomi<sup>5</sup>

Kegiatan perekonomian di Sulawesi Tengah berasal dari beberapa sektor, yaitu sektor pertanian (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan), perdagangan dan industri. Gambaran kondisi ekonomi di Sulawesi Tengah bertujuan untuk melihat kapasitas dan kemampuan provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang perekonomian. Kemampuan tersebut akan dilihat dari cara masyarakat ekonomi Sulawesi Tengah melakukan kegiatan ekonominya (baca: pengolahan) terhadap sumber daya alam atau sumber daya jasa di Sulawesi tengah.

<sup>5</sup> ibid

## **B. 1. Pertanian**

### **a. Perkebunan**

Sektor pertanian perkebunan terbagi menjadi 2 yaitu perkebunan besar (yang dikelola perusahaan perkebunan) dan perkebunan rakyat. Jenis tanaman yang dihasilkan oleh perkebunan besar antara lain kelapa, kopi, teh, coklat, jambu mente, karet dan kelapa sawit. Dari luas keseluruhan areal perkebunan besar tahun 2002 yang tercatat 64.472 ha, didominasi oleh tanaman kelapa sawit sebesar 51.925 ha dengan produksinya mencapai 121.339 ton. Kemudian tanaman coklat seluas 4.689 ha, kopi 1.975 ha, kelapa 1.710 ha, sedangkan jenis tanaman lainnya dibawah 1.300 ha. Untuk jenis tanaman yang dihasilkan di perkebunan rakyat mulai dari kelapa sampai dengan tanaman kemiri.

### **b. Kehutanan**

Luas kawasan hutan Sulawesi Tengah tahun 2002 tercatat 4.394.982 ha yang terdiri dari hutan lindung seluas 1.489.923 ha, hutan produksi biasa tetap seluas 500.587 ha, hutan produksi terbatas seluas 1.476.316 ha, hutan yang dapat dikonversi seluas 251.856 ha, dan hutan suaka alam dan hutan wisata seluas 676.248 ha.

Eksplorasi hasil hutan bagi pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) pada tahun 2002 dengan luas penebangan mencapai 2.434 ha jika dibandingkan dengan luas penebangan tahun 2001 sebesar 5.242 ha berarti terjadi penurunan 43,56 %, sedangkan produksi (*eksploitasi*) tahun 2002 sebanyak 73.072 m<sup>3</sup> jika dibandingkan dengan produksi (*eksploitasi*) tahun 2001 sebanyak 125.504 m<sup>3</sup>, penurunannya mencapai 41,78%.<sup>6</sup>

### **c. Peternakan**

Jenis-jenis ternak yang diusahakan di Sulawesi Tengah diklasifikasikan menjadi ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi), dan ternak unggas (ayam ras, ayam kampung dan itik).<sup>7</sup>

### **d. Perikanan**

Produksi perikanan laut tahun 2001 sebanyak 98.353 ton bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 92.350 ton berarti mengalami peningkatan 6,50 %, sedangkan perikanan darat tahun 2001 tercatat 5.434 ton.

Adapun jumlah rumah tangga perikanan (laut dan darat) tahun 2000 sebanyak 30.252 rumah tangga menurun menjadi 29.556 rumah tangga pada tahun 2001, sedangkan jumlah perahu/kapal tahun 2000 tercatat 26.395 unit menurun juga menjadi 25.175 unit kapal pada tahun 2001.

---

<sup>6</sup> Data dan Informasi Kehutanan Sulawesi Tengah, Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, 2002

<sup>7</sup> Jenis ternak yang diusahakan ini merupakan gambaran umum peternakan yang ada di Sulawesi Tengah. Hasil peternakan tersebut juga merupakan salah satu sumber produksi yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian di propinsi ini.

## **B. 2. Perdagangan**

Perdagangan di Sulawesi Tengah meliputi perdagangan ekspor impor. Perkembangan ekspor impor dalam kurun waktu 1998-2002 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Negara-negara utama tujuan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2002 antara lain Belanda, Jepang, Belgia. Sedangkan negara asal impor antara lain Amerika, Taiwan, Jepang, Korea, Cina dan Australia.<sup>8</sup>

## **B. 3. Industri<sup>9</sup>**

Sektor industri dikelompokkan menurut banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada industri tersebut yaitu industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih diklasifikasikan sebagai perusahaan industri besar, 20 sampai 99 orang diklasifikasikan sebagai industri sedang, 5 sampai 19 orang diklasifikasikan sebagai industri kecil, dan kurang dari 5 orang adalah industri rumah tangga.

Klasifikasi jenis industri di Sulawesi Tengah dibagi menjadi: 1). Industri makanan, minuman dan tembakau; 2). Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit; 3). Industri kayu dan barang dari kayu termasuk perabot rumah tangga; 4). Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan; 5). Industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik; 6). Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik; 7). Industri dari hasil barang-barang logam mesin dan peralatannya; serta 8). Industri pengolahan lainnya.<sup>10</sup>

## **II. KABUPATEN POSO**

### **1. Kondisi Geografis dan Penduduk Kabupaten Poso**

#### **A. Kondisi Geografis<sup>11</sup>**

Kabupaten Poso wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat Daya dan melebar dari arah Barat ke Timur dan sebagian besar berada di daratan pulau Sulawesi. Bagian wilayah lainnya terdiri dari laut dan pulau-pulau, yang diperkirakan jumlah seluruh pulau sekitar 81 pulau yang sudah bernama dan yang berpenghuni sekitar 40 pulau. Letak wilayah Kabupaten Poso dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain letak astronomis, geografis dan geologis.

Letak astronomis Kabupaten Poso berdasarkan garis lintang dan garis bujur wilayahnya terletak pada koordinat  $0^{\circ}06'56''$ - $3^{\circ}37'41''$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}05'25''$ - $123^{\circ}06'17''$  Bujur Timur. Berdasarkan letak astronomisnya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung barat

<sup>8</sup> Data BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka, 2003

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> Data BPS, Kabupaten Poso dalam Angka, 2002

sampai ujung Timur 123<sup>0</sup> diperkirakan jaraknya kurang lebih 696 km. Lebarnya dari Utara ke Selatan 3<sup>0</sup> dengan jarak lebih kurang 396 km.

Letak geografis Kabupaten Poso dilihat dari posisinya terletak pada pesisir pantai, sebagian terletak di perairan Teluk Tomini dan bagian lainnya terletak di perairan Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Kawasan lain pada umumnya terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan.

Sedangkan letak geologisnya, terletak pada deretan pegunungan lipatan, yakni pegunungan Fennema dan Tineba di bagian Barat, pegunungan Takolekaju di bagian Barat Daya, pegunungan Verbeek di bagian Tenggara, pegunungan Pompangeo dan pegunungan di bagian Timur Laut.

Wilayah Kabupaten Poso dibatasi oleh batas alam yakni kawasan pantai dan pegunungan perbukitan dengan batas administratif: sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomini dan Propinsi Sulawesi Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banggai dan perairan Teluk Tolo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala.

## **B. Penduduk<sup>12</sup>**

Untuk wilayah administrasi Kabupaten Poso terdiri dari 15 kecamatan yang membawahi 211 desa definitif dan 26 yang berstatus kelurahan. Dilihat dari tingkat perkembangannya desa-desa/kelurahan yang ada di daerah ini telah diklasifikasikan sebanyak 238 desa, yang terbagi dalam 3 kelas yakni *desa swadaya*, *desa swakarya*, dan *desa swasembada*. Pada tahun 2001, terdapat 15 desa swakarya (6,3 %), 209 desa swasembada (82 %), dan sejak beberapa tahun terakhir tidak terdapat lagi desa yang diklasifikasikan desa swadaya.

Menurut hasil Registrasi Penduduk tahun 2002, penduduk Kabupaten Poso berjumlah 266.613 jiwa. Dilihat dari penyebarannya sebagian besar penduduk masih terpusat di ibukota kabupaten dan kecamatan-kecamatan Poso Pesisir, Pamona Utara, Pamona Selatan dan Ampana Kota. Sekitar 13,19 % penduduk tinggal di kecamatan Poso Kota, sedangkan luas wilayahnya sekitar 0,42% dari luas seluruh wilayah daratan Kabupaten Poso.

Transmigran yang ditempatkan di daerah ini pada tahun anggaran 2001/2002 berjumlah 460 KK, 1.889 jiwa yang terdiri dari transmigran umum sebanyak 310 KK, 1.289 jiwa dan transmigran Swakarsa 150 KK, 600 jiwa. Warga transmigran ini berasal dari pengungsi lokal. Kecamatan-kecamatan penerima transmigran tahun anggaran 2001/2002 di daerah kecamatan Lore Utara, Tojo dan Pamona Timur.

---

<sup>12</sup> ibid

No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (dalam jiwa)	Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Poso Kota	18.084	17.085	35.169	60,46
2.	Lage	7.069	6.811	13.880	401,43
3.	Poso Pesisir	11.678	10.798	22.476	1.623,92
4.	Pamona Utara	16.336	15.644	31.980	1.286,82
5.	Pamona Selatan	11.934	11.524	23.458	1.047,26
6.	Pamona Timur	4.596	4.362	8.958	701,95
7.	Lore Utara	6.567	5.819	12.386	1.627,30
8.	Lore Tengah	2.126	1.719	3.845	965,42
9.	Lore Selatan	4.070	3.899	7.969	997,69
10.	Tojo	10.047	9.953	20.000	2.157,75
11.	Ulu Bongka	6.170	5.866	12.036	1.767,11
12.	Ampana Kota	13.437	12.963	26.400	237,30
13.	Ampana Tete	8.233	7.878	16.111	796,02
14.	Una-una	9.852	9.400	19.252	527,58
15.	Walea Kepulauan	6.427	6.266	12.693	235,75
	<b>Jumlah</b>	<b>136.626</b>	<b>129.987</b>	<b>266.613</b>	<b>14.433,76</b>

Sumber: Data BPS, Kabupaten Poso, 2002

Penduduk di Kabupaten Poso terbagi menjadi 2, yaitu suku asli dan suku pendatang.<sup>13</sup>

### **B.1. Suku Asli**

Dari literatur lama, suku-suku asli yang saat ini mendiami Kabupaten Poso dan sebagian wilayah Sulawesi Tengah lainnya dapat ditemu-kenali. Albert Christiaan Kruyt (1869-1949), Misionaris yang ditempatkan di Poso sebagai penyebar agama Kristen sejak tahun 1890-an, menunjuk tiga kelompok besar Toraja yang mendiami wilayah tersebut. *Pertama*, Toraja Barat atau disebut juga Toraja Parigi-Kaili. Kedua, Toraja Timur atau Toraja-Poso-Tojo. Ketiga, Toraja Selatan atau disebut juga Toraja Sa'dan. Kelompok pertama dan kedua berlokasi di propinsi Sulawesi Tengah dan kelompok ketiga di Propinsi Sulawesi Selatan.<sup>14</sup>

Untuk menyebutkan Toraja Poso, Toraja Koro, Toraja Palu dan Toraja Sa'dan. Penduduk asli dalam kategori Poso Toraja, yakni sebagian penduduk asli yang menggunakan Bahasa Bare'e sebagai bahasa ibu. Kelompok-kelompok penduduk asli itu antara lain *To Pebato*, *To Lage*, *To Kadombuku*, *To Rompu*, *To Peladia* *To Palande*, *To Wingkem Poso*, *To Longkea*, *To Wisa*

<sup>13</sup> Laporan Perkembangan Situasi HAM di Poso dan Morowali, Sulawesi Tengah, 2003, disusun oleh Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS HAM) Sulawesi Tengah

<sup>14</sup> Albert Christian Kruyt.

dan *To Buju To Lamusa, To Ondae, To Langgeni dan To Tawualongi, To Pakambia To Pada, To Watu, To Kalae, To Tananda, To Torau, To Bau, dan To Lalaeo dan To Ampana*. Saat ini, terhadap penduduk asli dalam kategori Poso Toradja lebih populer dengan sebutan *To Pamona*, di luar *To Ampana*. Bahasa *Bare'e* menjadi menjadi bahasa pemersatu *To Pamona*.<sup>15</sup>

Penduduk asli dalam kategori Koro Toradja yang saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Poso adalah *To Napu, To Behoa, dan To Bada*. Mereka menghuni tiga lembah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. *Pertama*, *To Napu* yakni penduduk yang mendiami dataran tinggi *Napu* yang sangat luas. Lazim juga disebut *To Pekurehua*. *Kedua*, *To Behoa*, yakni penduduk asli yang mendiami dataran tinggi yang luas di lembah *Besoa*. *Ketiga*, *To Bada* yakni penduduk asli yang tinggal lembah *Bada* di jantung Sulawesi Tengah.<sup>16</sup>

Secara linguistik, bahasa *Napu, Besoa, dan Bada* berbeda dengan Bahasa *Bare'e*. Ada pengelompokan ketiga bahasa ini bersama-sama dengan bahasa *Leboni* ke dalam apa yang disebutkannya sebagai “bahasa-bahasa pegunungan Toradja Timur” (*Oost Toradjasche Bergtalen [Eastern Toradja mountain languages]*). Berdasarkan survei dilakukan Albert C Kruyt<sup>17</sup> dikelompokkan kedekatan bahasa ketiga suku itu ke dalam apa yang disebutkan sebagai kelompok bahasa *Bada (Badaic languages)*. Bahasa *Besoa* saat ini digunakan sekitar oleh 4.000 orang; bahasa *Napu* sekitar 12.000 jiwa dan; bahasa *Bada* sekitar 8.000 jiwa.<sup>18</sup>

Terhadap ketiga suku bangsa yang masuk dalam kategori Koro Toraja tersebut orang-orang kerap menyebut dengan *To Lore*. Kendati demikian, tidak seperti sebutan *To Pamona* yang mudah diserap oleh berbagai suku bangsa penyangganya, ketiga suku di lembah pegunungan itu lebih akrab menyebutkan diri mereka sebagai *To Napu* atau *To Pekurehua, To Behoa, dan To Bada*. Hampir dalam percakapan dengan orang luar, mereka tidak pernah memanggil diri mereka sebagai *To Lore*.<sup>19</sup>

Sedangkan kelompok *Palu Toraja*, yang saat ini masuk dalam wilayah Poso adalah *To Tawaelia* atau *To Payapi*. *To Tawaelia* menggunakan bahasa *Baria*, saat ini menempati satu desa di Kecamatan *Lore Utara* Kabupaten Poso.

Selain suku-suku bangsa di atas, masih terdapat beberapa suku bangsa asli lain yang mendiami wilayah yang kemudian menjadi Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali. *To Bungku* tinggal di sepanjang pantai menghadap ke Teluk Tolo. Jumlah mereka sangat signifikan dibanding suku-suku bangsa asli lainnya. Bahasa *Bungku* dan dialeknya dekat berhubungan dengan bahasa-bahasa yang dipakai di Sulawesi bagian timur dan Sulawesi

---

<sup>15</sup> Anto Sangaji, Wawancara, Yayasan Tanah Merdeka, Palu, 2 Maret 2004.

<sup>16</sup> Laporan Perkembangan Situasi HAM di Poso dan Morowali, Sulawesi Tengah, opcit

<sup>17</sup> survei dari Albert C Kruyt

<sup>18</sup> Laporan Perkembangan Situasi HAM di Poso dan Morowali, Sulawesi Tengah, opcit

<sup>19</sup> ibid

Tenggara. Bahasa Bungku dikelompokkan ke dalam bahasa-bahasa Bungku-Mori, yang mencakup Bahasa Mori, Bahasa Bungku, Bahasa Tolaki, dan Bahasa Moronene, Wawonii-Kalisusu.<sup>20</sup>

To Mori, yakni penduduk yang mendiami bagian timur dari wilayah Pamona. Berbeda dengan To Bungku yang tinggal di wilayah pesisir, To Mori tinggal di wilayah pegunungan. To Mori menggunakan bahasa Mori, yang kemudian dikelompokkan ke dalam bahasa-bahasa Bungku-Mori.

Suku bangsa lain yang juga dominan di wilayah Poso adalah Togeana. Suku ini menyebar di gugusan kepulauan Togeana di teluk Tomini. Penduduk terutama tinggal di beberapa pulau, di antaranya pulau Batudaka, Togeana, Talatako, Walea Besar dan Walea Kecil. Orang Togeana menggunakan bahasa Togeana.<sup>21</sup>

Tentu saja, penyebaran suku bangsa asli Poso di atas telah melintasi batas-batas wilayah tradisional mereka. Dalam kasus migrasi suku bangsa Toraja di Sulawesi Tengah terlihat bagaimana suku-suku bangsa tersebut berpindah-pindah dalam kurun waktu yang panjang. Agaknya, alasan utama migrasi adalah kebutuhan mendapatkan lahan perladangan yang baru, selain karena saling menyerang di antara suku-suku bangsa itu, kegagalan tanaman, penyakit, serangan suku dari luar, dan kelebihan penduduk desa. Pada masa sekarang, dengan tersedianya jalan, pendidikan, birokrasi pemerintahan, serta institusi modern lainnya, telah mempercepat mobilitas penduduk antar wilayah.

## ***B.2. Suku Pendetang***

Suku bangsa pendatang di yang berada di Poso antara lain berasal dari suku Bugis, Gorontalo, Toraja, Minahasa, Jawa, Bali, suku-suku dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Tionghoa dan Arab. Suku-suku itu umumnya memasuki Poso, baik melalui migrasi secara spontan, juga melalui program-program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Di antara penduduk suku-suku bangsa pendatang, beberapa suku seperti Bugis, Jawa, Bali dan Gorontalo sangat menonjol jumlahnya. Pada tahun 2000, penduduk berasal dari suku bangsa Bugis mencapai 21.021 jiwa (di Kabupaten Morowali) dan 11.802 jiwa (di Kabupaten Poso); Jawa 16.970 jiwa (Morowali) dan 7.243 (Poso); Bali 5.620 jiwa (Morowali) dan 6.384 jiwa (Poso); Gorontalo 876 jiwa (Morowali) dan 15.723 jiwa (Poso).<sup>23</sup> Dengan kata lain, persentase suku-suku bangsa pendatang ini mencapai 20,23 persen dari total penduduk Poso dan Morowali pada tahun 2000.

<sup>20</sup> Laporan Perkembangan Situasi HAM di Poso dan Morowali, Sulawesi Tengah, opcit

<sup>21</sup> Laporan Perkembangan Situasi HAM di Poso dan Morowali, Sulawesi Tengah, opcit

<sup>22</sup> Anto Sangaji, opcit

<sup>23</sup> Data BPS, Kabupaten Poso dalam Angka, 2001.



Arus masuk orang-orang Bugis dari bagian Selatan dan Gorontalo dan Minahasa dari bagian utara ke wilayah-wilayah Poso sudah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Setidak-tidaknya, sejak zaman Belanda, bagian utara dan selatan Sulawesi merupakan wilayah migrasi keluar penduduk yang penting, di mana salah satu tujuan migrasi adalah bagian tengah Sulawesi (Luwu, Poso, Donggala).

Masuknya orang-orang Bugis ke wilayah Poso sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Tidak ada informasi pasti mengenai waktu migrasi di masa lalu, tetapi diduga karena berbagai motif. Migrasi yang terjadi belakangan terutama dipicu oleh terbukanya jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Makassar-Palopo-Poso-Palu-Gorontalo-Manado, sehingga memudahkan mobilitas Orang Bugis masuk ke wilayah Poso, baik melalui jalur Palopo-Poso, maupun melalui Palu-Poso. Para migran terutama mengincar tanah-tanah pertanian yang subur di wilayah Poso.<sup>24</sup>

Migrasi Orang Gorontalo dan Minahasa juga telah berlangsung dalam masa yang panjang. Orang Gorontalo, misalnya, sudah menyebar di wilayah-wilayah pesisir Teluk Tomini termasuk Poso, karena ramainya perdagangan di teluk itu di masa lalu. Orang Minahasa dan juga Gorontalo yang masuk ke wilayah Poso dalam masa puluhan tahun terakhir sudah memiliki motif yang jauh lebih kompleks, misalnya, migrasi kalangan terdidik untuk menjadi pendidik, birokrat sipil dan militer, dan tugas-tugas gereja (Minahasa). Kemudian, migrasi “kalangan bawah” untuk kegiatan pertanian dan perikanan.

Yang menonjol dari migrasi suku-suku bangsa Sulawesi ke Poso adalah bahwa di daerah-daerah pesisir pantai, mudah ditemukan warga Bugis dan Gorontalo. Sebaliknya, terutama di daerah-daerah dataran tinggi, terdapat orang-orang Minahasa dan Toraja. Umumnya sudah terjadi pembauran suku pendatang dan pribumi melalui perkawinan. Orang Bugis juga dengan mudah ditemukan di berbagai daerah dataran tinggi, baik yang sudah terbuka maupun yang masih terisolasi, seperti di Lembah Bada dan Lembah Besoa. Mereka menjadi pedagang bahan-bahan kebutuhan pokok, pembeli hasil-hasil hutan (rotan), dan memiliki lahan-lahan pertanian (sawah, kopi dan kakao). Di antara mereka juga sudah kawin-mawin dengan penduduk asli di dataran tinggi itu.<sup>25</sup>

Selain suku bangsa besar Sulawesi, juga terdapat migrasi suku bangsa kecil ke Poso. Sebut saja, To Padaoe, Karonsi'e Dongi, dan To Rampi yang pindah ke Poso karena peristiwa DII/TII Kahar Muzakkar pada ahir 1950-an. Suku-suku ini sebelumnya berada di perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Suku bangsa pendatang lain yang juga penting di Poso adalah Tionghoa dan Arab. Pada tahun 1920 populasi orang Tionghoa di berbagai tempat yang kini menjadi bagian dari Poso sudah mencapai 596 jiwa, dengan konsentrasi terbesar terdapat di wilayah-wilayah pesisir, seperti di Poso 289 jiwa, Ampana

---

<sup>24</sup> Laporan Perkembangan Situasi HAM di Poso dan Morowali, Sulawesi Tengah, opcit

<sup>25</sup> ibid



71 jiwa, Una-una 50 jiwa, Togean 39 jiwa, Walea 35, Borone 40 jiwa. Sebaliknya, di wilayah-wilayah dataran tinggi, jumlah orang Tionghoa lebih terbatas, misalnya, di Tentena sebanyak 24 jiwa dan wilayah Ondae 12 jiwa.<sup>26</sup>

Dalam tahun yang sama, populasi orang Arab mencapai 285 jiwa, utamanya terkonsentrasi di wilayah pesisir. Di Poso, terdapat 116 jiwa orang Arab, Una-una (57 jiwa), Ampana (40 jiwa), Walea (34 jiwa) dan Togean (33 jiwa).<sup>27</sup>

Salah satu aspek penting dari migrasi suku bangsa pendatang ke Poso dalam 40 tahun terakhir ini adalah program transmigrasi. Sejak Pra Pelita hingga tahun anggaran 1998/1999, melalui program transmigrasi telah ditempatkan penduduk sebanyak 88.204 jiwa di Kabupaten Poso.

Beberapa wilayah kecamatan merupakan sasaran utama transmigrasi, diantaranya adalah Kecamatan Poso Pesisir, Pamona Selatan, Mori Atas, Lembo, Bungku Utara, dan Bungku Tengah. Tetapi, dari sekian wilayah kecamatan tujuan transmigrasi di Kabupaten Poso, maka perhatian penting perlu diberikan kepada wilayah Kecamatan Pamona Selatan. Kecamatan ini selama Pelita III menerima pasokan transmigran dalam jumlah signifikan. Dari Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Mayoa I, Mayoa II, Mayoa III, dan Mayoa IV tercatat sebanyak 1.860 KK atau 7.890 jiwa transmigran umum. Jumlah yang sangat penting, karena sebelum kedatangan para transmigran, populasi penduduk di kecamatan tersebut pada tahun 1972 hanya 9.227 jiwa. Setelah kedatangan transmigran, total penduduk di kecamatan ini mencapai 17.428 jiwa pada tahun 1990. Artinya, total jumlah transmigran mencapai 45,27 % dari total penduduk Kecamatan Pamona Selatan pada tahun 1990.<sup>28</sup>

Pengalaman yang sama juga terjadi di Kecamatan Lembo. Mengingat sejak Pelita IV, telah ditempatkan ribuan transmigran perkebunan inti rakyat khusus (Pirsus) yang menyebar di UPT Pirsus Lembo I, Pirsus Lembo II, Pirsus Lembo III, Pirsus Lembo IV, Pirsus Lembo V, dan Pirsus Lembo VI. Suku-suku Jawa, Bali, dan suku-suku dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tumpah ruah di atas tanah-tanah To Mori, yakni suku asli dan mayoritas setempat. Akibatnya, populasi penduduk di Kecamatan ini yang di tahun 1972 hanya 6.920 jiwa, meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 1990 mencapai 13.734 jiwa.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *ibid*

<sup>27</sup> *ibid*

<sup>28</sup> Laporan Perkembangan Situasi HAM di Poso dan Morowali, Sulawesi Tengah, opcit

<sup>29</sup> *ibid*

## 2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Poso

### A. Kondisi Sosial<sup>30</sup>

Kondisi sosial kabupaten Poso dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor pendidikan, keamanan dan ketertiban masyarakat serta faktor agama. Ketiga faktor ini merupakan faktor-faktor yang menonjol untuk diamati mengingat kondisi Poso yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), masyarakat yang Plural, dan juga (sedang) mengalami konflik sosial diantara masyarakatnya.

Pertimbangan-pertimbangan diatas layak untuk melihat sejauh mana peta pembagian SDA di Poso dan manajemen konflik dalam masyarakat Poso yang plural dan sedang konflik.

#### A.1. Pendidikan

Tingkat efisiensi penggunaan dan kecukupan sarana pendidikan dalam melakukan proses belajar mengajar yang diukur dari rasio jumlah murid terhadap sekolah. Pada tahun ajaran 2001/2002 di tingkat Sekolah Dasar rata-rata murid sebanyak 114 orang tiap sekolah, tingkat SLTP baik negeri maupun swasta mencapai rata-rata 173 pelajar setiap sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMU dan SMK masing-masing mencapai 200 dan 159 siswa setiap sekolah.

Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat, komposisi persentase penduduk Kabupaten Poso bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 6. TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERSENTASENYA (100%)	
Tingkat Pendidikan	Persentase
Tidak / Belum pernah sekolah	2,95%
Putus Sekolah	80,39%
Masih Sekolah di SD	8,93%
Masih Sekolah di SMP	5,40%
Masih Sekolah di SMA	1,88%
Masih Sekolah di Diploma / Universitas	0,45%

Sumber: Data BPS, Kabupaten Poso, 2000

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Poso termasuk rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tingkat pendidikan yang putus sekolah sebesar 80,39 %, sedangkan tingkat pendidikan yang masih sekolah juga termasuk rendah karena masing-masing persentasenya tidak mencapai tingkat pendidikan yang semestinya.

<sup>30</sup> Data BPS, Kabupaten Poso dalam Angka, 2000.

### A. 2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Gangguan Kamtibmas berupa peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dan ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Poso pada tahun 2001 dilaporkan sebanyak 326 kasus, diselesaikan sebanyak 78 kasus (23,9 %). Sementara kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri (PN) kelas I B Poso pada tahun 2001 pada perkara pidana berjumlah 98 kasus. Pada tahun 2002 yang masuk yang masuk ke PN Negeri I B Poso berjumlah 2002.

TABEL 7.	DATA PERKARA DALAM TAHUN 2001 PENGADILAN NEGERI KELAS I B POSO		
	Perkara Pidana	Jumlah	
	Biasa	Singkat	
Sisa tahun 2000	35	-	-
Masuk dalam tahun 2001	98	1	-
Putus	100	1	-
Terdakwa/jaksa menerima	100	1	-
Terdakwa/jaksa minta banding	-	-	-
Terdakwa/jaksa minta kasasi	-	-	-

Selama tahun 2002 banyaknya tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas yang diterima/ diselesaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Poso bersama cabang-cabangnya yang berada di 4 kecamatan.

### A.3. Agama<sup>31</sup>

Mayoritas penduduk Poso menganut agama Islam (60,61 % pada tahun 1986, 61,26 % pada tahun 1996, dan 62,82 % pada tahun 2001). Tidak diketahui pasti kapan agama Islam masuk ke Poso. Dari peta penyebaran Islam dan Kristen di Asia Tenggara terlihat hanya Bungku yang telah menjadi daerah Islam sejak abad 16. Daerah-daerah lain di wilayah yang saat ini menjadi bagian Kabupaten Poso justru belum menjadi penganut Islam hingga abad 18. Diperkirakan Islam menyebar di wilayah To Bungku melalui Kerajaan Ternate pada abad XVI. Seperti diketahui, pelabuhan-pelabuhan pantai di wilayah To Bungku pada masa itu secara politik berada di bawah kontrol Kerajaan Ternate.<sup>32</sup>

Penyebaran Islam secara meluas di wilayah Poso dan Sulawesi Tengah pada umumnya terjadi pada abad-abad berikutnya, melalui pedagang-pedagang Bugis, dimulai dengan mengislamkan penduduk pesisir pantai, yang kemudian menyebar mengikuti rute perdagangan. Islam tumbuh dengan subur di daerah-daerah pesisir Kabupaten Poso.

<sup>31</sup> Laporan Perkembangan Situasi HAM di Poso dan Morowali, Sulawesi Tengah, opcit

<sup>32</sup> ibid

Pengaruh besar terhadap pertumbuhan Islam terutama berkat adanya Perguruan Islam Alchiraat, sebuah organisasi sosial keagamaan terbesar dan berpengaruh di Indonesia Timur yang mengelola banyak lembaga pendidikan. Organisasi yang berpusat di Palu ini didirikan oleh ulama asal Hadramaut, Yaman Selatan, KH Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufrie.<sup>33</sup>

Selain Alchiraat, juga terdapat Muhammadiyah yang memiliki sekolah setingkat SD, SLTP, SMU, panti asuhan, pesantren dan kepengurusan organisasi dari tingkat kabupaten dan kecamatan yang menyebar di wilayah Poso, termasuk di wilayah-wilayah dengan penduduk mayoritas Kristen, seperti Kecamatan Pamona Utara, Pamona Selatan, dan Lage.

Agama Kristen tumbuh setelah agama Islam. Dibandingkan daerah lain di Sulawesi Tengah, Poso merupakan daerah paling pertama bersentuhan dengan Kristen, yaitu sejak penempatan Albert Christiaan Kruyt pada tahun 1892.

Agama Kristen berkembang di Poso sejak penempatan Albert Christiaan Kruyt (1869-1949) dan Nicolaus Adriani (hidup 1865-1926) sebagai misionaris pada tahun 1890-an. Penempatan keduanya dilakukan setelah *Netherlands Missionary Society* dan *Netherlands Bible Society* menetapkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah misionaris baru pada tahun 1890 dengan berkonsultasi kepada Asisten Residen Manado, G.W.W.C. Baron van Hoevell. Agama Kristen disebarkan kepada suku-suku bangsa asli di dataran tinggi yang masih menganut agama suku. Di wilayah Sulawesi Tengah lainnya, khususnya di wilayah yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Donggala, agama Kristen disebarkan oleh Bala Keselamatan (*Salvation Army*).<sup>34</sup>

Tentena, sebuah kota kecil di tepi Danau Poso, kemudian tumbuh menjadi pusat agama Kristen di Sulawesi Tengah. Di sana terdapat kantor pusat Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), yang didirikan pada 18 Oktober 1947, ketika para misionaris mengalihkan birokrasinya kepada Sinode setempat dengan kewenangan melakukan kontrol terhadap sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan gereja yang berada di bawah naungannya. Saat ini, GKST melayani sekitar 328 jemaat di dua propinsi (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara), dengan anggota sekitar 150.000 orang.<sup>35</sup>

Agama Kristen tidak saja dianut oleh penduduk asli, tetapi juga oleh pendatang yang berasal dari Minahasa dan Toraja. Pada awalnya, di antara pendatang (khususnya pendatang dari Minahasa) bekerja sebagai guru pada sekolah-sekolah yang didirikan *Zending*.<sup>36</sup>

Segregasi agama di Poso dapat dilihat dari penganut agama yang tersebar pada kecamatan-kecamatan di Poso. Di wilayah pesisir, seperti Kecamatan Ampana Kota, Ampana Tete, Tojo, Una-una, Walea Kepulauan, dan Ulubongka (Kabupaten Poso) dan Kecamatan Bungku

---

<sup>33</sup> ibid

<sup>34</sup> Laporan Perkembangan Situasi HAM di Poso dan Morowali, Sulawesi Tengah, opcit

<sup>35</sup> ibid

<sup>36</sup> ibid. Migrasi yang terjadi belakangan didorong oleh motif-motif yang jauh lebih kompleks.

Selatan, Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Utara, dan Menui Kepulauan (Kab. Morowali), mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebaliknya, di kecamatan-kecamatan daerah dataran tinggi, seperti Kecamatan Pamona Utara, Pamona Selatan, Pamona Tengah, Lore Utara, Lore Tengah, dan Lore Selatan (Kabupaten Poso) serta Kecamatan Mori Atas dan Lembo (Kabupaten Morowali), mayoritas penduduknya menganut agama Kristen.<sup>37</sup> Segregasi juga terlihat di wilayah kecamatan di mana penduduk beragama Islam dan Kristen berimbang. Misalnya, sebelum konflik di dalam wilayah Kecamatan Poso Kota, penduduk beragama Islam mayoritas menghuni kelurahan Kayamanya, Bonesompe, dan Lawanga. Sebaliknya, penganut Kristen mayoritas berada di Kelurahan Kasintuvu, Lombogia, dan Kawua.<sup>38</sup>

Migrasi penduduk dari Sulawesi juga mengikuti pola tertentu. Orang-orang Bugis, Makassar dan Gorontalo (yang menganut agama Islam) menyebar di kecamatan-kecamatan pesisir. Sementara orang-orang Minahasa dan Toraja (yang menganut agama Kristen) cenderung memilih menyebar di kecamatan-kecamatan di dataran tinggi. Konfigurasi penduduk semacam itu memberikan persilangan yang menarik. Penghuni wilayah kecamatan-kecamatan di dataran tinggi seperti *To Pamona*, *To Mori*, *To Napu*, *To Behoa*, dan *To Bada* dikenal sebagai penduduk asli dan sekaligus sebagai penganut Kristen (umumnya protestan). Sebaliknya, penghuni kecamatan-kecamatan pesisir di Teluk Tomini seperti *To Ampana* dan *To Bungku di Teluk Tolo* adalah suku asli dan sekaligus penganut Islam.<sup>39</sup>

Program transmigrasi selama Orde Baru juga telah mengocok ulang komposisi penduduk berdasarkan agama di Poso. Penempatan transmigran asal Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat berlangsung hampir di seluruh kecamatan, termasuk di kecamatan-kecamatan dengan penduduk mayoritas bergama Kristen, seperti di Kecamatan Pamona Utara, Pamona Selatan, Mori Atas, Lembo, dan Lore Utara. Transmigran asal Jawa dan Nusa Tenggara Barat mayoritas menganut agama Islam. Sejumlah kecil transmigran asal Jawa dan Nusa Tenggara Timur menganut agama Kristen. Sedangkan transmigran asal Bali mayoritas menganut agama Hindu.<sup>40</sup>

Akibatnya, seperti yang terjadi di Kecamatan Pamona Selatan, terjadi pergeseran persentase angka statistik jumlah penduduk berdasarkan agama. Pada tahun 1996, penganut agama Islam 22,87 %, Kristen 63,64 % dan Hindu/Budha 8,96 %. Padahal 15 tahun sebelumnya, (tahun 1972), penganut agama Islam di wilayah ini hanya 3,44 % dibanding Kristen 96,54 %. Di Kecamatan Lembo dan Morowali, transmigrasi menyebabkan jumlah penduduk beragama Islam meningkat (tahun 1996, penganut Islam mencapai 35,43 %, Kristen 60,15 % dan Hindu/Budha 4,47 %, padahal pada tahun 1972, penganut agama Islam hanya 3,34 % dibanding Kristen 96,65 %).<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> ibid

<sup>38</sup> ibid

<sup>39</sup> ibid

<sup>40</sup> ibid

<sup>41</sup> ibid

Selain program transmigrasi, faktor yang berperan menaikkan populasi penduduk beragama Islam di wilayah penduduk beragama Kristen adalah migrasi Orang Bugis. Terbukanya jalan Trans-Sulawesi yang menghubungkan Palopo (Sulawesi Selatan) dan melalui Poso, memungkinkan gelombang migrasi Orang Bugis memasuki wilayah-wilayah Pamona Selatan, Pamona Utara, Mori Atas, Lembo, Lage dan Poso Pesisir. Bahkan, terbukanya ruas jalan yang menghubungkan Kota Poso di bagian pesisir dengan Lembah Napu di dataran tinggi atau ruas jalan yang menghubungkan Palu dengan Napu melalui Lembah Palolo, serta ruas jalan Tentena-Lembah Bada, segera juga diikuti dengan gelombang baru migrasi Orang Bugis ke wilayah-wilayah pedalaman dataran tinggi Poso itu.

TABEL 7. PERSENTASE PEMELUK AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN POSO TAHUN 2002					
Kecamatan	Islam	Kristen		Hindu	Budha
		Protestan	Katolik		
Pamona Selatan	34,58	56,97	0,25	8,20	-
Pamona Utara	15,44	82,06	0,10	2,35	0,05
Lore Selatan	6,45	92,97	0,58	-	-
Lore Utara	11,63	85,73	2,64	-	-
Poso Pesisir	56,12	35,73	0,34	7,81	-
Poso Kota	57,60	40,43	1,50	0,24	0,23
Lage	31,88	67,69	0,30	-	0,13
Tojo	74,38	25,62	-	-	-
Ulubongka	64,42	30,12	1,39	4,07	-
Ampana Tete	93,82	6,18	-	-	-
Ampana Kota	96,98	2,53	0,04	-	0,45
Una-una	98,82	1,02	0,06	-	0,10
Walea Kepulauan	99,32	0,55	-	0,06	0,07
Pamona Timur	3,92	95,51	0,52	0,05	-
Lore Tengah	4,45	95,21	0,34	-	-
<b>Kabupaten Poso</b>	<b>57,20</b>	<b>40,18</b>	<b>0,53</b>	<b>1,99</b>	<b>0,10</b>

Sumber: Data BPS, Kabupaten Poso, 2002

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa persentase pemeluk agama Islam yaitu 57,20 % dan pemeluk agama Kristen Protestan yaitu 40,18 % sangat dominan, jika dibandingkan dengan persentase dari pemeluk agama lainnya, karena memang kedua agama tersebut merupakan agama yang dominan di wilayah Kabupaten Poso.

## B. Kondisi Ekonomi<sup>42</sup>

Merujuk pada data statistik kesejahteraan rakyat dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kabupaten Poso yang bekerja selama seminggu, berdasarkan lapangan usaha utama (*sektor*), masih didominasi oleh sektor pertanian (70,43 %), disusul sektor perdagangan (10,08 %), sektor jasa (9,72 %), sektor industri (4,53 %), sektor konstruksi (2,31 %) dan sektor komunikasi (1,94 %), serta pertambangan (0,46 %), listrik-air (0,11 %), keuangan (0,42 %).

Kegiatan perekonomian di Kabupaten Poso berasal dari beberapa sektor, yaitu: pertanian (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) dan perdagangan.

### B.1. Pertanian

Sektor pertanian dikembangkan dengan jenis tanaman pangan, antara lain padi, palawija yang terdiri dari jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau. Selain itu juga ada tanaman sayur-sayuran dan tanaman buah-buahan.

#### a. Perkebunan

Hampir sama dengan jenis perkebunan di Sulawesi Tengah, perkebunan di Kabupaten Poso juga terbagi menjadi 2, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar yang ada di Kabupaten Poso jenis tanamannya antara lain kopi, teh dan kakao, tetapi semuanya sudah tidak lagi beroperasi dan memproduksi karena perusahaan sudah tidak aktif sejak tahun 2000.

#### b. Kehutanan

Luas hutan di Poso keseluruhan adalah 855.502,1 ha. Hutan lindung seluas 309.829 ha, hutan produksi biasa seluas 90.901 ha, hutan produksi terbatas seluas 271.942 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata seluas 145.453 ha, hutan yang dikonversi seluas 37.377,1 ha, hutan areal produksi lainnya seluas 582.123,9 ha.

Jenis hasil hutan antara lain :

1. Kayu Bulat (Meranti, Agathis, Kayu Jati, Kayu Hitam, Kayu Indah serta Komoditas lain)
2. Kayu Olahan (Playwood, Kayu gergajian, Moulding, Kayu Hitam Gergajian, Kayu Hitam Komponen)
3. Hasil Hutan Non Kayu (Rotan, Damar, Kemiri, Calapari).

#### c. Peternakan

Populasi ternak diklasifikasikan atas ternak besar meliputi sapi, kerbau, kuda; ternak kecil meliputi kambing, babi dan domba serta ternak unggas meliputi ayam kampung, ayam petelur, itik dan ayam pedaging.

#### d. Perikanan

Secara umum, perikanan di Kabupaten Poso dibagi menjadi 2, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Untuk perikanan laut, dalam melakukan penangkapan ikan,

<sup>42</sup> Data BPS, Kabupaten Poso, 2002



para nelayan menggunakan sarana berupa kapal motor, perahu motor, perahu tidak bermotor dan perahu tempel. Sedangkan untuk perikanan darat, nelayan mengusahakan tambak dengan menggunakan kolam.

## **B.2. Perdagangan**

Pertumbuhan perusahaan perdagangan pada tahun 2002 mengalami perkembangan yang sedikit meningkat, jika dibandingkan dengan total jumlah perusahaan perdagangan pada tahun 2001 yaitu sebesar 20,42%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan perdagangan yang mulai aktif membuka usaha akibat kondisi keamanan yang mulai kondusif setelah terjadinya gejolak sosial tahun 2000 yang lalu.

Selain itu juga terdapat peningkatan jumlah koperasi dan juga produksi koperasi dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah koperasi dan anggotanya di Kabupaten Poso pada tahun 2002 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2001. Jumlah koperasi pada tahun 2001 sebesar 143 unit dan pada tahun 2002 sebanyak 148 unit dengan jumlah anggotanya pada tahun 2001 sebanyak 46.505 orang dan tahun 2002 sebanyak 56.970 orang.<sup>43</sup> Jenis-jenis koperasinya antara lain: Koperasi Unit Desa, Koperasi Pegawai Negeri, koperasi ABRI, Koperasi Pensiunan, Koperasi Wanita, Koperasi Sekolah/Pemuda, Koperasi Kerajinan, Koperasi Perikanan, Koperasi Peternakan, Koperasi Angkutan, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Konsumsi, Koperasi Buruh/Karyawan, dll.)<sup>44</sup>

## **III. DESA TOKORONDO**

### **1. Kondisi Geografis dan Penduduk Desa Tokorondo**

#### **A. Letak Geografis<sup>45</sup>**

Desa Tokorondo terletak di kecamatan Poso Pesisir, sekitar 20 km ke arah barat Poso Kota (dari arah Palu). Desa ini terletak di poros jalan trans Sulawesi Palu-Poso-Makasar. Luas wilayah Tokorondo 35 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 5 dusun, kebun dan hutan. Batas-batas wilayah dari Desa Tokorondo adalah : sebelah utara dari Tokorondo adalah Desa Tiwaa.<sup>46</sup>

#### **B. Penduduk**

Jumlah Penduduk desa Tokorondo adalah 1193 KK atau 5250 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki lebih besar ( $\pm$  3500 jiwa). Suku asli dari Desa Tokorondo adalah suku Kaili. Selain itu penduduknya rata-rata berasal dari Bugis, asal Palopo, etnis Gorontalo, Manado, Jawa dan Bali.<sup>47</sup> Jumlah penduduk pendatang dalam beberapa tahun meningkat, terutama yang berasal dari Jawa (berprofesi juru dakwah/anggota Laskar Jihad, dan Beberapa menikah dengan penduduk setempat dan menetap di sana).

<sup>43</sup> Data Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah, 2002

<sup>44</sup> *ibid*

<sup>45</sup> Andi, Warga Desa Tokorondo, Wawancara, 8 Maret 2004

<sup>46</sup> wawancara dengan Kades Tokorondo, Hasil penelitian lapangan ke Tokorondo, Februari 2004.



## 2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Tokorondo

### A. Kondisi Sosial

Faktor-faktor sosial di Desa Tokorondo sangat dipengaruhi faktor-faktor pendidikan, agama, organisasi masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kondisi pra dan pasca konflik.<sup>48</sup>

#### A.1. Pendidikan

Rata-rata pendidikan tertinggi masyarakat Tokorondo adalah SMP. Hal ini dikarenakan beberapa hal; sarana penunjang menuju ke Sekolah Menengah Atas, dimasyarakat Tokorondo hidup anggapan bahwa sekolah menjadi tidak terlalu penting, terutama bagi lelaki, karena yang terpenting adalah ketika lelaki mempunyai uang. Hal ini menjadi lebih penting dan terhormat.

Di desa ini hanya terdapat 1 Taman Kanak-kanak, 1 Sekolah Dasar, serta (rencananya) akan dibangun 1 Sekolah Menengah Pertama.<sup>49</sup>

#### A.2. Agama

Mayoritas penduduk Tokorondo beragama Islam. Di sebelah timur desa Tokorondo terdapat Desa Masani, yang dulunya adalah desa dengan mayoritas penduduk Kristen, namun kosong karena semasa konflik sebagian besar warganya mengungsi ke Tentena dan Lembah Napu.<sup>50</sup> Di Tokorondo juga terdapat 12 KK beragama Hindu (masyarakat Transmigran dari Bali)<sup>51</sup>.

#### A.3. Organisasi Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Desa Tokorondo adalah CWS (Church World Service) yang berkonsentrasi pada pemenuhan bantuan Sembako. Selain itu juga terdapat sebuah organisasi berbasis program dari Pemerintah; CARE yang berkonsentrasi pada bantuan perumahan. Sedangkan organisasi masyarakat yang cukup aktif adalah Risma (Remaja Islam Masjid) Annur serta Wiyah (Wanita Islam al-Khaairat).

#### A.4. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Ada 2 pos pengamanan di desa tersebut, yaitu pos TNI dan pos Polisi. Keduanya bukan pos dari kesatuan TNI dan Polisi yang organik. Pos-pos tersebut merupakan pos-pos bagian dari kebijakan pengamanan daerah konflik Poso, sejak 1998. Pos TNI di Tokorondo pada saat penelitian ini dilakukan diisi oleh TNI Yonif 721 (baru berakhir dan belum diketahui penggantinya). Sementara Pos Polri diisi oleh Brimob Polda Palu. Sementara masyarakat

<sup>47</sup> ibid

<sup>48</sup> ibid

<sup>49</sup> Andi, ibid

<sup>50</sup> ibid

<sup>51</sup> Ateng, Ibid.

mengembangkan siskamling di setiap dusun untuk mengamankan lingkungan mereka, meskipun inisiatif ini kerap menuai protes dari militer.<sup>52</sup> Dengan kata lain bahwa siskamling merupakan keharusan yang datang TNI di Tokorondo.

#### **A.5. Kondisi Desa Tokorondo Pra dan Pasca Konflik**

##### *Pra Konflik*

Kondisi Tokorondo sebelum konflik relatif biasa-biasa saja. Artinya Tokorondo merupakan wilayah yang kondisi ekonomi sosialnya relatif normal dengan kerja-kerja harian masyarakatnya. Rata-rata masyarakatnya bekerja di PT. Gulat. Paska penutupan PT. Gulat, masyarakat Tokorondo banyak yang bekerja berkebun cokelat dan melaut. Kenormalan kehidupan sehari-hari di Tokorondo juga ditopang dari tidak terlalu pluralnya masyarakat di Tokorondo. Tingkat pendidikan masyarakat sejak sebelum konflik adalah SMP. Setelah lulus SMP mereka, terutama yang laki-laki, lebih memilih untuk langsung bekerja, supaya mempunyai uang. Organisasi keagamaan juga cukup berperan di Tokorondo. Terutama RISMA (Remaja Islam Masjid .....) yang banyak melakukan kegiatan ditingkat pemuda. Dengan kata lain, bahwa masyarakat Tokorondo sehari-harinya cukup agamis.

##### *(Paska) Konflik*

Pada tahun 2000 Tokorondo dan beberapa desa di wilayah pesisir, diserang. Hampir seluruh rumah dibakar. Dan hampir seluruh masyarakatnya mengungsi karena sudah tidak ada tempat untuk tinggal yang aman. Pengungsiaan yang dilakukan juga merupakan sebuah upaya untuk menjauh dari keterlibatan dalam konflik. Salah satu indikasinya adalah masyarakat Tokorondo tidak aktif dalam kegiatan sweeping yang kerap dilakukan saat konflik sedang memanas.<sup>53</sup>

Akibat konflik, masyarakat kehilangan harta bendanya, terutama pada saat konflik dan penyerangan merebak ke desa mereka pada bulan Mei 2000, ± 900 rumah penduduk telah terbakar. Selain kehilangan sejumlah aset-aset primer, seperti rumah, masyarakat banyak yang harus kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa keluarganya. Kondisi yang tidak menentu dan dalam keadaan panik, menyebabkan masyarakat mengungsi dalam keadaan darurat. Banyak dari anggota masyarakat yang tidak lagi mampu mengurus hal-hal yang penting berkaitan dengan aset-asetnya. Oleh sebab itu ada beberapa masyarakat Tokorondo, setelah kembali ke desa Tokorondo, posisi rumahnya berpindah<sup>54</sup>.

Banyak warga desa Tokorondo yang mengungsi ke Parigi, Palu dan Poso Kota. Tetapi saat ini sudah kembali ke Tokorondo. Pada masa awal kembalinya mereka ke Tokorondo, masyarakat tersebut sempat tinggal di barak-barak (darurat) yang dibangun paska konflik.

---

<sup>52</sup> ibid

<sup>53</sup> ibid

<sup>54</sup> Andi dan Wardah.

Saat ini di Tokorondo sudah dibangun RTS-RTS (Rumah Tinggal Sementara), sebagai tindak lanjut Deklarasi Malino (Deklama).<sup>55</sup>

Secara umum terlihat situasi desa ini menjadi lebih sepi bila dibandingkan dengan kondisi sebelum konflik. Tersirat kondisi psikologis masyarakat yang lelah dengan konflik yang berlarut-larut dan “teror”, seperti Penembakan misterius dan BOM, yang mereka rasakan. Saat ini kondisi ekonomi masih belum dapat dikatakan pulih, karena masyarakat masih sangat bergantung pada bantuan, sembari memulai kembali kehidupan ekonomi mereka.<sup>56</sup>

Pemerintah sendiri memberikan bantuan untuk Desa Tokorondo berupa: Bahan Bangunan Rumah (BBR) atau Rumah Tinggal Sementara (RTS), Jaminan Hidup/Modal Usaha (Jadup Bedup), serta kebutuhan lauk pauk dalam bentuk uang (sampai tahun 2001).<sup>57</sup>

## **B. Kondisi Ekonomi**

### ***B.1. Pekerjaan***

Umumnya penduduk Desa Tokorondo adalah petani kebun (80%) dan sisanya adalah nelayan. Banyak pula penduduk yang tidak hanya berkebun, tetapi juga melaut. Luasnya lahan untuk perkebunan dan dekatnya laut yang cukup kaya memberikan kemungkinan bagi penduduk untuk mencari penghidupan dengan berkebun dan melaut. Dengan profesi utama petani kebun (terutama kakao yang menguntungkan dengan harga pasar rata-rata Rp. 10.000-15.000/kg) pekerjaan sebagai nelayan menjadi sambilan. Rata-rata penduduk memiliki kebun dan meskipun ada yang tidak memiliki kebun, mereka memilih untuk menjadi buruh tani di perkebunan.<sup>58</sup>

## **Penelitian Bisnis Militer**

### ***1. Metode***

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam Workshop Modul Penelitian Keterlibatan Militer dalam Bisnis yang telah dilakukan sebelum penelitian lapangan, metode Penelitian ini menggunakan pendekatan **Kontekstualisasi Progressif** dan **Etnografi Praktis**.

Metode kontekstual progresif melihat kondisi dari ;

- a. tindakan aktor
- b. jejaring aktor tertentu di lokasi
- c. konsekuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan oleh tindakan aktor dan jejaring aktor

<sup>55</sup> ibid

<sup>56</sup> **Andi**, ibid

<sup>57</sup> ibid. Sementara di Desa Masani yang berbatasan dengan Desa Tokorondo, juga sudah dibangun RTS dan warganya di 'minta' kembali dari tempat pengungsian dengan iming-iming RTS dan bantuan lainnya, namun warga menolak. Tampaknya penduduk desa ini mengalami trauma cukup serius akibat konflik.

<sup>58</sup> ibid

Sedangkan pendekatan Etnografi Praktis melihat fenomena di masyarakat melalui ;

- a. Sejarah
- b. Profil Sosial penduduk setempat (etnis, agama, jenis kelamin, dll)
- c. Mata Pencaharian
- d. Organisasi Sosial (pengelompokan-pengelompokan sosial)

### **A. Teknik penelitian**

Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dalam metode ini adalah

1. Wawancara
2. Pengamatan
3. Pencatatan Lapangan
4. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)
5. Visualisasi (Sketsa, peta, foto, film)
6. Penelusuran Data Sekunder

Untuk mendapatkan data secara praksis di lapangan, dibuat 2 pertanyaan dasar yang masing-masing memiliki turunan pertanyaan. yaitu ;

1. Bagaimana sejarah dan pola tindakan bisnis militer dan polisi di lokasi penelitian.
2. Apa konsekuensi tindakan bisnis tersebut terhadap Kondisi HAM di lokasi penelitian

### **B. Pencatatan Data Lapangan**

Dalam pencatatan data di lapangan minimal ada beberapa bentuk catatan :

- a. Laporan ringkas.
- b. Laporan yang diperluas.
- c. Jurnal penelitian lapangan.
- d. Diskusi tim peneliti.

### **C. Waktu dan ruang lingkup wilayah penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan pada bulan Februari dan Maret 2004. pencarian datanya dilakukan dengan melihat sejarah eksploitasi kayu hitam di wilayah penelitian. Kilas balik ini dilakukan untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi pada saat ini memiliki hubungan sebab-akibat dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Selain itu, agar dapat melihat peristiwa secara komprehensif dan holistik, sehingga dari penelitian ini dilihat kecenderungan yang terjadi di masa yang akan datang.

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah daerah **Desa Tokorondo** beserta wilayah sekelilingnya yang berkaitan dengan lokasi eksploitasi kayu hitam.

## Bab II

# Hutan dan Kayu Hitam di Sulawesi Tengah

### 1. Hutan

#### A. Kawasan Hutan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan berdasarkan SK penunjukkan Menteri Kehutanan Nomor 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 adalah seluas ± 4.394.932 Ha. Luas kawasan hutan ini mencakup 69,01% dari luas propinsi Sulawesi Tengah.<sup>59</sup> Kawasan hutan ini terdiri dari kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi dengan perincian luas sebagai berikut:

TABEL 8. PERINCIAN KAWASAN HUTAN		
Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persen Luas %
Kawasan Hutan Konservasi (HAS + HPA)	+ 676.258 ha	15,39
Kawasan Hutan Lindung	+ 1.489.923 ha	33,90
Kawasan Hutan Produksi	+ 2.228.761 ha	50,71
-Hutan Produksi Terbatas (HPT)	+ 1.476.316 ha	33,59
-Hutan Produksi Tetap (HP)	+ 500.589 ha	11,39
-Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	+ 251.856 ha	5,73
<b>Luas Keseluruhan</b>	<b>+ 4.394.932 ha</b>	<b>100</b>

Sumber : Data dan Informasi Kehutanan Sulawesi Tengah, 2002

<sup>59</sup> Data dan Informasi Kehutanan Sulawesi Tengah, Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, 2002

Kawasan Konservasi terdiri dari Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TW), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Buru (TB). Hutan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Di Sulawesi Tengah, Hutan Konservasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan adalah sejumlah 3 unit Cagar Alam, 5 unit Suaka Margasatwa, 1 unit Taman Hutan Raya, 1 unit Taman Buru, 1 unit Taman Nasional dan 1 unit Taman Wisata,<sup>60</sup> seperti rincian pada tabel berikut:

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Fungsi	Luas (Ha)	SK Penetapan
1	Tanjung Api	Poso	CA	4.246,00	91/Kpts/Um/2/1977 21 Februari 1977
2	Morowali	Poso	CA	225.000,00	364/Kpts-II/8/1986 24 November 1986
3	Pangi Binanga		CA	6.000,00	399/Kpts-II/8/1986 21 April 1986
4	Pati-pati	Banggai	SM	3.500,00	400/Kpts-II/1998 21 April 1998
5	Lamboyan I/II	Banggai	SM	3.665,00	750/Kpts/Um/12/1974 28 Desember 1974
6	Dolangan	Buol Tolitoli	SM	462,50	441/Kpts/Um/5/1981 21 Mei 1981
7	Bakiriang		SM	12.500,00	398/Kpts-II/1998 21 April 1998
8	Pinjam/ Tanjung Matop	Buol Tolitoli	SM	1.612,50	445/Kpts/Um/5/1981 21 Mei 1981
9	Palu	Donggala	THR	8.100,00	461/Kpts-II/1995 9 April 1995
10	Lore Lindu	Donggala Poso	TN	217.991,18	464/Kpts-II/1999 23 Juni 1999
11	Air Terjun Wera	Donggala	TW	250,00	843/Kpts/Um/11/1980 1 Jan 1980
12	Landusa Tomata		TB	5.000,00	397/Kpts-II/1998 21 Apr 1998

Sumber : Data dan Informasi Kehutanan Sulawesi Tengah, 2002

<sup>60</sup> ibid

## B. Pengelolaan Hutan Produksi

Pada kawasan hutan produksi, sampai dengan bulan Juli 2001 terdapat 14 unit perusahaan HPH yang masih aktif dengan total luas 1.011.445 ha dan 5 unit perusahaan HPHTI dengan data sebagai berikut :

TABEL 10.		DAFTAR PERUSAHAAN HPH YANG MASIH AKTIF DI PROPINSI SULAWESI TENGAH			
No.	Nama HPH	SK HPH	Tanggal SK	Luas Areal (Ha)	JPT (m3/th)
1	PT. Hutan Bersama	240/Kpts-IV/87	6-8-1987	90.000	
2	PT. Kalhold	390/Kpts-II/89	2-8-1989	48.000	
3	PT. Balantak Rimba Rejeki	1117/Kpts-II/92	19-12-1992	109.500	
4	PT. Kartika Rana Usaha	837/Kpts-II/91	13-11-1991	89.000	
5	PT. Wahana Sari Sakti	595/Kpts-II/91	11-8-1991	100.000	
6	PT. Satria Yudha	137/Kpts-II/95	7-3-1995	75.000	
7	PT. Dahatama Adi Karya	465/Kpts-II/95	4-9-1995	64.620	
8	PT. Satya Sena Indratama	81/Kpts-II/97	6-2-1997	67.820	
9	PT. Sulwood	220/Kpts-II/98	27-2-1996	54.980	
10	PT. Pasuruan Furnindo Inds	34/Kpts-II/01	13-2-2001	47.915	
11	PT. Bina Balantak Raya	293/Kpts-II/99	7-5-1999	81.500	46.738
12	PT. Palopo Timber	205/Kpts-II/99	14-4-1999	40.110	39.256
13	PT. Radar Utama Timber	294/Kpts-II/99	7-5-1999	45.000	
14	PT. Tri Tunggal Eboni	98/Kpts-II/00	22-12-2000	98.000	111.348

Sumber : Data dan Informasi Kehutanan Sulawesi Tengah, 2002

TABEL 11.		DAFTAR PERUSAHAAN HPHTI DI PROPINSI SULAWESI TENGAH				
No.	Nama HPHTI	SK HPHTI	Tanggal SK	Luas Areal	Realisasi Tanaman	Jenis Tanaman
1	PT. Kebun Sari	492/Menhut-IV/1998	13-4-1998	20.560		
2	PT. Timur Beverlindo	2086/Menhutbun-VI/1999	28-9-1999	49.500		
3	PT. Wanatani Lestari	721/Kpts-II/1996	11-11-1996	10.041	5.867,73	Krt
4	PT. Berkat Hutan Pusaka	146/Kpts-II/1996	4-4-1996	13.400	8.742	Bs, Pf

**Keterangan :** Krt = Karet, Bs = Balsa, Pf = Paraserianthes falcataria

Sumber : Data dan Informasi Kehutanan Sulawesi Tengah, 2002

Hak Pengelolaan Hutan (HPH) diberikan oleh pemerintah untuk perusahaan HPH diberikan untuk 35 tahun. 20 tahun pertama disebut sebagai Rotasi I. Setelah masa rotasi I lewat, kemudian dievaluasi. Jika baik dilanjutkan jika tidak dihentikan. Cara mengevaluasinya ada ukuran-ukurannya, dan cara penilaiannya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri<sup>61</sup>.

Setiap tahun Pemegang HPH harus membuat Rencana kerja Tahunan (RKT). RKT disusun dari Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL), sedangkan RKL disusun dari Rencana Kerja Pengusahaan Hutan (RKPH). RKPH dibuat untuk 20 tahunan.<sup>62</sup>

Jatah Penebangan Tahunan (JPT) dibuat berdasarkan RKT, dengan blok tebangan arealnya sekian hektar.

**Misalnya :**

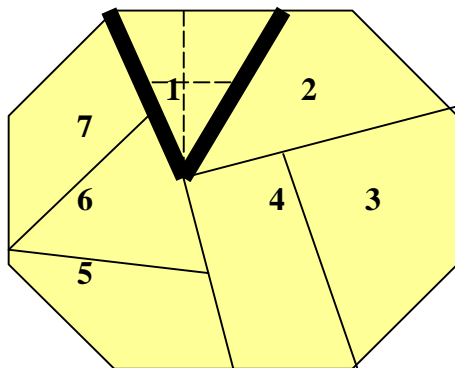
SK HPH : luasnya 70.000 ha.

JPT= 70.000 / 35th= 2.000 ha/ th.

2.000 ha /th inilah yang dikatakan sebagai blok tebangan

potensi ?  $35m^3/ha$ . Ini diambil dari 70.000 ha dibagi 2.000 ha =  $35 m^3$

**Gambar 1. Jatah Penebangan Hutan**



= RKL

= RKPH

= Batas Tebangan = RKT

Perusahaan hanya boleh menebang semua kayu yang ada di areal HPHnya, karena HPH tidak diberikan kepada perusahaan yang menebang hanya untuk satu jenis kayu atau kayu tertentu saja. Tetapi HPH diberikan untuk sebuah areal, perusahaan diperbolehkan menebang semua kayu yang ada di areal HPHnya. Masing-masing dari jenis kayu mempunyai nilai ekonomis yang berbeda, dan masing-masing dari jenis kayu tersebut ada pasarnya tersendiri.

<sup>61</sup> Pepi Saiful Djalal, Kasubbag Program, Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Propinsi Sulawesi Tengah, 27 Februari 2004.

<sup>62</sup> ibid



Batas pohon yang boleh dipotong harus dengan limit diameter (Ö): 60 cm untuk hutan produksi terbatas dan 50 cm untuk hutan produksi. Hutan Produksi Terbatas terdapat di wilayah atau yang daerahnya (*areal*) dengan tanah terjal.<sup>63</sup>

### C. Keadaan Penutupan Lahan

Pada kawasan Hutan Produksi, khususnya pada areal HPH yang masih aktif dan bekas areal HPH (Eks-HPH), telah dilakukan perhitungan kembali berdasarkan Data Citra Satelit Landsat Tahun 1997 s/d 2000. Perhitungan dilakukan 15 unit areal HPH aktif dan 2 unit eks HPH.<sup>64</sup> Diketahui khusus pada areal HPH di Sulawesi Tengah, keadaan penutupan hutannya adalah sebagai berikut :

TABEL 12. KEADAAN PENUTUPAN LAHAN PADA AREAL HPH				
Penutupan Lahan	Areal HPH (Ha)	%	Areal Eks HPH (Ha)	%
Luas areal yang ditafsir	1.410.688	100	169.625	100
Hutan Primer	720.191	51	42.420	25
Hutan Sekunder				
- Kondisi sedang-baik	272.382	19	67.273	40
- Kondisi rusak	418.115	30	60.032	35

Sumber: Pusat Data dan Pemetaan Tahun 2000

### D. Produksi Hasil Hutan<sup>65</sup>

Produksi hasil hutan di Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2, yaitu produksi kayu dan produksi non kayu.

#### D.1. Produksi Kayu

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, produksi kayu, kayu gergajian dan kayu lapis di propinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

<sup>63</sup> Pepi Saiful Djalal, *ibid*

<sup>64</sup> Data dan Informasi Kehutanan Sulawesi Tengah, *opcit*

<sup>65</sup> Data BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka, 2002

No.	Tahun	Produksi (m3)		
		Kayu Bulat	Gergajian	Kayu Lapis
1	96/97	458.396,62	15.138,91	0,00
2	97/98	774.970,74	3.656,44	0,00
3	98/99	184.338,47	6.455,63	0,00
4	99/00	316.867,18	6.989,21	0,00
5	2000	139.219,10	11.413,92	0,00
6	2001 (s/d Juli 2001)	58.318,15	0,00	0,00
7	2000 Nasional	13.798.240,05	3.020.864,27	3.711.097,26

Sumber : Data BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka, 2002

Pada tahun 2000, kayu bulat di Sulawesi Tengah menyumbang sebanyak 1,01% dari total kayu bulat nasional.

Jenis kayu yang ada di Sulawesi Tengah beragam jenisnya, antara lain, kayu bulat dan kayu olahan. Untuk jenis kayu bulat, ada berbagai jenis seperti: Kayu Meranti, Kayu Agathis, Kayu Jati, Kayu Hitam dan Kayu Indah.

No.	Jenis Kayu Bulat	Produksi			
		1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997
1.	Nyatoh	42.326,89	36.365,64	19.283,48	25.891,94
2.	Meranti	24.337,65	38.286,74	20.074,51	16.846,56
3.	Cempaka	18.402,00	13.098,18	0,00	11.186,24
4.	Agathis	9.602,73	10.742,36	4.272,73	7.025,87
5.	Matoa	14.345,85	11.756,87	4.269,32	6.521,04
6.	Palapi	6.481,29	4.246,58	6.736,54	10.056,89
7.	Dao	6.481,52	1.019,92	3.975,16	1.885,61
8.	Melur	779,37	917,73	103,39	751,37
9.	Rimba Campuran	121.764,97	144.032,58	94.763,88	102.974,81
<b>Jumlah</b>		<b>244.522,27</b>	<b>260.466,60</b>	<b>153.479,01</b>	<b>183.140,33</b>

Sumber : Data BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka, 2002

Sedangkan untuk jenis Kayu Olahan, jenisnya antara lain: Plywood, Kayu gergajian, Moulding, Kayu Hitam Gergajian serta Kayu Hitam Komponen.

Produksi kayu di Sulawesi Tengah belum pernah habis. Dari data BPS yang didapat, sejak Tahun 1998 hingga 2002, kayu terus diproduksi, walaupun jumlahnya semakin hari semakin berkurang. Produksi kayu bulat awal pada tahun 1998 sejumlah 250.443 m<sup>3</sup> per tahun, hingga sekarang tahun 2002 produksi kayu menurun menjadi 73.071,94 m<sup>3</sup> per tahun. Begitu juga dengan jenis kayu gergajian, tahun 1999 produksi tahunan adalah 198.421 m<sup>3</sup>, dan terus menurun hingga 44.977 m<sup>3</sup> per tahun.<sup>66</sup>

Berbeda dengan jenis kayu hitam atau ebony. Produksi kayu terus menurun dari tahun 1998 hingga 2002, produksi kayu hitam sudah tidak lagi diproduksi. Produksi kayu hitam berhenti sejak tahun 2001 dengan jumlah produksi 572 m<sup>3</sup> per tahun.<sup>67</sup>

Salah satu penyebab menurunnya jumlah produksi kayu di Sulawesi Tengah adalah maraknya *illegal logging*. Poso merupakan daerah yang selalu dicuri kayu-kayunya.<sup>68</sup>

No	Uraian	Tahun			
		2000	2001	2002	2003
1.	Lokasi	-Kab Toli-toli	-Kab. Donggala	Kab Donggala	-Kab. Donggala
	pencurian kayu	-Kab Poso	-Kab. Poso	-Kab Poso	-Kab Poso
			-Kota Palu	-Kab. Luwuk	-Kab. Luwuk
2	Volume Kayu yang Dicuri	820,15 m <sup>3</sup>	154,71 m <sup>3</sup>	10,41 m <sup>3</sup>	Dalam tahap
			dan 425 batang		konfirmasi
	• Kayu temuan	408,46 m <sup>3</sup>	152,38 m <sup>3</sup>	10,41 m <sup>3</sup>	
	- kayu olahan	308,46 m <sup>3</sup>	152,38 m <sup>3</sup>	10,41 m <sup>3</sup>	
	- kayu bulat	100,000 m <sup>3</sup>			
	• Kayu sitaan	411,69 m <sup>3</sup>	425 batang		
		dan 2,33 m <sup>3</sup>			
	- kayu olahan				
	- kayu bulat	411,69 m <sup>3</sup>	425 batang		
			dan 2,33 m <sup>3</sup>		
3	Jumlah kasus	3 kasus	6 kasus	1 kasus	1 kasus

Sumber : Kantor Dinas Kehutanan daerah Propinsi Sulawesi Tengah

<sup>66</sup> ibid

<sup>67</sup> ibid

<sup>68</sup> Data Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

## D.2. Produksi Non Kayu

Produksi non kayu adalah produksi hasil hutan selain dari kayu bulat, yaitu antara lain adalah Benang Sutera dan Madu.<sup>69</sup> Produksi Benang Sutera selama kurun waktu lima tahun sebesar 65,51 ton, dengan rincian berikut :

- Tahun 1998/1999 : 65,30ton
- Tahun 2000 : 0,21 ton<sup>70</sup>

Produksi madu hasil kegiatan perlebaran selama kurun waktu lima tahun sebanyak 252,64 ton dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 1996/1997 : 51,38ton
- Tahun 1997/1998 : 52,24ton
- Tahun 1998/1999 : 37,69ton
- Tahun 1999/2000 : 55,67ton
- Tahun 2000 : 55,67ton<sup>71</sup>

## 2. Kayu Hitam

### A. Penyebaran Kayu Hitam

Kayu hitam atau *Diospyros celebica Bakh* adalah jenis flora endemik Sulawesi. Kayu Hitam sering kali disebut juga dengan Eboni. Eboni dapat tumbuh pada iklim basah dan iklim bermusim pada berbagai tipe tanah mulai dari tanah kapur, tanah latosol sampai podsolik merah kuning. Syaratnya tanah itu cukup permeabel dan tak terlalu asam. Adapun soal tipe tanah, eboni dapat tumbuh pada berbagai tipe tanah yang penting tidak becek.<sup>72</sup> Dengan kata lain, kayu hitam hidup di daerah *Miskinhara* atau dapat dikatakan hidup di daerah yang kurang subur dimana daerah itu kurang zat-zat *Nitrogen, Kalsium, Fosfor, Kalium*. Pertumbuhannya lambat, tapi hal ini yang menjadikannya kuat dan padat. Kayu hitam mempunyai sifat (*produksi*): *Zero Waste* (tidak ada yang tersisa), serbuknya (*dash*) dapat diolah menjadi *kiln dry*: kilang pengering, maksudnya serbuknya dapat digunakan untuk pengeringan kayu-kayu lain yang tingkat kekeeringannya rendah (kayu basah)<sup>73</sup>, karena dalam export ada permintaan tingkatan kekeeringan. Semakin tinggi tingkat kekeeringan kayu dan semakin rendah kadar air dalam kayu hitam, maka semakin tinggi pula harga jual kayu hitam tersebut. Kayu Hitam baru bisa hitam jika sudah berumur 100 tahun, dan kualitas kayu hitam yang bagus jika kayu tersebut tumbang sendiri, karena jika kayu hitam ditebang dalam waktu yang kurang layak maka kayunya tidak hitam dan kualitas kayu masih rendah.

---

<sup>69</sup> Data BPS, Sulawesi Tengah dalam Angka, 2002

<sup>70</sup> ibid

<sup>71</sup> ibid

<sup>72</sup> Ir Akhbar Zain, MT, Ketua Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako (Untad). Wawancara dilakukan oleh Amran Amier, untuk artikel 'Maskot Sekarat di Tangan Penyeludup', MAL, Sulawesi Tengah.

<sup>73</sup> Pepi Saiful Djalal, opcit

Kayu hitam tersebar di pulau Sulawesi utamanya di Poso, Donggala, dan Parigi-Sulawesi Tengah. Kayu Hitam juga bisa ditemukan di Sulawesi Selatan, terutama di daerah Gowa, Maros, Barru, Sidrap, Mamuju dan Luwu. Sedang di Sulawesi Utara ada di daerah Gorontalo. Tapi, Sulawesi Tengahlah yang paling berpotensi tempat tumbuhnya Kayu Hitam. Di Sulawesi Tengah, Kayu hitam tersebar di wilayah Pantai Timur, mulai dari sungai Ula sampai dengan sungai Moutong-Kecamatan Mautong Kab Donggala. Selain itu dapat juga dijumpai di sepanjang pantai Timur. Kemudian dari sungai Mao sampai dengan sungai Puna di Kecamatan Poso kota pada kompleks hutan Kagila sampai dengan Sulewana, Uwekuli dan sekitarnya. Serta kompleks hutan Wawo pada kecamatan Lembo. Sedang di wilayah pantai barat mulai dari kompleks hutan Bangkir, Kecamatan Dondo sampai dengan hutan Tavaili, di kawasan Cagar Alam Pangi-Binangga dan kawasan hutan Parigi dan Sausu.<sup>74</sup>

Pada tahun 1970-an tegakan kayu hitam menempati hutan seluas 600.000 ha dengan tingkat kepadatan mencapai 2,5 meter kubik per ha. Setelah lebih dari 20 tahun jumlahnya kian menyusut. Eboni kini telah banyak mengalami gangguan akibat pencurian dan penebangan kayu secara liar oleh pihak tak bertanggungjawab. Kini tak ada data pasti berapa tegakan eboni yang tersisa. Yang jelas hutan Sulawesi Tengah itu luasnya 4,5 juta hektar dan Kayu Hitam hanya terdapat di Poso dan Donggala. Hutan seluas itu hanya dijaga oleh 250 Polisi Hutan (Polhut/Jagawana).<sup>75</sup>

Instansi terkait tak punya data berapa batang lagi kayu kayu hitam yang masih tegak di hutan Sulawesi Tengah, sedangkan jumlahnya tiap tahun semakin menurun. Karena itu pihak kehutanan sudah mengeluarkan pernyataan kalau kayu hitam terancam punah. Karena itu tumbuhan endemik ini mesti dijaga kelestariannya dengan tidak melakukan penebangan baru lagi. Sebagai dasar hukum pelarangan itu dikeluarkanlah Interuksi Menteri Kehutanan (Inmenhut) Nomor: 1295 Tahun 1995 yang melarang penebangan baru Kayu Hitam.<sup>76</sup>

Pemda Sulawesi Tengah juga kemudian melindungi sekitar 57 hektar, hutan kayu hitam di Maleali, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigimoutong. Tegakan kayu hitam di tempat itu 1.000 pohon. Menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus yang diambil dari Dana Reboisasi telah menurunkan proyek pemagaran lokasi itu. Untuk di kawasan kebun kopi, Kabupaten Donggala, Dinas Kehutanan juga kini telah menanam sekitar 50.000 hektar eboni. Umurnya saat ini sekitar 5 tahun lebih. Dari pihak Cagar Alam Pangi-Binangga pun saat ini sedang menjaga agar tegakan eboni bisa tumbuh dengan alami dan tidak dirambah.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Jafar G. Bua, Kayu Hitam di Ambang Sekarat, MAL, Sulawesi Tengah.

<sup>75</sup> Amran Amier, Maskot Sekarat di Tangan Penyeludup, MAL Sulawesi Tengah.

<sup>76</sup> Jafar G. Bua, opcit

<sup>77</sup> ibid

## B. Pasaran dan kualitas Kayu Hitam

Kayu Hitam yang merupakan *fancy woods* ini sangat digemari oleh semua lapisan, terutama untuk pasaran luar negeri. Untuk pasaran luar negeri, negara-negara yang banyak memesan kayu hitam antara lain Jepang, Hongkong, Italia, Eropa dan Malaysia. Masing-masing pasaran pun memiliki jenis kayu yang disukai. Penjualan kayu hitam di luar negeri menggunakan penghitungan dengan per kilo, berbeda dengan di Indonesia yang dihitung dengan per kubik (m<sup>3</sup>).<sup>78</sup>

Kayu yang populer dengan banyak sebutan, misalnya *fancy wood* ini, banyak diminati orang, baik di dalam maupun luar negeri. Karena itu, harganya tergolong tinggi untuk ukuran kayu alam. Untuk satu kubik harganya di pasaran gelap —biasanya di Malaysia, Jepang atau Cina—sekitar Rp 5-6 juta. Sedang harga patokan pemerintah cuma 3-4 juta.. Untuk penjualan kayu hitam harus dalam bentuk jadi, tidak bisa dalam bentuk gelondongan. Untuk tata niaga eboni ditetapkan hanya Perusahaan Daerah (PD) Sulteng yang berhak mengelolanya. Eboni juga harus didaftarkan pada CITES (Conservaci International Trade Endagered Species), dengan begitu eboni kian terlindungi.<sup>79</sup>

Jenis kayu hitam yang ada di Sulawesi Tengah bermacam-macam. Mulai dari jenis Gubal, yaitu jenis kayu hitam yang di dalamnya terdapat banyak kandungan warna merah. Jenis kayu Gubal ini terdiri dari 2 jenis yaitu jenis Temasa (*serat lurus dengan warna agak merah*) dan Memasa (*serat agak bengkok dengan warna agak merah*). Pasaran Hongkong sangat menyukai jenis ini. Selain itu ada pula jenis Batang Matches, yaitu jenis kayu hitam yang berwarna hitam dengan serat lurus dari ujung ke ujung. Jenis ini merupakan jenis kayu hitam yang paling banyak terdapat di Kabupaten Poso dan termasuk jenis kayu yang paling mahal dan banyak diminati orang-orang pada umumnya<sup>80</sup>.

Untuk jenis kelas kayu hitam, jenis S-1/S-2 merupakan satu istilah untuk jenis kayu dengan kelas bagus atau kelas tinggi. Jenis kayu kelas ini, banyak terdapat di Sulawesi Tengah yaitu di wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat. Wilayah Pantai Timur tersebut meliputi wilayah Tada, Toribulu, dan Sienjo. Sedangkan untuk wilayah Pantai Barat di wilayah Sipi, Sikara, Kecamatan Sindue; Batu Suyu, kecamatan Balaesang; Tambu, Kecamatan Sirenja; Pura.<sup>81</sup>

Pengolahan kayu hitam dilakukan di sawmill-sawmill besar di Sulawesi Tengah, yaitu di Palu. Sawmill besar itu antara lain Multi Ratu ebony, CV Yasa, dan PT Leang Yang. Sedangkan untuk kayu hitam yang sering dibuat souvenir adalah kayu hitam yang bahannya berasal dari kayu tebang lama dan kayu limbah yang merupakan kayu sisa.<sup>82</sup>

<sup>78</sup> Nathan, Ketua Koperasi masyarakat di Roronuncu, Wawancara di Ranonuncu, Poso, 15 Maret 2004.

<sup>79</sup> Amran Amier, opcit

<sup>80</sup> Ricardo, Wawancara mantan Pengusaha Kayu Hitam di Palu, Sulawesi Tengah, 2 Maret 2004.

<sup>81</sup> ibid

<sup>82</sup> ibid

Negara-negara pemesan Kayu hitam antara lain: Jepang (Batang Matches), Negara-negara Eropa seperti Italia (serat hijau), Malaysia, dan China/Hongkong (Gubal).<sup>83</sup>

### C. Pengelolaan Eks Kayu Hitam<sup>84</sup>

Sebelum Undang-undang Otonomi daerah ditetapkan, pengelolaan kayu hitam diserahkan kepada PT Inhutani II. Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah berhasil melobi Menteri Kehutanan agar pengelolaan Kayu Hitam juga diserahkan ke Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng). Inhutani II dan PD Sulteng menandatangani kontrak kerjasama pada pertengahan Agustus 1998. Belakangan hak pengelolaan sepenuhnya di tangan PD Sulteng, karena BUMN ini sudah dianggap bisa berdiri sendiri. Untuk memberi ruang gerak pada PD Sulteng, Gubernur Sulawesi Tengah kala itu, Banjela Paliudju menerbitkan Surat Keputusan tentang pelarangan ekspor kayu hitam jika kebutuhan industri daerah belum mencukupi.<sup>85</sup>

Upaya itu dilakukan dengan maksud mengisi kas PAD Sulteng yang memang masih rendah, selain untuk memanfaatkan bekas tebangan lama, daripada hanya habis dicuri dan diselundupkan. PD Sulteng tampaknya berhasil dengan mulai menyeter Rp 330 juta ke kas PAD. Pemerintah Daerah juga mendapatkan keuntungan dari Dana Reboisasi (DR) senilai Rp 1,8 juta per kubik. Walau UU Perpajakan dan retribusi yang baru belum final, Pemda Sulawesi Tengah sudah mulai menandai pos-pos PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah). Bahkan Pemerintah Kabupaten Tolitoli sudah menetapkan pemungutan pajak retribusi tersendiri.<sup>86</sup>

Dalam pengelolaan kayu hitam tebangan lama pemerintah daerah menetapkan ongkos penurunan kayu hitam dari gunung. Setiap orang yang memiliki kayu hitam wajib menurunkan ke tempat yang mudah dijangkau kendaraan. Kepada mereka yang memiliki kayu akan diberi biaya penurunan Rp 1,2 juta per meter kubik untuk klasifikasi C. Sedang klasifikasi B Rp 2,5 juta dan klasifikasi A lebih mahal lagi Rp 4 juta permeter kubik. Tahun 2000 PD Sulteng masih memiliki 512 meter kubik yang siap dipasarkan. Pengusaha lokal biasanya membeli kayu hitam lebih mahal dari pembelian PD Sulteng. Kayu hitam klasifikasi C, mereka berani membelinya seharga 3,5 juta dan mereka menjualnya ke Taiwan seharga 15 juta permeter kubik.<sup>87</sup>

Eksplorasi secara besar-besaran terhadap eboni terjadi antara tahun 1970-an hingga awal tahun 90-an. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya puluhan izin Hak Penguasaan Hutan, yang semuanya dikuasai kroni Soeharto. Tidak semua kayu hitam yang diangkut PD Sulteng adalah tebangan lama. Menurut Harley, Direktur Walhi Sulteng, malah tebangan baru akhir-akhir ini memonopoli kayu hitam yang diangkut PD Sulteng. Ada kecurigaan dan keraguan

<sup>83</sup> *ibid*

<sup>84</sup> **Jafar G. Bua**, Mengungkap Jalur Penyelundupan Sulawesi-Malaysia-Philipina, MAL, Sulawesi Tengah.

<sup>85</sup> **Jafar G. Bua**, Kayu Hitam di Ambang Sekarat, *opcit*

<sup>86</sup> **Jafar G. Bua**, Kayu Hitam di Ambang Sekarat, *opcit*

<sup>87</sup> *ibid*

kalau kayu hitam yang dikelola sekarang ini merupakan tebangan lama, karena Dinas Kehutanan Sulteng, sering kali menemukan kayu hitam yang bergetah.<sup>88</sup>

Kayu-kayu hitam yang belum dibawa ke sawmill atau diolah, banyak yang disimpan dengan cara ditimbun. Seperti pernah satu kasus seorang pengusaha mendapat masalah hukum kemudian kayu-kayunya ditimbun dalam tanah sampai hitungan bulan bahkan tahun. Hal tersebut dilakukan karena nilai kayu hitam yang tidak pernah turun harganya. Bahkan kayu hitam dianggap sebagai asset/investasi. Jika disimpan lebih lama tidak masalah, makin lama disimpan makin baik. Apalagi jika disimpan di dalam tanah warnanya makin hitam. Dari sisi harga juga tidak akan turun (harganya naik terus)<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> ibid

<sup>89</sup> **Ricardo**, opcit, memberikan keterangan ditempat penyimpanan kayu hitamnya disebuah lokasi perumahannya di Palu.



## Bab III

# Militer, Polisi dan Bisnisnya di Sulawesi Tengah

### A. Profil Militer dan Polisi di Sulawesi Tengah

#### 1. Militer dan Polisi di Sulawesi Tengah<sup>90</sup>

Di Sulawesi terdapat satu Komando Daerah Militer (Kodam) yang bernama Wirabuana. Pada tahun 1980-an Kodam yang bemarkas di Makassar ini berubah nama menjadi Kodam Hasanudin. Kodam Wirabuana/Hasanudin membawahi 4 Komando Resort Militer (Korem) yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Untuk Sulawesi Tengah terdapat satu satuan militer dibawah Kodam yaitu Komando Resort Militer, yang berada di jalan Jenderal Sudirman, Palu. Korem membawahi Komando Distrik Militer (Kodim). Di setiap kabupaten di Sulteng terdapat satu Kodim, kecuali kabupaten Morowali, Buol, Banggai Kepulauan dan Parigi-Moutong yang baru pada pertengahan 2002 dimekarkan. Tetapi yang jelas di setiap pembagian wilayah yang lebih kecil; kecamatan terdapat Komando Rayon Militer (Koramil). Pada level berikutnya, level paling bawah; kelurahan/desa, terdapat badan pembinaan desa (Babinsa).

Posisi TNI di setiap level di masyarakat selalu turut serta dalam Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah); sebuah lembaga yang dibuat untuk berkumpulnya para pimpinan pemerintahan, pimpinan penegak hukum dan institusi negara lainnya. Kedudukan militer di Sulteng pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan doktrin militer secara nasional; Doktrin Teritorial.

Selain itu, di Sulawesi Tengah terdapat dua Batalyon 711 Raksatama dan 714 Sintuwu Maroso. Keduanya membawahi 8 Kompi. Sampai saat ini telah beroperasi 5 kompi.

Untuk Kepolisian berbeda dengan TNI. Di Sulteng terdapat satu Kantor Polisi Daerah (Polda) yang pada tahun 1980-an masih disebut sebagai kantor Polisi Wilayah (Polwil). Di setiap kabupaten terdapat kantor Polisi Resort (Polres). Terdapat 3 Kompi Brigade Mobil (Brimob), 1 Sekolah Polisi Nasional (SPN) di Kabupaten Donggala.

<sup>90</sup> Usa, Aktifis HAM, Wawancara, Palu, 23 Maret 2004

## 2. Militer dan Polisi di Poso

Khusus untuk kabupaten Poso setelah konflik pecah, markas besar (Mabes) Polri di Jakarta mengeluarkan satu kebijakan dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi (Dankolaops). Saat konflik berlanjut di Poso melalui kebijakan Jakarta Operasi Militer digelar dengan berbagai sandi operasi, a.l : Operasi Sadar Maleo pada tahun 2000 dengan BKO (bawah kendali operasi) Polres Poso, satuan-satuan militer yang di BKO-kan pada operasi tersebut adalah batalyon 711 Raksatama Poso, 726 Makassar, 721 Palopo, Zeni Tempur (Zipur) Makassar dan Brimob Pare-pare, Brimob Makassar, Perintis dan Intel Polda Sulteng.<sup>91</sup>

Mobilisasi kekuatan militer kembali terjadi pada awal tahun 2001 dengan sandi Operasi Sintuwu Maroso I, tahun 2002 Sintuwu Maroso II, tahun 2003 Sintuwu Maroso III, dan pada pertengahan April 2004 Operasi Sintuwu Maroso di perpanjang lagi. Operasi sintuwu maroso ini mem-BKO-kan satuan militer dan Polisi, a.l: Brimob Papua, Brimob Kaltim, Brimob Kelapa dua Bogor, Brimob Jawa Tengah, Brimob Sulut, Brimob Kendari, Brimob Pare-Pere, Brimob Makassar, Brimob Pelopor dan Brimob Polda Sulteng. Selain itu satuan Perintis dari Manado, Makassar dan Sulawesi Tengah juga di BKO-kan pada operasi tersebut. Pada operasi sintuwu maroso I, II, III dan IV TNI yang di BKO-kan adalah Batalyon 711 Raksatama Sulteng, 712 Manado, 713 Gorontalo, 721 Palopo, Armed Makassar.<sup>92</sup>

Pasukan TNI maupun Polisi yang diBKO-kan pada operasi pemulihan di Poso ditempatkan di 142 Pos penjagaan mulai dari Desa Tumora (daerah perbatasan Poso dan Parimo dari arah Palu) sampai ke arah selatan, Desa Mayo (arah selatan Kabupaten Morowali menuju Makassar). Umumnya Pos Utamnya di tempatkan pada ruas jalan trans Sulawesi dan pos lainnya di perkampungan masyarakat.<sup>93</sup>

Data Jumlah Pasukan non Organik Polri dan TNI di Poso, Periode 2000-2004			
Tahun	Polri	TNI	Jumlah
2000	832	489	1.321
2001	1.172	852	2.024
2002	2.270	968	3.238
2003	3.096	1.668	4.764
2004	3.000	900	3.900

Sumber : Pemda Poso

<sup>91</sup> Usa, ibid

<sup>92</sup> ibid

<sup>93</sup> ibid

Milyaran rupiah sudah habis digunakan untuk operasi keamanan di Poso. Anggaran operasi ini tidak hanya dibebankan kepada institusi TNI dan Polri, tapi juga dibebankan ke Pemda Poso.

APBD Pemda Poso untuk biaya Operasi Pemulihan Keamanan:	
Tahun	Dana yang disalurkan (Rp)
2001	6.995.062.840
2002	624.800.000
2003	1.377.062.000
<b>Total</b>	<b>8.996.924.840</b>

Sumber : Pemda Poso

Pada tanggal 15 Oktober 2003, melalui Menkokesra, Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan bahwa dilaksanakannya operasi intelejen di wilayah Poso dan Sekitarnya lembaga-lembaga intelejen seperti BIN, Kopassus, BAIS dan Mabes Polri saat ini masih melakukan operasi intelejen dengan cara, salah satunya, melakukan penggalangan di masyarakat.<sup>94</sup>

Di Poso terdapat Kodim 1307 Poso. Salah satu anggotanya bernama Paulus Tungkanan berpangkat Sertu menjabat sebagai Intel Kodim 1307. Saat pecah konflik Poso Tungkanan telah pensiun. Namanya disebutkan dipersidangan Tibo, sebagai orang yang melakukan provokasi hingga kekerasan dan konflik meluas di Poso.<sup>95</sup> Pada 14 Mei 2004, Tungkanan bersama dua orang lainnya; Lam Tjau Wa dan Yunas Kancaro ditangkap oleh aparat Kepolisian dengan barang bukti menyimpan ratusan amunisi, senjata rakitan dan seragam Militer.<sup>96</sup> Tindakan Kepolisian dilakukan dalam upaya melakukan sweaping senjata di Poso. Sweaping senjata yang dilakukan kepolisian Resort Poso melibatkan 400 personel.

Pada awal kerusuhan ke II April 2000 di Poso, Angky Tungkanan (anak bungsu Tungkanan) terlibat dalam perkelahian dengan pemuda Dedy dari kelurahan Kayamanya. Akibat perkelahian tersebut pemuda-pemuda Kayamanya mendatangi kelurahan Lombogia mencari Angky dengan membawa senjata tajam seperti parang, pedang dan tombak. Pada tanggal 17 April 2000, didepan Gereja Pniel, Kelurahan Lombogia, Tungkanan berteriak memprovokasi massa yang tengah berhadap-hadapan (Lombogia-Kayamanya), Tungkanan mengaku telah dibacok oleh orang Kayamanya. Pada waktu itu listrik padam jadi hanya

<sup>94</sup> *ibid*

<sup>95</sup> Pendeta Damanik, Wawancara di Lembaga Pemasarakatan Palu, Palu, 17 Maret 2004.

<sup>96</sup> Jakarta Post, 15 Mei 2004

suara yang terdengar, akibat teriakan Tungkanan massa pada akhirnya saling serang. Ironisnya dari peristiwa di depan Gereja Pniel akhirnya Tungkanan ditokohkan oleh sebagian orang-orang Kristen.<sup>97</sup>

Tungkanan terlibat dalam beberapa penyerangan misalnya pada penyerangan Pandajaya. Seperti saat terdengar kabar bahwa desa Weleme, yang sebagian besar warganya beragama Kristen, diserang oleh desa Pandajaya, yang sebagian besar warganya muslim, Tungkanan datang ke Weleme dengan beberapa orang dari Tentena, dan kemudian menyerang pandajaya. Akan tetapi yang terjadi kemudian adalah warga Pandajaya menyerang balik ke Weleme. Pada saat itu Tungkanan sudah kabur ke Tentena. Hal yang aneh menurut orang-orang Weleme adalah orang-orang Pandajaya yang menyerang menggunakan sandi yang sama dengan yang digunakan oleh orang Weleme. Sandi yang digunakan oleh orang Weleme, merupakan sandi yang diajarkan oleh Tungkanan<sup>98</sup>.

Turunnya Fabianus Tibo (yang beragama Katolik) ke Poso kota saat konflik tahun 2000, karena mendengar isu bahwa sebuah sekolah Katolik di Poso Kota sudah dikepung. Isu tersebut juga datang dari Tungkanan.<sup>99</sup>

Aparat-aparat seperti intel-intel dari Mabes Polri, Kopassus yang ditugaskan di Poso biasanya lebih dahulu bertemu dengan Tungkanan. Bahkan sebelum rencana penangkapan Pdt. Rinaldy Damanik (2002) para intel-intel Mabes Polri tinggal di samping rumah Tungkanan dan mereka saling berkoordinasi. Diperkirakan walaupun Tungkanan sudah pensiunan tapi koordinasi ke TNI-nya masih aktif.<sup>100</sup>

Tungkanan saat ini tinggal di Tentena, menguasai kebun coklat di daerah Tonusa (dekat Tentena) milik warga muslim yang pergi mengungsi keluar dari Tentena karena konflik. Di daerah Tonusa banyak terdapat masyarakat beretnis Tator (Tanah Toraja), Etnis yang sama dengan Tungkanan. Maka dari itu ia dapat dengan aman masuk menguasai tanah kebun tersebut. Selain itu juga karena Tungkanan merupakan orang yang senang di-tua-kan. Dia merasa di-tua-kan di etnis Tator, maupun di wilayah Tentena.<sup>101</sup>

Di Tentena Tungkanan tinggal di kompleks GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah). Awalnya karena ia tergabung dalam kelompok pengungsi yang ditampung di kompleks GKST, makin lama pengungsi makin berkurang. Tetapi yang namanya Tungkanan tidak mau keluar dari kompleks tersebut. Karena ia merasa aman berlindung di Kompleks GKST.

---

<sup>97</sup> Ibid. Jemcy, Wawancara di Tentena, Poso, Maret 2004.

<sup>98</sup> **Pendeta Rinaldy Damanik**, Wawancara di Palu, Sulawesi Tengah, 17 Maret 2004.

<sup>99</sup> Usa, wawancara di palu

<sup>100</sup> Damanik, Ibid.

<sup>101</sup> Ibid. Jemcy, Wawancara di Tentena, Poso, Maret 2004.

## B. Bisnis Militer dan Polisi di Sulawesi Tengah

Sejarah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh militer sebenarnya telah dimulai sekitar tahun 1950-an. Sebelum kegiatan ekonomi mereka terorganisir, kegiatan mereka bersifat ilegal, salah satu contohnya adalah pengadaan barang-barang ilegal dengan penyelundupan. Banyak penyelundupan yang dilakukan oleh militer, tetapi tidak sedikit pula penyelundupan yang dilakukan pebisnis-pebisnis yang dibantu oleh aparat pemerintah atau pun aparat militer. Begitu juga dengan militer di Sulawesi Tengah dan Poso Khususnya.

Bentuk bisnis-bisnis yang dilakukan militer di Sulawesi Tengah berupa bisnis pengamanan, terutama makin marak sejak Konflik terjadi di Poso. Bisnis lainnya berupa pungutan yang dilakukan pos-pos Polisi maupun pos-pos TNI yang berada disepanjang trans Sulawesi terhadap truk-truk dan bus-bus umum.

Bisnis yang khas dengan karakter sumber daya alam Sulawesi Tengah (Poso) melibatkan militer (TNI/Polri) baik secara individual maupun institusional adalah bisnis kayu hitam. Bisnis kayu hitam yang dilakukan militer telah dilakukan sejak jauh sebelum konflik terjadi.

Klasifikasi bentuk bisnis militer pada penelitian ini, terbagi menjadi 2, yaitu :

### 1. Bisnis Institusi

Di Sulawesi Tengah terdapat 20 koperasi milik TNI dan Polri yang tersebar di 3 kabupaten dan 1 kotamadya. Dari 20 koperasi tersebut 4 koperasi Kepolisian terdapat di Palu. Enam lainnya merupakan milik TNI. Sedang di Poso terdapat 3 koperasi milik TNI dan 1 milik Kepolisian. Di Kabupaten Banggai terdapat 2 koperasi milik TNI dan 1 milik Kepolisian. Di kabupaten Toli-toli terdapat 3 koperasi milik TNI dan 1 milik Kepolisian.<sup>102</sup>

Di Sulawesi Tengah terdapat 1 koperasi veteran yang terdapat di Palu. Institusi-institusi bisnis militer yang terdapat, terutama di Palu dan Poso, tidak diketahui domain bisnisnya. Tetapi hasil pengamatan yang dilakukan disekitar kantor Korem atau disekitar kompleks Korem di jalan Sudirman Palu, banyak terdapat toko-toko souvenir yang terbuat dari kayu hitam.

### 2. Bisnis Non Institusi

Bisnis Non Institusi dibagi menjadi 2, yaitu :

#### a. *Bisnis sampingan militer*

Trend bisnis kayu hitam sudah mewabah sejak tahun 1960-an, paling tidak demikian yang dilakukan oleh Bien<sup>103</sup>. Pembelian kayu hitam dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, secara langsung dengan masyarakat setempat. Pembelian tersebut biasanya dilakukan disuatu

<sup>102</sup> Data Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah, 2002

<sup>103</sup> Bien, Wawancara mantan pengusaha kayu hitam, Palu, 25 Februari 2004.

TABEL 16		DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI ABRI (TNI) DAN KEPOLISIAN DI POSO PERIODE TAHUN 2002			
No	Nama Koperasi	Alamat		Badan Hukum Nomor	Tanggal
		Kel/Desa	Kec.		
1.	Primkoppad DIM 1307	Kasintuwu	Poso Kota	308/8H/KWK.19/IV/96	26-06-96
2.	Primkoppad 711	Kawua	Poso Kota	178/BH/PAD/KWK.	22-06-96
	Raksatama			19/IV/96	
3.	Primkoppol Resort Poso	Gebang Rejo	Poso Kota	411/BH/PAD/KWK.	17-06-96
				19/IX/96	
4	Puskoppad Poso				

Sumber : Data Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah (diolah)

tempat yang namanya TO (*Take Over*/Tempat Peng-Over-an).<sup>104</sup> Tempat ini cukup luas, hingga mampu menampung gelondongan-gelondongan kayu hitam. Tempat tersebut tidak diketahui punya siapa. Tapi jelas bahwa tempat tersebut digunakan oleh sejumlah masyarakat yang melakukan penebangan, untuk menampung hasil penebangannya. Keberadaan dan apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut diketahui oleh aparat desa.

Dua wilayah yang terkenal bisnis kayu hitam, dimana Pengusaha-pengusaha membeli kayu hitam sejak tahun 70-an adalah pantai barat dan di pantai timur. Di Sulawesi Tengah, kawasan Pantai Barat, kabupaten Donggala serta perairan Kabupaten Tolitoli adalah dua tempat strategis bagi penyelundupan, dan di kawasan itu, ribuan kubik kayu hitam diselundupkan. Mudah-mudahan terjadi kasus penyelundupan diakibatkan karena patroli laut dari Polairud (Polisi Air dan Udara) dari Polda Sulawesi Tengah yang terbatas, juga karena garis pantai Sulawesi Tengah yang panjang yang menyulitkan pengawasan,<sup>105</sup> serta keterlibatan (dibayar) Angkatan laut dan/ polisi air dalam penyelundupan.<sup>106</sup> Biasanya, karena harganya yang berlipat-lipat, kayu hitam kerap diselundupkan ke Malaysia (Tawau).

Para pengusaha kayu, dalam menjalankan kerja bisnis kayu hitam membekali dirinya dengan SAKO (Surat Angkut Kayu Olahan). SAKO di dapat dari Perhutani. Jangka waktunya 1 tahun. Yang mengeluarkan SAKO adalah Perhutani. Kadang SAKO tersebut diperjual-belikan. Termasuk diperjual belikan oleh si Pengusaha atau orang yang memiliki SAKO kepada orang lain yang membutuhkan ijin.

<sup>104</sup> **Kayaman**, Wawancara di Palu, 25 Februari 2004. Kayaman bekerja sebagai pemotong kayu (Chainsaw) di Tomoli, ia menceritakan tentang pengolahan kayu yang dimulai dengan dipotong-potong dan dibikin kotak. Proses pengolahan kayu dimulai dari lahan dimana terdapat kayu hitam, atau dari tempat dimana terdapat pohan kayu hitam (Agatis/ebony) tumbang kemudian diolah, lalu dibawa ke TO (Tempat peng-Over-an) kemudian di TO dibeli pedagang. Salah satu pedagang yang terkenal di Palu adalah Umar Landeng (PT. Gaya Cenderawasih).

<sup>105</sup> **Jafar G. Bua**, Mengungkap Jalur Penyelundupan Sulawesi-Malaysia-Philipina, *opcit*.

<sup>106</sup> **Bien**, *opcit*.

Meskipun pengusaha-pengusaha telah memiliki/komplit SAKO, tetap diberhentikan dan dimintai uang oleh aparat di hampir setiap pos. Jika tidak diberikan “setoran” kayu akan disita dan dibawa ke Polda, lalu di-*over* ke Departemen Kehutanan Kabupaten dan dilelang “Untuk Negara”. Dalam kenyataannya kayu-kayu yang disita tersebut dijual ke perusahaan atau pengusaha asing, salah satunya ke PT *Leang Yang*.<sup>107</sup>

Kadang dalam penangkapan, pelaku/pembawa kayu hitam tidak ditangkap, tetapi dibuat perjanjian bahwa jika telah laku dijual uangnya dibagi dua (50 % : 50 %). Kendaraan angkutan yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu cukup beragam dan cukup kreatif; mulai dari *Ambulance*, mobil penumpang, sampai mobil pribadi. Tujuannya agar tidak diberhentikan dan tidak disita. Cara lain agar tidak diberhentikan adalah dengan menggunakan kendaraan milik Korem/Danrem.<sup>108</sup>

Cara membawa kayu hitam; kayu hitam ditaruh dibagian tengah, bagian luar/depannya dibungkus dengan kayu lain/kayu kelas dua. Pengawasan biasanya dilakukan oleh Brimob atau POM. Salah satu aparat yang pernah terlibat adalah Wakoramil di Tombo. Di level atas tingkat propinsi, dahulu kala disaat kayu hitam sedang marak, gubernur Sulawesi Tengah terlibat dalam bisnis hitam kayu abu-abu....oh maaf maksudnya bisnis abu-abu kayu hitam.<sup>109</sup>

Wajah lain keterlibatan TNI dan Kepolisian nampak dalam fenomena tokoh bisnis kayu hitam yang sangat dikenal di Sulawesi Tengah, bernama Umar Landeng. Umar landeng merupakan nama yang berasal dari dua orang; Umar, seorang keturunan Arab dan Landeng keturunan Bugis. Keduanya merupakan pengusaha/pedagang kayu hitam yang terkenal dan saling bekerja sama. Kolaborasi mereka dinamakan “Umar Landeng”. Kenapa sampai “Umar Landeng” mengacu pada satu orang? Karena dalam waktu berjalan, ternyata yang sukses: kaya, memiliki *backing* kuat dari aparat militer-sipil adalah si Umar, tokoh yang berjiwa sosial (membantu *kiri-kanan*), dan cukup terkenal di masyarakat kelas menengah di Palu.<sup>110</sup>

Umar landeng terkenal dengan gaya kerja yang konvensional dan “Koboi”. Konvensional (Arab; *Walaiti*); karena ia sendiri yang langsung mengambil kayu dari lapangan, berangkat kelapangan dan atau membawa pulang kayu, pada jam berapa pun ke Palu. Siapapun yang mempunyai kayu asal bilang ke Umar pasti akan diambil, contoh X: “*pak kayu nih*”, umar cukup mengatakan : “*ikut !*” maksudnya ikut diiring-iringan truknya ke Palu. Umar

<sup>107</sup> PT Leang Yang, merupakan salah satu sawmill besar di Palu, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini sering menerima/ menampung kayu hitam ilegal. Baik yang dibawa langsung oleh pebisnis kayu hitam maupun yang dijual oleh aparat kepolisian hasil sitaan dari penangkapan terhadap pebisnis ilegal kayu hitam.

<sup>108</sup> *ibid.* Bien berhenti melakukan kerja kayu hitam pada tahun 1990-an. Terakhir yang banyak mengerjakan adalah istrinya. Alasan berhenti karena sudah mulai sering “ditangkap” dan selalu dimintai uang. Selain itu juga karena ia sudah tua.

<sup>109</sup> Bien, *Op.cit*

<sup>110</sup> Bien, *Op.cit*



melakukan sendiri transaksi. Sementara dikatakan “*Koboi*”; Tidak berhenti di pos-pos aparat. Karena ia terkenal dengan kedekatannya dengan aparat militer, terutama polisi dan juga gubernur (sebagian nara sumber mengatakan ia dekat dengan gubernur saat dijabat oleh Azis Lamajido). Bahkan dia terkenal sebagai orang yang bisa memindahkan Kapolres/Kapolsek di Sulteng. Jadi bukan hanya di *Back up* oleh semua aparat (TNI/Polri).<sup>111</sup>

Umar juga mau membantu orang lain yang melakukan kerja yang sama. Jadi jika ada orang tertangkap polisi, Umar mau membebaskan, bahkan kadang mau memindahkan si polisi tersebut ketempat lainnya.

Di Palu banyak terdapat “pemain” kayu hitam. Dari mulai individu makelar, individu yang mengambil di pantai timur (Tomini) lalu dibawa ke Palu. Di Palu juga banyak terdapat perusahaan sawmill (pengolahan), ada perusahaan pengolahan menjadi barang jadi (kursi, perhiasan, souvenir, dll) untuk selanjutnya dikirim ke tempat lain seperti Bali. Terdapat pula perusahaan nasional/asing yang membeli kayu. Sawmill besar yang terdapat di Palu, diantaranya:<sup>112</sup> Multi Ratu Ebony, CV. Yalsa, PT *Leang Yang*.

Kabupaten Poso juga merupakan salah satu daerah rawan pengangkutan kayu ilegal yang berasal dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Bahkan di saat konflik/paska konflik, bisnis kayu hitam tetap dilakukan oleh militer (TNI dan Polri). Kesatuan-kesatuan yang pernah *menggarap* adalah TNI, diantaranya; Yonif 711 Reksatama, 712 Manado, Yonif 721 Palopo untuk dibawah kedaerahnya masing-masing.<sup>113</sup> Bahkan intensitasnya lebih sering. Dengan cara membawa Truk langsung ke hutan untuk kemudian dibawa ke bengkel pengolahan/sawmil. Salah satu sumber mengatakan Saat konflik sedang panas-panasnya, salah satu bengkel kayu yang berada di jalan Irian, Poso, menerima drop kayu dari mobil-mobil TNI yang membawa kayu<sup>114</sup>. Hal ini masih terus terjadi.

Sampai saat ini masih banyak kesatuan dari TNI/Polri yang meminta kepada beberapa orang yang dianggap mampu untuk mencari kayu Hitam, seperti TNI 711 Palu, 726 Makasar, Brimob Makasar, Brimob Pare-pare, Brimob Polda Sulawesi Tengah. Lain lagi dengan gaya Armed yang suka langsung ke hutan, membawa mobil/truk, lalu cari orang di sekitar lokasi yang bisa menebang/mengambil kayu hitam. Bahkan dilakukan dengan cukup terbuka. Salah satu Isi SMS di Radar Sulteng mengatakan :

*untuk Dandim Poso, untuk kesekian kalinya tolong dihentikan/ditertibkan truk-truk TNI yang lagi marak mengangkut dan sebagai pemasok kayu-kayu ilegal di Kabupaten Poso atau apakah bapak sebagai bekingnya?<sup>115</sup>*

---

<sup>111</sup> **Bien**, *Op.cit*

<sup>112</sup> **Ricardo dan Bien**, *opcit*

<sup>113</sup> **Vopane**, Wawancara di Desa Tokorondo, Poso, 8 Maret 2004.

<sup>114</sup> **Pomas**, Wawancara Aktifis Kemanusiaan, warga Poso tinggal di jalan Irian, Poso, 12 Maret 2004.

<sup>115</sup> Dari : 08134100xxx, kolom SMS Peduli, Halaman 6, Judul : Halo Pak Dandim Poso, Di Radar Sulteng, Jum'at 12 Maret 2004.



Permintaan mencari kayu hitam oleh aparat TNI atau Polri biasanya untuk dibuat hiasan atau souvenir. Kayu-kayu hitam tersebut dibawa ke pengolahan di Palu atau di Poso. Baru kemudian dibawa untuk dijual. Beberapa pekerja di Tokorondo yang mampu melakukan order tersebut mengambil kayu hitam di bekas lahan Gulat. Hal ini karena memang semua lahan di Tokorondo (bekas) lahannya Gulat.

Penyelundupan sampai saat ini pun tetap marak. Penyelundupan tersebut dilakukan dalam bentuk sudah jadi barang/souvenir. Tetapi tetap mengandung resiko tinggi (ditangkap aparat) jika tidak punya *backing*. Maka dari itu bengkel-bengkel pengolahan kayu hitam masih tetap ada terutama di sekitar Poso Kota, Lembomawo dan Roronuncu. Tetapi bengkel-bengkel tersebut tidak mengirim atau menjual ke orang diluar daerah. Mereka hanya membuat ke dalam bentuk souvenir kecil-kecilan (gantungan kunci, bingkai kecil, papan nama). Souvenir atau perabot bentuk besar (kursi, meja)<sup>116</sup> biasanya merupakan pesanan dari anggota TNI atau Polri.

#### ***b. Bisnis swasta (dikelola oleh orang atau pensiunan militer)***

Pada dasarnya bisnis yang mewabah untuk dilakukan di Sulteng adalah Kayu hitam. Hanya cara atau bentuk pengelolaannya yang berbeda sesuai dengan gaya dan kemampuan si pelaku bisnis. Posisi militer (TNI/Polri), melalui individu-individu, tidak hanya sebagai “*watch dog*” untuk kemudian mengambil keuntungan (memeras). Di Sulteng sejak tahun 1970-an sudah terdapat individu militer yang menjadi pelaku bisnis utama. PT Gulat sebagai contohnya. Maka posisinya bukan lagi sebagai pengambil keuntungan dari trend bisnis yang ada. Militer melalui individu atau kelompok individu militer, seperti Pensiunan, melakukan bisnis secara profesional.

Penelitian ini mengambil PT. Gulat (Gunung Latimojong) sebagai studi kasus, dimana direktur dari perusahaan ini adalah seorang individu berasal dari militer yang kemudian melakukan bisnis kayu hitam di Sulawesi Tengah.

### **C. Dampak Bisnis Militer dan Polisi di Sulawesi Tengah**

Dampak dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh militer di Sulawesi Tengah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat Sulawesi tengah, lebih spesifik lagi adalah masyarakat disekitar wilayah kegiatan bisnis militer dilakukan. Dampak dari bisnis militer bisa berbentuk langsung maupun tidak langsung.

Sebelum membahas dampak langsung terlebih dahulu dikemukakan dampak yang tidak langsungnya. Dampak tidak langsung dari kegiatan militer tersebut berupa budaya korup dikalangan masyarakat di Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan pihak keamanan terutama kepolisian yang mau dan mudah melakukan pem-*backing*-an terhadap siapapun yang

<sup>116</sup> Lihat lampiran surat pribadi antar anggota TNI; Lettu Inf. Samsul dangan Lettu Inf. Arianto

mampu membayar untuk *mengamankan* bisnis ilegalnya. Ongkos untuk membayar pihak keamanan juga merupakan beban/berpengaruh terhadap harga jual oleh karena itu banyak kalangan pebisnis kayu hitam ilegal yang mulai mengakali biaya pengamanan tersebut. Hingga banyak bermunculan cara untuk mengelabui pihak keamanan, dari mulai menggunakan truk militer (kepolisian atau TNI) sampai menggunakan mobil pribadi bahkan mobil Ambulance.

Kesimpulannya adalah semua berusaha mengambil keuntungan dari kegiatan apapun dengan tujuan akhir adalah mendapatkan uang. Pihak keamanan, disetiap kesempatan dengan segala cara, sebisa mungkin mendapatkan uang (upeti) dari kendaraan-kendaraan yang membawa kayu hitam. Sedangkan masyarakat yang melakukan bisnis ilegal kayu hitam, sebisa mungkin menghindar dari pemeriksaan-pemeriksaan aparat keamanan, yang ujung-ujungnya meminta uang.

Selain budaya korup yang terbangun dikalangan masyarakat, dampak tidak langsung lainnya adalah hilangnya kesadaran tentang keseimbangan lingkungan dan pembudidayaan kayu hitam. Jika pemetongan kayu hitam sudah dimulai sejak 1960, maka akibatnya bisa dilihat saat ini, dimana sudah hampir habis pohon-pohon kayu hitam di Sulawesi tengah. Hilangnya pohon tersebut dari tengah hutan akan mempengaruhi ketahanan lingkungan di Sulawesi Tengah.

Konsumsi terhadap kayu hitam hanya dipandang dari sudut ekonomis semata. Jikalau memang tujuan ekonomis menjadi tujuan umum yang disepakati oleh masyarakat di Sulawesi tengah, hal inipun masih harus diuji lebih jauh. Tetapi yang jelas dan menjadi fakta adalah pengolahan kayu hitam, diluar perdebatan apakah diperbolehkan atau tidak, hanya menjadi kegiatan bisnis orang-orang tertentu saja (baca: orang-orang yang mampu bermain mata dengan aparat keamanan). Dan hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang yang mampu masuk dan ikut main dalam sistem yang korup. Maka masyarakat umum justru tidak mendapatkan kebaikan dari pengolahan kayu hitam.

Sedangkan dampak yang langsung terhadap masyarakat adalah tindakan-tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat ketika proses bisnis tersebut dilakukan. Berbisnis kayu hitam merupakan tema kerjaan yang cukup sensitif, Ricardo mengatakan salah-salah bertanya mengenai kayu hitam, bisa dipukuli, sebagaimana yang pernah ia alami; Ricardo pernah ditendang oleh aparat. Dia bilang,

*"saya sudah pernah dimakan sepatu lars petugas gara-gara kerja kayu hitam".*

## Bab IV

# PT. Gunung Latimojong (Gulat): Sebuah Studi Kasus

### 1. Sejarah Pendirian

Gulat merupakan singkatan dari Gunung Latimojong, yang merujuk pada nama jalan di Makasar, Sulawesi Selatan.<sup>117</sup> Di jalan ini PT Gulat pertama beroperasi pada tahun 1968. Pada tahun 1968, sebelum menjadi Perseroan Terbatas (PT) Gunung Latimojong, pada tahun 1968 masih berbentuk Yayasan Gunung Latimojong yang menampung para bekas pejuang-pejuang 1945 yang berkantor di Makassar, Sulawesi Selatan. Gulat berdiri pada 1968 Berdasarkan Akte Notaris M.G. Ohorella, Ujung Pandang, No 58 tanggal 22 Juni 1968<sup>118</sup> berbentuk badan hukum Yayasan.<sup>119</sup> Para pendirinya yaitu Abdul Muim Sandewang, yang menguasai 10 saham (25 %), Ny. C.A. Sandewang yang menguasai 5 saham (12,5 %), Sandra D.A.S menguasai 5 saham (12,5 %), Freddy Frits K menguasai 10 saham (25 %), Teuku Gede Hasan menguasai 5 saham (12,5 %) dan Syamsul Nasution menguasai 5 saham (12,5 %).

Perubahan komposisi saham pertama kali terjadi, dari 6 orang pemilik lama, menjadi hanya 3 orang, yaitu AM Sandewang, Ny. C.A. Sandewang dan Sandra D.A.S. Mutasi I dilakukan berdasarkan Akte Notaris Sitzke Limowa, Ujung Pandang, No 99 tanggal 27 September 1978. dalam akte tersebut disebut komposisi pemegang saham, AM Sandewang menguasai 700 saham (50 %), Ny. C.A. Sandewang menguasai 350 saham (25 %) dan Sandra D.A.S menguasai 350 saham (25 %).<sup>120</sup>

Perubahan komposisi saham untuk kedua kalinya terjadi melalui akte notaris Mr. Teng Tjing Leng, nomor 42, tanggal 11 September 1988. Perubahan komposisi yang kedua hanya menambahkan PT Radar Utama Timber sebagai salah satu pemegang saham. Perubahan komposisi yang ketiga ini mempengaruhi komposisi saham; AM Sandewang menguasai

<sup>117</sup> Vopane, *opcit*

<sup>118</sup> Lampiran 4a. Mutasi Pemilikan Saham PT. Gunung Latimojong, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan HPH Gulat Group, PT Gunung Latimojong, PT Radar Utama Timber, Ujung Pandang, Oktober, 1991

<sup>119</sup> Buku Induk UU No 7/1981 Tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan Pasal 7 ayat 1, Depnakertrans Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

<sup>120</sup> Lampiran 4a. Mutasi Pemilikan Saham PT. Gunung Latimojong, *opcit*

580 saham (41,4 %), Ny. C.A.Sandewang menguasai 270 saham (19,3 %) dan Sandra D.A.S menguasai 270 saham (19,3 %). Serta Radar Utama Timber menguasai 280 saham (20 %).<sup>121</sup>

Pada perubahan yang keempat, yang dilakukan di Notaris Raharti Sudjarjati melalui akte nomor 29, 6 Juli 1990, komposisi pemegang saham menjadi AM Sandewang yang menguasai 3857 saham (71,4 %) dan Sandra DAS yang menguasai 1543 saham (28,6 %).<sup>122</sup>

PT Radar Utama Timber (RUT) merupakan perusahaan di luar Gulat Group. Pemegang saham PT. RUT adalah Drs. Sarwono Wirosoeryo, Treesye N Rari Astuti, Sayogo Hendro Soebroto dan Siti Soemino. PT RUT didirikan pada 27 November 1975 berdasarkan Akte Pendirian No 34 Notaris Hobro Purwanto, Jakarta.

Pada 14 Desember 1977 melalui Akte Notaris No 37, pada kantor Notaris Eliza Pondaag, saham PT RUT pindah ke AM Sandewang dan Sandra DAS. Sandewang menguasai 3000 saham (85,75 %) dan Sandra DAS menguasai 500 saham (14,25 %).<sup>123</sup>

Saat mendirikan Yayasan Gulat, AM Sandewang masih berstatus sebagai anggota TNI Angkatan Darat di Komando Daerah Militer (Kodam) Hassanuddin (saat ini telah diganti menjadi Kodam Wirabuana). Bahkan Sebagai pemimpin PT. Gulat (sampai pada pertengahan tahun 1980-an), Muin Sandewang masih aktif sebagai anggota TNI di Kodam Hasanudin dengan jabatan Wakil Asisten Intel. Pada saat Sandewang masih aktif di TNI, jabatan Pangdam Hasanudin adalah Solihin GP.<sup>124</sup>

Sandewang dikenal dekat dengan sejumlah pejabat Negara (baik militer maupun sipil), seperti; Emil Salim, Kepala Rumah Tangga Istana Negara (orang Tator, tidak diketahui namanya), Sudomo, Askary, Kemal Idris (yang kemudian menggantikan Askary) dengan jabatan Komando Operasi Wilayah Indonesia Timur (Koondait). Bahkan saat Sandewang mendapatkan masalah, pejabat yang terlebih dahulu membelanya adalah Sudomo. Sawmill PT. Gulat di Makassar juga diresmikan oleh Sudomo. (lihat Foto Gulat Makasar). Sandewang juga dekat dengan M Yusuf. Sekitar tahun 1980 (pertengahan) Muin Sandewang meminta untuk pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Setelah pensiun Muin Sandewang Diangkat oleh Kemal Idris sebagai Asisten Pribadi (Aspri).<sup>125</sup>

Sejarah masuknya Gulat ke Tokorondo adalah ketika Sandewang yang mendapat informasi dari *Lago*<sup>126</sup> -nya bernama Hasan Ombansi, merupakan pegawai kehutanan, yang memberitahukan bahwa di Poso banyak terdapat kayu. Walhasil, Sandewang langsung melakukan survey ke wilayah Poso (Tokorondo). Survey pada 1975 dilakukan PT Gulat

---

<sup>121</sup> *ibid*

<sup>122</sup> *ibid*

<sup>123</sup> Lampiran 4. Mutasi Pemilikan Saham PT. Gunung Latimojong, opcit

<sup>124</sup> **Mistu**, wawancara di Desa Tokorondo, Poso, 11 Maret 2004.

<sup>125</sup> **ide**, Wawancara di Desa Tokoronodo, Poso, 9 Maret 2004.

<sup>126</sup> Pasangan hidupnya bersaudara dengan pasangan hidupnya si Lago, contoh : istri Sandewang bersaudara dengan istrinys si Hasan Ombansi

melalui orang Jepang bernama Matsumoto, seorang ahli kayu (juga merupakan pembeli)–sekarang ia tinggal di Ujung Pandang. Matsumoto, setelah survey, mengatakan bahwa di Poso terutama di Tokorondo terdapat kualitas kayu-kayu yang bagus.

Baru kemudian pada 1976 PT Gulat membuka usahanya di Tokorondo. Sementara tempat lamanya di desa Lepa-Lepa Kecamatan Burau Palopo Utara tetap berjalan. Yang meresmikan Sawmill di Tokorondo pada 1976 adalah Leo Loupolissa, orang Ambon, yang pada waktu itu sebagai Panglima Armada Timur.

## 2. Wilayah Kerja PT Gulat

Sebelum Gulat beroperasi di Tokorondo telah ada beberapa Perusahaan/pengusaha yang beroperasi di Tokorondo seperti Abdul Hadad –TRIUM, PT Rasli– Sindo, Jaya Sentosa – Andreas Liem/Babah Liem (Cina Makasar), Bekawaweang –Sakir Samudi.<sup>127</sup> Baru pada tahun 1976 Gulat resmi mulai beroperasi di Tokorondo, saat Gulat masuk di Tokorondo, bupati di Poso adalah Ghalib Lasahido. Areal HPH PT Gulat terletak pada kelompok hutan sungai Kameasi dan sungai Mentako dengan luas areal 40.000 Ha. Jika direntan secara kewilayahan HPH Gulat meliputi Tambarana hingga Sausu. Menurut pembagian wilayah administrasi pemerintahan masuk dalam Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

Jenis tanaman yang terdapat di dalam areal hak pengusahaan hutan PT Gulat didominir oleh jenis-jenis kayu seperti Meranti putih, Palapi, Ebony, Nyatoh, Medang, Dll.<sup>128</sup> Pada awalnya Gulat tidak langsung mengeksploitasi kayu hitam. Baru pada tahun 1977 ketika masyarakat yang menawarkan dan membawa kayu hitam ke Gulat. Sementara Gulat mulai melakukan sendiri pengambilan kayu hitam sejak tahun 1980-an. Karena sangat seriusnya pada tahun 1980, Gulat mengirim seorang pegawainya: Ide untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menjadi *grader*, di Ambon. Sedangkan Jenis2 dari kayu hitam yang terdapat di Poso adalah Batang Matches, Bendera, dan Hitam Pekat.<sup>129</sup>

Areal Gulat berbatasan dengan PT Tritunggal Ebony disebelah selatan, sepanjang 32,51 km; PT Radar Utama Timber, sebelah Utara, 68,15 km<sup>130</sup>; Pegunungan, sebelah barat; Teluk Tomini, sebelah Timur. Jatah tebangan tahunan Gulat adalah; maksimum 32.000 m3/tahun dan minimum 20.000 m3/tahun.<sup>131</sup>

<sup>127</sup> Taha, Wawancara Mantan Kepala Desa Tokorondo (1966 – 1970), Kepala Bagian perakitan kayu PT Gulat, 8 Maret 2004.

<sup>128</sup> Laporan Pelaksanaan Pengelolaan HPH Gulat Group, PT Gunung Latimojong, PT Radar Utama Timber, Ujung Pandang, Oktober, 1991. hal 1

<sup>129</sup> Ide, opcit

<sup>130</sup> Laporan Pelaksanaan Pengelolaan HPH Gulat Group, PT Gunung Latimojong, PT Radar Utama Timber, Ujung Pandang, Oktober, 1991. hal 2

<sup>131</sup> Laporan Pelaksanaan Pengelolaan HPH Gulat Group, PT Gunung Latimojong, PT Radar Utama Timber, Ujung Pandang, Oktober, 1991. hal 4

Saat masuk ke Tokorondo, Gulat melakukan pembelian tanah dengan cara hanya membeli pohon yang ada di atas tanah yang akan dibuat tempat usaha. Sekali lagi, Bukan membeli tanahnya.<sup>132</sup> Disadari bahwa masyarakat sendiri saat Gulat masuk Tokorondo tidak memiliki surat tanah. Masyarakat hanya memiliki tanah-tanah tersebut secara turun temurun. Dengan kata lain tanah-tanah tersebut merupakan tanah adat. Sedang yang menjadi sumber penghasilan dari tanah tersebut adalah pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah-tanah tersebut. Sehingga ketika tanah-tanah tersebut dibutuhkan Gulat, masyarakat hanya merasa perlu ada penggantian atas pohon-pohon yang telah ada di atasnya.

Pembelian tanah oleh Gulat dari masyarakat tidak dengan syarat-syarat pembelian tanah yang wajar. Sebagian masyarakat yang telah menjual tidak pernah mendapat surat jual-beli tanah. Setelah mendudukinya, Gulat meng-klaim tanah-tanah tersebut berdasarkan ijin usaha HPH-nya. Dimana dalam HPH disebutkan lokasi usaha. Selain itu bisa dilihat dari laporan pelaksana pengelolaan Hak pengusahaan Hutan (HPH), 1991. Bandingkan dengan surat Berita acara Penitipan hasil Temuan di Areal Eks. Gulat (lampiran) bahwa tidak terdapat satu sertifikat pun yang menerangkan bahwa tanah-tanah di Tokorondo merupakan tanah yang sah milik Gulat.<sup>133</sup> Menurut BPN ganti rugi tanah maupun benda-benda lain di atas tanah, seperti yang dilakukan oleh Gulat terhadap sejumlah pemilik pohon di atas tanah yang akan dijadikan tempat usaha, harus melalui panitia ganti rugi pembebasan tanah yang terdiri dari BPN (tingkat kabupaten), dinas Pertanian jika berkaitan dengan pohon yang ada di atas tanah, dan dinas Pekerjaan Umum jika berkaitan dengan bangunan yang ada di atas tanah tersebut.

Saat Gulat masuk ke Tokorondo, sudah terdapat dermaga di pinggir pantai Tokorondo. Sehingga untuk soal dermaga, Gulat tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Gulat hanya melakukan perbaikan dan perluasan.<sup>134</sup> Harus diakui pula bahwa Lokasi desa Tokorondo yang strategis diantara lautan dan pegunungan mengakibatkan lajunya usaha Gulat di Tokorondo. Di desa Tokorondo sudah terdapat dermaga (akses langsung ke laut), dari Tokorondo ke hutan (areal HPH) hanya membutuhkan jarak 7-10 kilometer. Maka dari itu Gulat membuat jaringan kerja yang “rapat dan padat”; sawmill, kantor, hutan dan dermaga hanya dalam suatu lokasi berdekatan (*lihat denah PT Gulat ditengah Tokorondo*).<sup>135</sup>

Selain itu di Tokorondo terdapat sebuah rumah untuk jajaran manajemen Gulat yang posisinya strategis; berada tepat dipinggir jalan trans Sulawesi, membelakangi hutan dan akses pemandangannya ke arah dermaga dan laut. (*lihat denah view petinggi Gulat*).

---

<sup>132</sup> Taha, *opcit*, FGD, 14 Maret 2004,

<sup>133</sup> Mistu, *opcit*

<sup>134</sup> Taha, *opcit*, yang memperbaiki Dermaga tersebut.

<sup>135</sup> *ibid*

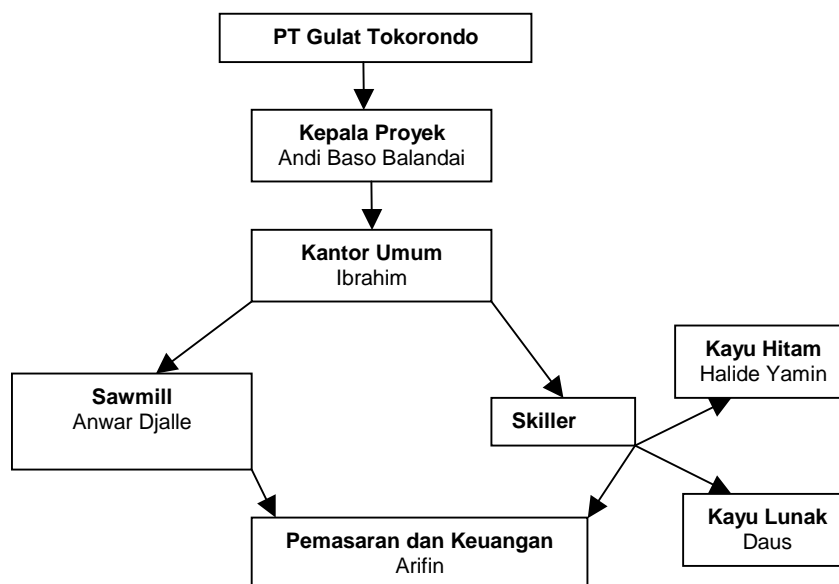
Memasuki tahap I atas pemberian HPHnya (20 tahun); 1996-1997, PT Gulat mendapatkan pilihan untuk memperpanjang ijin usaha atau mendapatkan HPH baru di wilayah lain. Pada putusan akhir Gulat lebih memilih HPH baru di Gorontalo, walaupun masih ada kayu di Tokorondo tetapi mereka tidak bisa memilih keduanya. Konsekwensi dari pilihan tersebut Gulat di Tokorondo ditutup karena tidak diberikan perpanjangan ijin.

Saat ini di hutan bekas HPH Gulat yang tersisa hanya bekas-bekas potongannya (lihat di Foto). Masih ada beberapa pohon Ebony, tapi masih kecil dan belum hitam, belum layak dipotong. Saat ini lahan-lahan kayu hitam bekas gulat ditanami coklat dan dikelola oleh masyarakat<sup>136</sup>. Sampai saat ini lahan-lahannya Gulat telah ditanami coklat oleh masyarakat. Oleh karena agak jarang dan susah di dapat kayu hitam. Kondisi populasi kayu hitam saat ini memang sudah habis, terlebih-lebih di wilayah HPH Gulat<sup>137</sup>.

## Cara Kerja PT Gulat

### a. Struktur<sup>138</sup> dan Tahapan Kerja<sup>139</sup>

#### STRUKTUR OPERASIONAL GULAT TOKORONDO



<sup>136</sup> Kunjungan ke Hutan (salah satu lahan bekas Gulat), 9 Maret 2004.

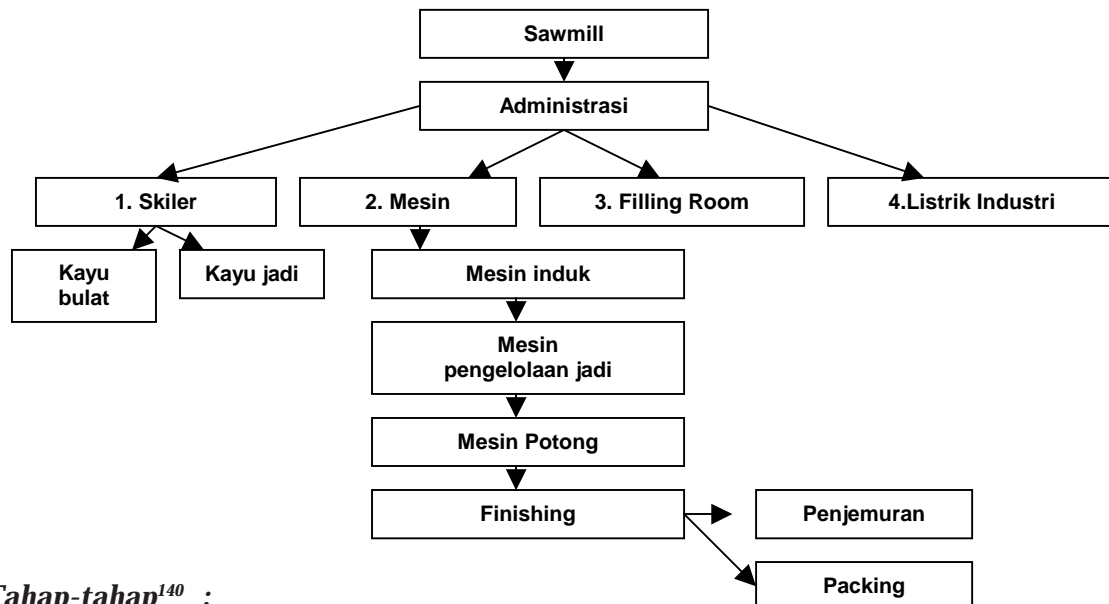
<sup>137</sup> Mahmud Asri, Wawancara, wartawan di Palu, 13 Maret 2004.

<sup>138</sup> Ama, Wawancara di Desa Tokorondo, Poso, 10 Maret 2004.

<sup>139</sup> Daus, Wawancara di Desa Tokorondo, Poso, 9 Maret 2004.



### Pemetaan Struktur Operasional Bagian Sawmill Tokorondo



#### **Tahap-tahap<sup>140</sup> :**

- **Tahap I**, dilakukan di HPH, di hutan (di atas gunung)
  1. **Survey** dalam HPH, survey isi hutan, jenis2 kayu yang bisa diproduksi.
  2. **Cruising**, mengadakan penomeran dan pengukuran pada kayu, apakah kayu itu layak tebang atau tidak, yang dilihat dari diameter kayu, min 60cm ke atas.
- **Tahap II**, dilakukan di Tokorondo (tempat pengolahan kayu)
  1. **Pembersihan lokasi** dengan pembukaan jalan dari pantai (km 0) sampai ke gunung – yang merupakan jalan logging yang dilakukan dengan bulldoser dan traktor, sedangkan bulldoser dan traktor dari Makassar dikirim lewat jalan laut.
  2. **Pembuatan jalan**, yang merupakan bagian dari rencana pengolahan (rencana pengolahan dilakukan oleh kepala produksi dan pimpinan produksi)
- **Tahap III**, pelaporan dan meeting yang diadakan oleh kepala2 bagian dan bagian perijinan, setelah itu rencana penebangan kayu dari hasil survey dan penomeran kayu di atas (masuk ke bagian chainsaw).

#### **b. Jalur Dagang dan Pembayaran**

Gulat di Tokorondo telah mempunyai dermaga sendiri, sawmill, hutan dan juga proses shippingnya dan jalur yang singkat. Oleh karena itu Operasi Gulat tidak melalui jalur Palu ataupun Ujung Pandang, dia langsung dikirim/diexport ke perusahaan asing seperti Jepang dan Korea. Dalam proses *pengapalan* biasanya diangkut (khusus kayu hitam) kurang lebih 250 kubik, dalam keadaan masih setengah jadi. Ketika akan

<sup>140</sup> Daus, opcit



melakukan pengapalan, biasanya banyak pengawas yang melakukan pengecekan, antara lain dari kehutanan, Polsek Poso Pesisir, Kodim.

Pembayaran kayu-kayu hitam yang di ekspor ke luar negeri dengan dua cara; *Check Price* yaitu pembayaran masuk ke kas perusahaan sedangkan *Sales Price* masuk ke kantong Sandewang, perbandingannya adalah \$1 *Check Price* dan \$3 *Sale Price*.<sup>141</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ada modus korupsi yang dilakukan oleh Sandewang. Dengan perbandingan dari 3:1. jika sebuah barang dijual dengan harga 3 maka hanya 1 yang dilaporkan dalam buku catatan resmi perusahaan. Hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir pembayaran kewajiban-kewajiban perusahaan ke Negara, seperti IHH (Iuran Hasil Hutan).

Pernah ada pengangkutan kayu hitam dari Tokorondo. Tetapi karena tidak ada ijin loading, maka dilakukan permainan. Caranya adalah, ketika siang hari, kayu-kayu lunak dimasukkan ke kapal, sudah mendapatkan ijin dan dokumen dari para pengawas, ketika malam hari, kayu-kayu tersebut dibuang ke laut dan digantikan dengan kayu hitam. Yang dibutuhkan sebenarnya hanya dokumen sebagai cover pengiriman kayu hitam. Cara lain adalah dengan membuat rakit dari kayu biasa, kemudian kayu hitam tersebut diletakkan di atas rakit, baru loading.<sup>142</sup>

### c. Cara “Kekeluargaan”

Cara pengelolaan atau menegmen Gulat terkenal dengan cara kekeluargaan. Kebanyakan dari para pekerja adalah beretnis bugis, terutama dari daerah asal Muin Sandewang; Palopo. Selain itu dari komposisi saham dan pemegang jabatan di PT Gulat adalah keluarga/ masih ada hubungan darah. Selain itu kelompok yang mudah mendapatkan akses jabatan di Gulat adalah latar belakang kemiliteran dan teman seperjuangan Muin Sandewang. Untuk urusan kekerabatan dalam pengelolaan ini dipahami sebagai pengelolaan secara kekeluargaan.<sup>143</sup>

Dari sejak masuknya Gulat ke Tokorondo sudah menggunakan akses *Lago'*. Kemudian anak satu-satunya sandewang (Sandra) dan istrinya merupakan pemilik saham. Setelah Sandra menikah, Gulat dijalankan oleh menantu Sandewang (suami Sandra) yang bernama Simson. Para pekerja yang di Tokorondo maupun yang dari Palopo, banyak yang beretnis Bugis/ palopo. Sementara dari militer jajaran terdapat beberapa pos jabatan yang diisi oleh orang militer, sebut saja; Muhammad Ali yang menjadi kepala operasional Gulat pada masa akhir Gulat di Tokorondo, Tungkanan kepala keamanan Gulat. Di Makassar terdapat Samuel, Koordinator Satpam Gulat Makassar. Selain itu yang terlibat antara lain Lahamudin (pangkat Mayor) dan Andi Baso Balandai (pangkat Lettu)<sup>144</sup>

<sup>141</sup> Mistu, *opcit*

<sup>142</sup> Eli, Pengkapalan/Kapten Kapal (Loading Kayu) PT Gulat I. Wawancara, Petani, Warga Tokorondo, 11 Maret 2004.

<sup>143</sup> Nusa, Wawancara di Desa Tokorondo, 8 Maret 2004.

<sup>144</sup> Taha, *opcit*

#### **d. KKN**

Aparat TNI dan Polri, serta lainnya seperti Kejaksaan, pemda sering datang ke Gulat tapi tidak menunjukkan perilaku yang kolusif<sup>145</sup>. Sehari-hari, untuk segala kegiatan, Gulat tidak mendapatkan kesulitan dari aparat atau militer. Tetapi kolusi tetap ada dan terjadi. Pemberian uang ke pejabat-pejabat (sogok) dalam jumlah besar dilakukan oleh Muin Sandewang sedangkan pengeluaran yang kecil-kecil dikerjakan oleh Pak Ali<sup>146</sup>.

Pak Ali sering kali menangani permainan dalam pembayaran pajak dengan cara misalnya me-mark up volume kayu yang akan dikirim. Hasil dari mark up tersebut kemudian menjadi keuntungan bagi perusahaan. Orang militer kasih nota ke Sandewang untuk meminta tanda tangan dari Gubernur Palu pada waktu itu untuk minta HPH Gulat. Ada backing dari istana, terutama orang dalam, Gulat menyumbangkan satu *mercy tiger* untuk orang dalam istana tersebut pada jaman Soeharto.<sup>147</sup>

#### **e. Menggunakan Helikopter**

Untuk daerah-daerah yang tanahnya miring dan susah akses untuk mengambilnya, Gulat pernah melakukannya dengan menggunakan helikopter. Gulat menyewa Helikopter dari Singapura, yaitu *air fast* yang disewa selama 3 bulan. Selama helikopter tersebut beroperasi, Ada jalur khusus yang dibuat untuk helikopter pengangkut. Jam operasi heli jam 7 pagi – 11 siang. Kemudian dilanjutkan lagi pada jam 2 sampai jam 4 sore. Yang diangkat oleh heli hanya kayu-kayu yang berkelas seperti kayu Ebony<sup>148</sup>. Tetapi waktu 3 bulan tersebut tetap tidak cukup untuk mengangkut semua kayu hitam yang terdapat didaerah terjal, dalam hal ini paling banyak di daerah Tambarana.

#### **f. Gulat Tutup**

Pada masa Simson, masa akhir sebelum Gulat tutup di Tokorondo, Gulat tidak membayar pajak. Dengan kata lain Gulat merupakan penunggak pajak. Sementara catatan Pajak Bumi dan Bangunan, per 1 Januari 2002, mengatakan bahwa Gulat masih berkewajiban membayar PBB sebesar Rp. 8.433.112.<sup>149</sup> informasi lain mengatakan bahwa Gulat juga belum membayar IHH (Iuran Hasil Hutan). Tetapi saat diverifikasi ke KP2LN, melalui Jhon F Wattimury, Kasi Piutang Negara, tidak bersedia memberikan informasi perihal penunggakan IHH Gulat tersebut.<sup>150</sup>

Sampai pada tutupnya perusahaan, tidak pernah ada masalah dengan aparat atau dengan instansi lain. Setelah Gulat tutup dan tidak beroperasi lagi, mesin-mesin bekas usaha Gulat

<sup>145</sup> RDP dan Rasta. Ngobrol di Sancanga (pantai di Tokorondo) bersama 7 orang nelayan, 10 Maret 2004.

<sup>146</sup> Lee, opcit.

<sup>147</sup> ibid

<sup>148</sup> Daeng, Wawancara di Desa Tokorondo, Poso, 9 Maret 2004.

<sup>149</sup> Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Poso, seksi Penagihan, Daftar Tagihan Sektor P3.

<sup>150</sup> ibid

dibawa ke Makassar. Sejarah mesin ada di Tokorondo salah satunya adalah; karena ada Perda yang mengatur kalau perusahaan-perusahaan yang mempunyai HPH harus mempunyai sawmill dilokasi karena ada larangan ekspor dalam bentuk *log* (kayu glondongan/mentah/bulat), minimal harus setengah jadi<sup>151</sup>. Alat-alat yang digunakan Gulat merupakan alat-alat yang diproduksi oleh PT CONAN.

### 3. Pekerja dan kompensasinya

Pada laporan keempat (dilaporkan pada 11 Desember 1991) dalam Buku Induk UU No 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketanagakerjaan, dikatakan bahwa jumlah buruh WNI laki-laki berumur dewasa sebanyak 68 orang, buruh WNI perempuan berumur dewasa sebanyak 5 orang. Sehingga total buruh WNI dewasa sebanyak 77 orang. Sementara jumlah buruh WNA pendatang laki-laki sebanyak 4 orang. Dalam buku Induk dikatakan bahwa 77 buruh WNI tersebut berstatus buruh. Dalam buku tersebut tidak dijelaskan status 4 orang WNA.<sup>152</sup> Jumlah buruh WNI dan WNA pada tahun 1991 ini sama dengan jumlah pada tahun sebelumnya.<sup>153</sup>

#### **a. Pekerja dari Tokorondo**

Gulat banyak mempekerjakan warga masyarakat desa Tokorondo, desa dimana Gulat beroperasi<sup>154</sup>. Emi (84th), mengatakan mungkin sekitar hampir seratus orang warga Tokorondo yang pernah bekerja di Gulat<sup>155</sup>. Para warga masyarakat yang menjadi pekerja Gulat lebih memilih bekerja di Gulat karena letaknya yang sangat dekat dengan tempat tinggal mereka. Sehingga ketika jam istirahat mereka bisa istirahat dan makan di rumah mereka sendiri<sup>156</sup>.

Alasan lain masyarakat Tokorondo sangat antusias bekerja di Gulat karena pamor Gulat yang melonjak. Gulat dianggap sukses dan berjaya dalam perdagangan kayu. Wajah, menceritakan, pada zaman jaya-jayanya Gulat, hampir semua anak laki-laki setelah lulus SMP berkeinginan bekerja di Gulat.<sup>157</sup>

#### **b. Pekerja Dari Luar Tokorondo**

Diantara para pekerja banyak juga yang datang dari luar Tokorondo. Kedatangan mereka ke Tokorondo merupakan konsekuensi kerja. Artinya karena mereka telah menjadi pegawai sejak di Gulat Makassar atau Palopo, maka ketika Gulat membuka lahan baru di Tokorondo

<sup>151</sup> RDP dan Rasta, opcit

<sup>152</sup> Buku Induk UU no.7/1981 tentang wajib laport ketenaga kerjaan pasal 7 ayat 1, Depnakertrans Kabupaten Poso, Sulteng.

<sup>153</sup> ibid.

<sup>154</sup> Vopane, opcit

<sup>155</sup> Emi, opcit

<sup>156</sup> Daeng, FGD, 14 Maret 2004

<sup>157</sup> Wajah, Wawancara di Desa Tokoronodo Poso, 10 Maret 2004.

mereka harus (atau ikut) ke lokasi baru. Maka lumrah jika kemudian, selama masa kerjanya, mereka harus tinggal di Tokorondo<sup>158</sup>. Daeng dan pak Ide contohnya. Kedua orang ini bahkan kawin dan berkeluarga di Tokorondo. Keduanya sampai saat ini masih tinggal di Tokorondo.

Jadi hubungan antara para pekerja Gulat dengan Masyarakat desa Tokorondo karena gairah kerja masyarakat ke Gulat dan karena para pekerja Gulat yang kemudian harus menetap dan menjadi warga Tokorondo.

### ***c. Pekerja Perempuan***

Sementara terdapat beberapa perempuan yang bekerja di Gulat. Keterlibatan para perempuan di Gulat juga dengan latar belakangnya masing-masing. Diantaranya karena diajak oleh salah seorang kenalan dan juga karena suami sudah lebih dahulu bekerja di Gulat, diantaranya Jidah (berhenti dan ikut suami), Ratna (berhenti dan ikut suami) dan Ibu Wina (juga berhenti kerja, ikut suami)<sup>159</sup>. Pekerjaan-pekerjaan perempuan selama Gulat beroperasi pada bagian administrasi. Satu orang perempuan diantaranya menjadi juru masak Gulat; ibu Ita. Ibu Ita berasal dari tanah Jawa, diajak ke Tokorondo oleh Muin Sandewang untuk mengurus masakan orang-orang kantor, yang berjumlah kurang lebih 5-10 orang, tamu-tamu dari luar negeri (orang Jepang dan Singapore) dan petugas-petugas dari instansi-instansi. Ketika Gulat tutup di Tokorondo, ibu ini hanya dibiarkan tanpa kejelasan kompensasi atau sikap positif.

### ***d. Pekerja beretnis Bugis***

Para pekerja, baik yang warga Tokorondo maupun yang datang khusus bekerja di Gulat Tokorondo, rata-rata beretnis Bugis atau berasal dari Palopo<sup>160</sup>, Sulawesi Selatan. Sentimen etnis Bugis yang digunakan dalam memperkerjakan karyawan/pekerja di Gulat pada dasarnya bukan merupakan aturan normatif. Tetapi lebih bernuansa sentimental. Tetapi sentimental tersebut sebenarnya bukan sejak Gulat di Tokorondo. Tetapi sudah dilakukan sejak masih di Lepa-lepa, Palopo dan pada kantor Gulat di Makassar.

Selain itu pendekatan Muin Sandewang yang cukup persuasif dan akomodatif<sup>161</sup> terhadap beberapa orang dan pada saat-saat tertentu, turut menentukan pengelolaan dan perekrutan pekerja Gulat. Sandewang kerap mengajak orang-orang yang dipercayanya untuk bekerja di Gulat dengan cara memberi kepercayaan, membagi "kepemilikan". Seperti saat mengajak pak Ide, sandewang khusus mengajak dan memanggil Ide sejak di Makassar. Dalam pertemuannya, sandewang mengatakan bahwa cuma kau yang mengerti soal kayu, dan

---

<sup>158</sup> Daeng dan Ide, FGD, 14 Maret 2004.

<sup>159</sup> Wina, Ibu Rumah Tangga, Wawancara warga Tokorondo, mantan Pembantu Administrasi di bagian Sawmill PT Gulat, 10 Maret 2004.

<sup>160</sup> Eli, Nusa, Ide, Daeng, FGD, 14 Maret 2004.

<sup>161</sup> Emi, opcit.

saya minta kau pegang grider di Tokorondo. Begitu juga dengan Samuel, koordinator satpam di mess Gulat di Makassar, Lago'-nya Sandewang, asli Palopo, tepatnya Masamba, sama dengan Sandewang, mantan TNI (28 tahun bertugas di Jawa), saat diajak Sandewang, dikatakan, "daripada menjaga punya orang lain, lebih baik jaga punya kita sendiri".<sup>162</sup>

#### ***e. Pekerja dari Militer***

Selain Abdul Muin Sandewang yang berlatar belakang Militer, terdapat beberapa nama yang juga berlatar belakang militer dan berada dalam jajaran lain yang beragam di dalam Gulat.

Pertama, adalah Mistu yang berhenti menjadi Informan Kodam Hasanuddin bersamaan dengan pensiunnya M. Sandewang, pada sekitar tahun 1980 (pertengahan)<sup>163</sup>. Kemudian Mistu bergabung dengan Gulat dan menjadi kepala bidang Operasional Gulat di Tokorondo. Sampai saat ini Mistu masih tinggal di salah satu rumah, bekas kantor Gulat, di Tokorondo. Mistu dipercaya untuk menjaga asset-asset Gulat di Tokorondo.

Kedua, Andi Baso Balandai (pangkat Lettu) dan Lahamudin (pangkat Mayor)<sup>164</sup>. Andi Baso kemudian menjadi kepala proyek di Gulat. Keduanya merupakan keluarga Muin Sandewang dari Palopo.

Ketiga, adalah Tungkanan, pensiunan TNI, Kodim 1307 Poso dengan pangkat terakhir Sersan Jabatan Intel TNI<sup>165</sup>. Setelah pensiun, Tungkanan bekerja di PT. Daya Sinar Mas, sebuah perusahaan logging kayu, termasuk mengelola kayu hitam di dusun Membuke, Desa Tumora, Poso Pesisir. Tungkanan bekerja di PT. Gulat sebagai pengawas (kepala keamanan) sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1994<sup>166</sup>. Pernah dalam satu waktu, pada saat pemuatan kayu hitam dari areal penebangan ke Logging, Tungkanan melakukan pengawasan, namun dari 10 truck yang memuat kayu hitam 3 truck diantaranya tidak masuk ke lokasi logging namun oleh Tungkanan diteruskan ke Poso untuk kepentingan bisnisnya.

Mistu pernah menangkap kayu hitam yang dicuri oleh Tungkanan, terjadi selisih paham yang pada akhirnya Tungkanan memanggil anaknya yang Kopasus dan kemudian mengancam Mistu. Tungkanan diberhentikan (dipecat) dari perusahaan karena terlibat pada kasus penyelundupan kayu hitam ke Malaysia. Kayu-kayu hitam tersebut dicuri oleh Tungkanan sejak tahun 1990 dari areal PT. Radar Utama Timber di Desa Piore, Kecamatan Sausu, Donggala (sekarang Kab. Parigi Moutong). Walaupun Tungkanan bekerja di Gulat, namun terdengar kabar bahwa dia merupakan orang'nya' Andreas Liem (Baba Liem); PT. Cahaya Sentosa, yang juga merupakan suplayer kayu hitam ke PT. Gulat.

<sup>162</sup> Ide, opcit.

<sup>163</sup> Mistu, Wawancara di Desa Tokorondo, 22 Maret 2004.

<sup>164</sup> Taha, opcit

<sup>165</sup> Elmy, Wawancara di Tentena, Poso, 27 Maret 2004.

<sup>166</sup> Mistu, opcit

Selain itu ada beberapa nama, yang berpangkat yang berada diluar struktur Gulat, yang merupakan (mantan) anggota Militer

Pertama, M Yusuf, Lokasi sawmill PT. Gulat di Kelurahan Antang, Makassar, Sulsel adalah tanah milik Jend. Purn. M. Yusuf yang dibeli oleh perusahaan sebesar \$25.

Kedua, Sudomo, diketahui dekat dengan Muin Sandewang. Sawmill Gulat yang jalan Antang, Makassar diresmikan oleh Sudomo. Padahal saat itu Sudomo adalah menteri Tenaga Kerja.

Ketiga, Leo Loupolissa, merupakan (mantan) panglima armada timur, yang meresmikan Gulat di Tokorondo pada tahun 1976.

Keempat, Kemal Idris, (mantan) komando daerah Indonesia Timur.

Kelima, Solichin GP, (mantan) Pangdam Hassanudin, semasa sandewang masih aktif sebagai TNI di Kodam Hasanudin dan saat Sandewang menjabat direktur Gulat.<sup>167</sup>

#### ***f. Perangkat Perburuhan***

Kelengkapan perburuhan yang terdapat di Gulat selama beroperasi di Tokorondo adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), peraturan perusahaan, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Asuransi Tenaga Kerja (Astek), Jaminan sosial berupa; Cuti sakit, biaya penguburan dan tunjangan hari tua. Kelengkapan perburuhan yang tidak di dapati di Gulat Tokorondo adalah status WNA pendatang, mekanisme Bipatride (sebagai mekanisme penyelesaian sengketa), Kesepakatan kerja bersama (KKB), Koperasi, cuti hamil, cuti bersalin, fasilitas latihan, program latihan tenaga kerja Indonesia.<sup>168</sup>

#### ***g. Upah Kecil, cara mem-PHK dan Pesangon***

Gaji pekerja PT Gulat dilihat dari statusnya. Ada pekerja harian, honorarium dan karyawan tetap<sup>169</sup>. Dalam mem-PHK Gulat menggunakan alasan akan pindah ke Gorontalo. Sementara permintaan pengunduran diri datang dari para pekerja dengan alasan besaran upah yang sangat kecil, bahkan yang berasal dari sesama militer pun merasa terlalu kecil. Sementara pesangon banyak tidak diterima oleh pekerja, begitu juga dengan Astek, saat mereka keluar dari Gulat. Jikalau ada kadang harus dilakukan dengan usaha yang “lebih”. Beberapa gambaran dibawah merupakan ungkapan yang keluar dari keringat kerja sejumlah orang yang pernah bekerja di Gulat.<sup>170</sup>

---

<sup>167</sup> Mistu, opcit

<sup>168</sup> Buku Induk UU no.7/1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan pasal 7 ayat 1, Depnakertrans Kabupaten Poso, Sulteng.

<sup>169</sup> Daus, opcit

<sup>170</sup> Semua mantan pekerja PT. Gulat yang diwawancarai.

Nusa (laki-laki, 40th) bekerja di Gulat kira-kira 1986. Gaji di Gulat cukup kecil. Nusa keluar dari Gulat ketika Gulat menawarkan Nusa untuk dipindahkan ke Gulat cabang Gorontalo. Nusa menolak, Setelah keluar dari Gulat, kesulitan di dapat saat mengurus astek. Usahanya mendapatkan Astek harus dijalani dalam kurun waktu Dua tahun setelah keluar dari gulat dan setelah mondar mandir Tokorondo-Palu. Menurut Nusa, sepengetahuannya, Bahkan banyak pekerja-pekerja lain yang asteknya tidak keluar, ketika mereka keluar dari Gulat atau ketika mereka meninggal dunia. Nusa mendapat informasi bahwa beberapa tahun terakhir, Gulat tidak lagi membayarkan uang astek yang dipotong dari gajinya pekerja Gulat. Itulah sebabnya Nusa sampai harus mondar mandir ke Palu selama 2 tahun, karena dianggap sudah tidak ikut Astek.<sup>171</sup>

RDP (laki-laki, 42 th) dan Rasta (laki-laki, 40 th) pernah bekerja di Gulat. sebagai buruh harian. Gaji awal 800 rupiah/hari. Setelah Rasta kerja awal selama 3 bulan baru kemudian diangkat pegawai (dengan SK dari makasar) dan mendapatkan gaji pokok 11 ribu rupiah. Uang makan 1 bulan 20 ribu rupiah. Total 31 ribu. Gaji total tersebut sampai akhir Rasta kerja hanya naik menjadi 33 ribu rupiah. Sementara RDP saat di PHK tidak ada pesangon. Padahal sudah ikut SPSI, Astek dan sudah lapor ke Depnaker, saat di pecat, tetapi tidak ada jawaban/hasil.<sup>172</sup>

Durin (laki-laki, 39 th), juga merupakan salah satu dari banyak penduduk diTokorondo yang mantan pegawai harian dari PT Gulat. Saat kerja di Gulat Safrin digaji Rp 1.250,- per hari. Pada saat ada PHK Massal—ketika PT Gulat sudah tidak beroperasi—Banyak yang tidak menerima pesangon. Kebijakan Gulat mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan pesangon, harus mengurus ke Makasar.<sup>173</sup>

Nusa (laki-laki, 37 th)) mengatakan Untuk kesejahteraan pekerja PT Gulat, ada asuransi tenaga kerja (Astek). Setelah ada PHK massal, ada pekerja yang mendapatkan pesangon, ada juga yang tidak mendapat pesangon. Salah satu penyebabnya yang paling penting adalah karena Gulat tidak menyampaikan ke astek. Meskipun pekerja telah dipotong upahnya untuk membayar astek. Akibatnya ketika ada PHK massal, banyak pekerja yang tidak mendapatkan pesangon. Jika ingin mendapatkan pesangon harus mengurus langsung ke Gorontalo.<sup>174</sup>

Taha (laki-laki, 67 th), Walaupun gaji yang diterima pekerja Gulat termasuk kecil, tetapi mereka tidak pernah telat menerima gaji.<sup>175</sup>

Daeng (laki-laki, 55 th) Masuk kerja pertama kali pada September 1975 sebagai buruh harian di Gulat khusus bagian bangunan. Tetapi baru Sekitar tahun 1980 diangkat menjadi

<sup>171</sup> Nusa, opcit

<sup>172</sup> RDP, opcit

<sup>173</sup> Apin, Kepala Desa Tokorondo (Kades), wawancara di Desa Tokoronodo, 7 Maret 2004.

<sup>174</sup> Nusa, opcit

<sup>175</sup> Taha, opcit



karyawan tetap di Gulat untuk mengerjakan bangunan bagian kamp-kamp dan perumahan untuk karyawan dan pekerja PT Gulat. Saat keluar pada tahun 1997, karena minta mundur dari perusahaan, tidak mendapatkan pesangon. Sebelumnya pada tahun 1979 pernah minta berhenti dari perusahaan, tetapi kemudian ditarik kembali oleh perusahaan, sampai akhirnya benar-benar keluar pada tahun 1997. Menurutnya Gulat merupakan perusahaan yang pelit, karena pengalamannya dalam masalah gaji. Gaji pada tahun 1975 hanya Rp 300/hari – Rp 25.000/bulan. Gaji terakhir tahun 1997 Rp 350.000,-<sup>176</sup>

Daus (laki-laki, 56 th) mengatakan bahwa Gaji pekerja PT Gulat dilihat dari statusnya. Ada pekerja harian, honorarium dan karyawan tetap. Ia menjadi pekerja honorarium pada tahun 1977, ketika menjadi karyawan tetap, ia mendapatkan kenaikan gaji sebesar 15%. Ia keberatan untuk menyebutkan gajinya, karena merasa malu dengan kecilnya jumlah gaji yang ia dapat. Sampai sekarang nama masih terdaftar sebagai pegawai PT Gulat – (belum ada pemutusan hubungan kerja) tetapi juga tidak diberikan gaji dari Gulat.<sup>177</sup>

Wina (perempuan, 40 th) mengatakan standar Gaji ketika itu Rp 2.000/hari. Kalau untuk pekerja harian lepas Rp 1.750/hari. Yang menangani masalah gaji pada waktu itu adalah Pak Arifin, orang Palopo. Ketika berhenti tidak ada uang jasa dan pesangon.<sup>178</sup>

Tingkatan status pekerja :

1. Harian Rp 2.000/hari
2. Pekerja lepas Rp 1.500/hari
3. Borongan Rp 1.750/hari
4. Karyawan tetap Rp 60.000/bulan

Pemberian gaji di Gulat tidak ketat dengan standar pemberian gaji yang layak dan tidak berdasarkan status pekerja di Perusahaan. Gaji pekerja harian bisa lebih besar dari gaji karyawan tetap. Dari sisi jaminan pekerja kurang mendapat jaminan dari perusahaan. Di Gulat tidak ada astek dan tidak ada perjanjian kerja.

Ama (laki-laki, 44 th) mengatakan bahwa Tahapan dia bekerja di Gulat terbagi menjadi beberapa tahap :

1. Pekerja harian lepas Rp 1.000/hari - 1985
2. Pekerja harian lepas Rp 1.125/hari – 1987
3. Pekerja Honorer Rp 40.000/bulan – 1988
4. Karyawan tetap Rp 50.000/bulan – 1990
5. Karyawan tetap Rp 60.000/bulan – 1993<sup>179</sup>

---

<sup>176</sup> Daeng, opcit

<sup>177</sup> Daus, opcit

<sup>178</sup> Wina, opcit

<sup>179</sup> Ama, opcit



Pada akhirnya Ama Pindah kerja karena upah kerja terlalu kecil dan tidak ada astek. Astek hanya diperuntukkan pada orang-orang tertentu (sangat berbeda dengan tempat kerjanya sekarang di Hutan Bersama, baru 3 bulan kerja sudah mendapatkan astek).<sup>180</sup>

Taha (laki-laki, 70 th), Gaji pada tahun 1972 di Palopo Rp 10.000/bulan, pada tahun 2000 – Rp 380.000/bulan. Emi, 84 tahun bekerja di Gulat sejak awal di bagian pengapalan, mempunyai anak buah kurang lebih 50 an orang. Tahun 1981 pak Emi di PHK, tetapi 2 tahun kemudian di panggil kembali, karena penggantinya tidak bagus/rapi bekerjanya. Pak Emi selama bekerja di PT Gulat menjadi anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Tetapi SPSI tidak berbuat apa-apa saat ia dikeluarkan dari PT Gulat pada tahun 1981. Tetapi Pak Emi tetap mempermasalahkan pemecatannya. Hal itu membuatnya harus mengurus sendiri sampai ke Depnaker (bisa dilihat di sebagian dokumen-dokumen, yang tidak terbakar saat konflik !).<sup>181</sup> Saat bekerja gajinya kecil, tambahan hanya saat ada borongan kerjaan lain yang bukan merupakan bagian kerjanya dan diluar jam kerja. Contoh membuat pagar atau dermaga. Lebaran tidak ada THR.

Setelah kerusuhan, Emi (laki-laki, 84 th) membuat rumah diatas tanah yang diklaim sebagai milik Gulat oleh si Penjaga Aset Gulat di Tokorondo; pak Ali. Tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Emi, lebih lanjut dikatakan,

*"...sudah 23 tahun bekerja di Gulat, tapi tidak dapat apa-apa, jadi sekarang saya mau pake tanahnya.."*<sup>182</sup>

Tiwa (perempuan, 50 th), Tukang masak PT Gulat awalnya kerja karena dipanggil oleh Pak Sandewang untuk bekerja di perusahaannya ketika masih di Ujung Pandang. Gaji di PT Gulat waktu awal bekerja Rp 35.000/bulan, sekarang (terakhir bekerja) naik menjadi Rp 50.000/bulan, ditambah uang makan Rp 20.000/bulan. Setelah selesai bekerja, ia mendapatkan pesangon dari perusahaan sebesar Rp 600.000. Mendapatkan astek juga sebesar Rp 60.000, tetapi 5 tahun terakhir bekerja tidak mendapatkan apa2 dari perusahaan.<sup>183</sup>

Mistu (laki-laki, 70 th), Gaji pada tahun 1968 Rp 1.250/bulan, gaji terakhir Rp 450.000/bulan. Setelah Gulat tidak ada di Tokorondo, gaji selalu dikirim dari Jakarta untuk modal kerjanya mengelola aset di Tokorondo, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi dikirim. Astek pada waktu itu diberikan pada tahun 1970. Caranya adalah dengan mendaftarkan nama karyawan. Tetapi pada pemberian gaji, hanya diberikan gaji minimum, berarti astek tersebut sudah masuk dalam gaji pegawai (gaji pegawai dipotong 2,5%). Pak Ali pernah minta keluar dari perusahaan karena gaji tidak sesuai. Pengeluaran sehari-hari2 bisa Rp 5.000, sedangkan

<sup>180</sup> Eli, opcit

<sup>181</sup> Emi, opcit

<sup>182</sup> Tiwa, warga desa Tokorondo, wawancara, 11 Maret 2004.

<sup>183</sup> Tiwa, opcit

gaji hanya Rp 1.250, utangnya menumpuk, tapi dari perusahaan tidak memperbolehkannya keluar, ia kemudian diberikan dari perusahaan sejumlah uang untuk membayar utang-utangnya.<sup>184</sup>

Sayangnya ukuran-ukuran gaji sebagaimana diutarakan diatas tidak dapat terverifikasi, secara normatif. Hal ini karena kantor wilayah Depnakertrans, sudah tidak memiliki lagi data-data Upah Minimum Regional (UMR) pada saat Gulat beroperasi di Tokorondo. Alasannya karena tidak ada sistem penyimpanan yang baik dalam Depnakertrans dan karena konflik yang terjadi sehingga data tersebar-sebar. Tetapi yang jelas dari keterangan-keterangan para pekerja, bahwa upah-upah yang diberikan tersebut jauh dari kecukupan normal biaya hidup sehari-hari.<sup>185</sup>

Ia menjadi pekerja honorarium pada tahun 1977, ketika menjadi karyawan tetap, ia mendapatkan kenaikan gaji sebesar 15 %. (Daus keberatan untuk menyebutkan gajinya, karena merasa malu dengan kecilnya jumlah gaji yang ia dapat).

#### 4. Perannya terhadap masyarakat

##### *a. Perannya semasa beroperasi*

Selain membeli/mengambil tanah untuk dibuat gudang, sawmill dan kontor, Gulat juga memperuntukkan tanah masyarakat bagi pembuatan jalan. Keuntungan yang diperoleh dari Gulat antara lain : ada jalan darat yang dibuat oleh Gulat (sekarang menjadi jalan utama di desa Tokorondo)<sup>186</sup>. Asumsi yang dikembangkan adalah Jalan tersebut dibuat untuk mempermudah membawa kayu dari gunung/hutan ke Tokorondo. Karena dengan adanya jalan akan mempermudah membawa kayu hitam/kayu lainnya. Dengan banyak produksi kayu dan ada perusahaan di Tokorondo, maka akan banyak masyarakat Tokorondo yang bisa kerja dan sejahtera.

Hal ini kini telah disadari oleh sebagian warga masyarakat. Bahwa sebenarnya Gulat melakukan penipuan karena peruntukkan jalan hanya untuk melancarkan operasi produksi Gulat belaka. Terlebih-lebih beberapa tanah justru tidak dibeli tetapi hanya diganti uang pohonnya<sup>187</sup>.

Sementara sumbangannya untuk kepentingan warga tidak terlalu terasa, seperti lapangan sepak bola dibeli hasil dana patungan masyarakat sendiri. Gulat tidak membantu/membeli/ikut patungan. Gulat hanya membeli/membayar pembebasan pohon diatas tanah yang

---

<sup>184</sup> Mistu, *opcit*

<sup>185</sup> Kunjungan ke beberapa kantor pemerintah di Poso dan diskusi dengan beberapa mantan pekerja Gulat.

<sup>186</sup> Daeng, *opcit*

<sup>187</sup> RDP dan Rasta, *opcit*.

akan dijadikan lapangan bola<sup>188</sup>. Kemudian pada saat MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an), Gulat hanya membantu memberikan lampu<sup>189</sup>.

Tetapi hal sumbangan sosialnya kepada masyarakat justru dilihat secara berbeda oleh pak Ali, dikatakan bahwa PT. Gulat membantu pembangunan sarana sosial, misalnya: Pembangunan Gereja di Desa Tokorondo, Poso Pesisir (saat ini sudah tidak ada karena dibakar oleh massa pada konflik tahun 2000-2001), Pembangunan Sekolah Dasar di Desa Lepa-lepa, Palopo, Sulawesi Selatan, Pembangunan jalan Tokorondo-Desa Masani, Merintis Jalan Trans Sulawesi mulai dari Jembatan Puhah (Ratolene) sampai ke Desa Tambarana Poso Pesisir, dan membuat lapangan sepak bola di Tokorondo<sup>190</sup>.

### ***b. Perannya setelah berhenti***

Sampai saat ini sisa-sisa gudang Gulat masih ada. Untuk urusan ini Gulat masih memperkerjakan beberapa orang di Tokorondo sampai saat ini, Yaitu bapak Mistu<sup>191</sup> dan Bapak Daus. Oleh karena itu pula keduanya masih menerima gaji dari Gulat sampai beberapa bulan yang lalu (..-2003).

Saat pecah konflik di Poso, gudang tersebut sempat digunakan oleh salah satu pasukan sipil peserta konflik; Laskar Jihad, sebagai markasnya. Banyak masyarakat mempertanyakan penggunaan aset gulat setelah tutup atau ditinggalkan. Daripada asset yang tidak jelas penggunaan dan statusnya, sebaiknya aset-aset tersebut diserahkan untuk kepentingan umum seperti sekolah/pasar. Terlebih-lebih Gulat dikenal tidak pernah beramal ke pekerja dan/atau ke masyarakat Tokorondo<sup>192</sup>.

Bekas-bekas PT Gulat di Tokorondo banyak dan terlihat menjadi bangkai industri, berupa:

- Satu buah bangkai kapal semi yang bernama Gulat 1 (kapal semi merupakan kapal penghubung pengangkut dari dermaga ke kapal besar).
- 2 buah Dermaga disepanjang pantai Tokorondo
- 4 buah hangar/gudang, saat ini hanya digunakan untuk pasar selasa (hanya untuk tiap hari selasa)
- 1 lapangan bekas hangar/gudang induk, yang telah dibakar. Saat dibakar beserta kayu hitamnya
- tanah-tanah kosong yang dulunya dipakai sebagai tempat kayu gelondongan (Logs). Tanah-tanah tersebut saat ini telah digunakan oleh masyarakat untuk rumah-rumah, terutama setelah konflik, setelah rumah-rumah mereka dibakar.

<sup>188</sup> Eli, opcit

<sup>189</sup> RDP dan Rasta, opcit

<sup>190</sup> Mistu, opcit

<sup>191</sup> Durin, opcit. Menurutnya, sampai saat ini yang memegang fotokopian sertifikat adalah Mistu.

<sup>192</sup> Tahir, RDP, Daus, FGD

Selain asset-asset yang berupa barang dan tanah, di Tokorondo juga masih terasa nuansa psikologis masyarakat yang kecewa dan trauma karena upah, pesangon, tidak ada sumbangan sosialnya. Dan tetap juga harus diakui ada yang bangga dengan Gulat karena etnis bugis, asal Palopo, kejayaan Gulat, sumber kayu hitam.

Saat ini masyarakat banyak yang menduduki tanah Gulat yang kosong dan tidak di pakai<sup>193</sup>, seperti tempat penampungan kayu yang di bawah (di pantai) dinamakan *Logs Yard*. Alasan pendudukan tersebut karena mereka butuh lahan untuk membuat tempat tinggal setelah konflik. Ditambah dengan daya ingat mereka bahwa Gulat tidak pernah memberikan apa-apa buat masyarakat..

Pada tanggal 20 Desember 2003, telah terjadi pemeriksaan administrasi dan fisik atas asset-asset Gulat di Tokorondo. Dari pemeriksaan tersebut dihasilkan beberapa inventaris (lihat lampiran). Hasil pemeriksaan tersebut berupa Pro Justitia. Berita acaranya ditanda tangani oleh dua pihak; pertama, aparat pemerintahan desa (Safarin Dullah; Kepala Desa, Abd. Malik Achmadi; Babinsa Tokorondo, Abd. Wahab. Supu; ketua BPD, dan Mistu; Karyawan Gulat). Kedua, tim pelaksana (Stock Opname/inventarisasi; Saiful Rachmat, pengawas dan Pengamanan; Andi Sakri Takwa, SP).

Dari hasil pemeriksaan administratif tidak terdapat satu pun sertifikat HGU ataupun HGB atas nama Gulat, Muin Sandewang ataupun Sandra Sandewang. Hal ini diperjelas oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Poso, bahwa Tidak ada HGU dan HGB atas nama PT Gulat. Sementara Pengambilan aset PT Gulat oleh Inhutani tidak diketahui oleh BPN Poso,

Setelah Gulat tutup di Tokorondo beberapa assetnya sudah diambil alih pada tahun 1997. Saat itu kepala operasionalnya masih M.Ali, beberapa asset yang tersisa diantaranya kayu-kayu dan mesin-mesin. Tetapi saat kerusakan mesin-mesin tersebut terbakar. Sedangkan kayu-kayu masih ada sampai bulan Desember 2003 lalu. Tetapi kemudian disita oleh Inhutani.

Masyarakat Tokorondo sepertinya tidak keberatan dengan militer membuka perusahaan, seperti Gulat. Mereka tidak sadar dan tidak kritis soal militer yang berbisnis. Masyarakat Tokorondo mulai focus dan kritis terhadap TNI dan Polri setelah kerusakan yang terjadi di Poso antara 1998-2002/2003. Setelah kerusakan, sempat PT. Kebon Sari meminjam gudang PT Gulat.

---

<sup>193</sup> RDP dan Rasta, Daus, opcit

## 5. Dampaknya terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Dengan beroperasinya Gulat di Tokorondo banyak menimbulkan dampak, baik dari sisi sosial kemanusiaan maupun dari sisi sumber daya alam (SDA);

### **1. Tanggung jawab sosial**

Dari awal beroperasi Gulat telah melakukan tindakan pembohongan publik berupa penggantian lahan milik masyarakat. Gulat hanya memberikan penggantian uang terhadap benda/pohon yang ada diatas lahan.

Terhadap lahan yang digunakan untuk jalanan, Gulat menggunakan alasan demi kelancaran operasionalisasi Gulat. Karena dengan lancarnya kerja Gulat maka masyarakat setempat juga akan mendapatkan keuntungannya.

Selama beroperasi Gulat tidak melakukan tindakan/santunan kepada masyarakat Tokorondo—meskipun Gulat sering meng-klaim sebagai saudara (etnis Bugis)—yang hidup di garis pendidikan dan ekonomi yang rendah.

### **2. Kondisi lahan**

Terbengkalainya asset-asset gulat jelas merupakan problem dari sisi yang lain, seperti Lingkungan. Asset yang berada ditengah desa Tokorondo menjadi sia-sia tanpa pemanfaatan. Sedangkan lahan hutan HPH bekas Gulat saat ini populasi kayu hitamnya sudah habis. Yang tampak hanya bekas-bekas tebang. Kalaupun ada pohon Ebony, umurnya masih dalam hitungan dibawah 5-10 tahun. Saat ini lahan bekas HPH Gulat ditanami cokelat. Maka sudah bukan lagi hutan tetapi lebih terlihat sebagai kebun.

## 6. Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan Gulat

Dalam penelitian ini tidak ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang berdimensi kejahatan sipil dan politis. Tetapi beroperasinya Gulat di Tokorondo sangat banyak menimbulkan pelanggaran atau bahkan kejahatan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).

### **1. Upah kecil dan penggelapan dana Astek**

Tidak di dapat angka yang spesifik menjelaskan berapa besaran upah minimum regional (UMR) regional yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Sulteng untuk wilayah Sulteng atau UMR regional untuk wilayah kabupaten Poso. Salah satu penyebabnya adalah karena sistem dokumentasi Kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja (Kanwil Depnakertrans) yang tidak mampu memberikan informasi perihal UMR tersebut. Tetapi yang jelas bahwa para mantan pekerja Gulat yang saat ini masih tinggal di Tokorondo mengatakan bahwa upah yang diberikan kepada mereka dengan strata jabatan masing-masing, tergolong kecil bahkan tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Bahkan para karyawan yang tergolong sebagai orangnya AM Sandewang yaitu Mistu sampai sempat

berfikir untuk keluar dari Gulat karena gaji yang kecil. Apalagi dengan para pekerja yang tidak mempunyai hubungan khusus, bisa dibayangkan daya tahan kerja lebih rentan. Karena kecilnya gaji hingga membuat salah seorang, yang masih dianggap karyawan sampai saat ini, malu mengatakan jumlah gajinya.

Ditingkatan internal Gulat dampak dari kecilnya gaji berdampak pada para pekerja harus mencari tambahan. Caranya bervariasi, beberapa pekerja menerima tambahan kerja dari Gulat diluar pekerjaannya. Dan dilakukan diatas/diluar jam kerjanya. Tambahan biaya hidupnya dilakukan dengan “berbisnis diluar manajemen Gulat” sebagaimana yang dilakukan oleh Tungkanan.

Konsekwensi gaji yang kecil pada akhirnya harus dibayar dengan keluarnya sejumlah pekerja. Tetapi dimasa kepemimpinan Simson, saat itu masih tercatat sebagai menantu AM Sandewang, banyak pekerja yang keluar tanpa mendapatkan dana Astek (Asuransi Tenaga Kerja). Kalaupun ada, itupun harus dilakukan dengan menempuh beberapa ekstra tindakan diluar proses yang layak.

## ***2. Perusakan Populasi Kayu Hitam***

Menurut salah satu sumber, sebagaimana dikatakan diatas, bahwa Gulat setiap harinya mampu memproduksi sampai 250-300 m3 per hari. Jika Gulat mulai mengolah kayu hitam sejak tahun 1980 dan tutup pada tahun 1997, berarti Gulat telah mengolah kayu hitam selama 17 tahun. Maka jumlah kayu hitam yang telah diambil Gulat dari areal HPHnya di Sulteng sebanyak  $250 \text{ m}^3 \times 17 \text{ tahun} (365 \text{ hari} \times 17) = 1.551.250 \text{ m}^3$  kayu hitam.

## ***3. Menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Iuran Hasil Hutan (IHH)***

Sampai saat ini Gulat untuk wilayah kerja Tokorondo masih menunggak pembayaran 2 jenis pajak; PBB dan IHH. Untuk PBB, per 1 Januari 2002, Gulat masih berkewajiban membayar sebesar Rp. 8.433.112<sup>194</sup>. Ironisnya, kantor Pelayanan PBB kabupaten Poso sampai saat ini tidak tahu kemana harus dialamatkan surat penagihan. Kantor Pelayanan PBB Poso hanya mengetahui kantor Gulat yang di Tokorondo. Jelas setelah Gulat Tutup pada 1997, tagihan tidak direspon.

Informasi lain mengatakan bahwa Gulat juga belum membayar IHH (Iuran Hasil Hutan). Tetapi saat diverifikasi ke KP2LN, melalui Jhon F Wattimury, Kasi Piutang Negara, tidak bersedia memberikan informasi perihal penunggakan IHH Gulat tersebut.

---

<sup>194</sup> Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Poso, seksi Penagihan, Daftar Tagihan Sektor P3.

## Bab V

# Kesimpulan dan Rekomendasi

### 1. Kesimpulan

#### Umum : Kayu Hitam di Sulteng

- Dari gambaran bisnis militer diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan militer tidak hanya aparat dari kesatuan TNI, tetapi juga dari kesatuan Kepolisian. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan penggabungan TNI dan Polri sejak zaman Soekarno dan dilanggengkan samapai zaman Soeharto. Baru pada tahun 2000—melalui Ketetapan MPR (Tap MPR) nomor VI tentang pemisahan TNI dan Polri, dan Tap MPR nomor VII tentang peran dan fungsi TNI dan Polri—dilakukan pemisahan antara TNI dengan Polri. Konsekwensi dari penggabungan tersebut, dimasa lalu, adalah munculnya sebuah institusi militer yang terdiri, bukan hanya dari TNI, tetapi juga dari Kepolisian. Konsekwensi spesifik terhadap Kepolisian adalah kepolisian yang militeristik.
- Militeristiknya kesatuan TNI dan Polri bukan merupakan sebuah fenomena yang ahistoris. TNI dan Kepolisian merupakan perangkat negara yang kerap digunakan oleh pemerintah (Baca: pemerintahan Otoriter), terutama dizaman Soeharto, ketika berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu wajah militer Indonesia adalah wajah militer yang sangat berkuasa dimata masyarakat Indonesia. Tunduknya masyarakat terhadap militer makin menjadikan militer sebagai sebuah kekuatan yang bukan hanya melakukan tugas utamanya; keamanan dan pertahanan, tetapi juga merambah ke bidang-bidang yang lain. Salah satunya adalah dengan melakukan bisnis (kegiatan ekonomi). Salah satu area bisnis militer adalah di Sulawesi Tengah, yang kaya akan sumber daya alamnya.
- Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia, atau bahkan di dunia, yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Tanah yang kering dan mengandung kapur dengan kadar tinggi, ternyata membawa berkah kekayaan alam yang sangat khas, di Indonesia, bahkan di dunia, berupa pohon Ebony/kayu hitam.



- Secara ekonomis kayu hitam mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kayu hitam sangat diminati oleh masyarakat internasional sebut saja; Jepang, Hong Kong dan Eropa. Terutama jenis kayu hitam di Kabupaten Poso merupakan kayu hitam yang terbaik coraknya (Batang Matches). Karena mempunyai nilai yang tinggi dan diminati oleh berbagai kalangan tersebut ada sebagian masyarakat di Sulawesi Tengah, sejak tahun 1950-an yang khusus berprofesi melakukan bisnis kayu hitam. Bisnis tersebut dilakukan secara individual maupun secara institusional/korporasi. Bisnis kayu hitam melibatkan rangkaian/berbagai level pekerjaan dari mulai pencari kayu hitam di hutan-pemotong kayu-penarik kayu-pengolah-sampai pembeli.

### **Militer berbisnis di Sulteng**

- Salah satu pihak yang turut mendukung proses eksploitasi kayu hitam di Sulawesi Tengah adalah aparat militer (TNI/Polri). Keterlibatan aparat Militer dalam Bisnis Kayu Hitam bisa di dapati di hampir semua bentuk keterlibatan dalam proses bisnis kayu Hitam di Sulawesi tengah.
- Keterlibatan aparat militer dalam bisnis kayu hitam, sejak tahun 1960-an, terdapat dalam bentuk bisnis pengaman. Bisnis pengaman tersebut dilakukan dalam bentuk pemberhentian kendaraan dengan dalil pemeriksaan kayu hitam, turut serta dalam kendaraan yang membawa kayu hitam dan menyewakan mobil dinas.
- Demikian halnya dengan kondisi saat konflik dan paska konflik, militer tetap—bahkan lebih—tinggi intensitasnya dalam mengolah bisnis kayu hitam, seolah-olah mengambil kesempatan dalam kesempitan.

### **Masuknya Gulat**

- Pada tahun 1970-an, masuk PT Gulat (Gunung Latimojong) ke desa Tokorondo kabupaten Poso, untuk mengolah hutan yang disekitarnya terkandung kayu hitam. Tokorondo dipilih sebagai daerah pusat operasionalisasinya karena memang letaknya dan komposisi kulturalnya yang strategis.
- PT Gulat bisa dikatakan sebagai contoh bisnis non-institusional ABRI. PT. Gulat merupakan sebuah badan usaha yang berada diluar struktur kemiliteran baik di Indonesia maupun di struktur teritorial di Sulteng. Tetapi pendiri dan pemiliknya yaitu Abdul Muim Sandewang, merupakan salah seorang pejabat di Kodam Hasannudin (sekarang Wirabuana). Saat Gulat Masuk Tokorondo Sandewang masih menjabat sebagai Wakil Asisten I Intel Kodam Hasanudin. Sandewang dikenal dekat dengan beberapa pejabat sipil maupun militer di Jakarta.
- Dari sisi geografis Tokorondo merupakan daerah yang strategis, karena berada di antara dermaga dan gunung hutan. Sementara dari sisi kultural masyarakat



Tokorondo banyak berasal dari Palopo, daerah asal Sandewang. Pendekatan persuasif di tunjukkan oleh Sandewang jika harus berhadapan dengan pekerja-pekerja yang notebene berasal dari Palopo. Selain itu, juga selalu mengucapkan kata-kata “kita” untuk menunjukkan kepemilikannya terhadap para pekerja. Sehingga menimbulkan rasa kebersamaan para pekerja untuk menjaga PT Gulat.

- Pola persuasi Sandewang tidak berdampak pada kebijakan resmi perusahaan, terutama dalam soal upah. Pola persuasi Sandewang yang membawa sentimen etnis Bugis mampu menghanyutkan tuntutan masyarakat upah yang layak. Setelah Gulat Berhenti, masyarakat Tokorondo yang bekerja di Gulat hampir semuanya mengeluh dalam soal besaran upah.

### **Dampak Gulat**

- Dalam hal pertanggungjawaban sosial Gulat tidak ada andilnya yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sejak masuknya Gulat telah melakukan manipulasi tujuan operasi Gulat di Tokorondo. Dari mulai soal pembelian tanah adat masyarakat, cara pembayarannya yang hanya membayar uang pohon yang ada di atas tanah tersebut dan juga pembukaan jalan untuk memudahkan membawa tanah ke tempat pengolahan.
- Setelah tutupnya Gulat di Tokorondo, asset-asset perusahaan dibiarkan terbengkalai tanpa pemanfaatan dan pemenuhan fungsi sosial bagi masyarakat.
- Selain tidak ada pemanfaatan untuk kepentingan sosial, terutama bagi masyarakat Tokorondo, Gulat juga banyak meninggalkan dampak dari eksploitasi Kayu Hitam di Poso.
- Dampak dibidang ekonomi adalah taraf kehidupan masyarakat yang tidak meningkat. Kondisi perekonomian masyarakat Tokorondo, saat ini, seolah-olah bukan merupakan masyarakat yang hidup ditengah kekayaan alam. Hal ini menandakan bahwa kekayaan alam tersebut hanya menjadi bagian dari kelompok tertentu. Jikalau, dimasa lalu, ada/banyak warga Tokorondo yang menjadi pekerja di Gulat, upah yang diterima tidak seimbang dengan pekerjaan dan hasil dari pekerjaannya. Selain itu keterpurukan kondisi ekonomi masyarakat disebabkan oleh dana astek pekerja Gulat (yang sebgaiian besar merupakan masyarakat Tokorondo) tidak disetorkan ke Astek. Hal ini yang menyebabkan salah satunya, paska Gulat Tutup, masyarakat tidak mempunyai tabungan hasil kerjanya selama di Gulat.
- Dampak dibidang lingkungan adalah, saat ini populasi Kayu hitam semakin menipis. Dari penelitian ini tidak didapati kuantitas populasi kayu hitam di Poso, di Tokorondo atau di bekas wilayah olahan Gulat. Tetapi dari hasil kunjungan ke bekas lahan olahan Gulat, yang saat ini telah menjadi kebun cokelat, terdapat lebih banyak bekas tebang

daripada pohon kayu hitam. Jikalau ada pohon kayu hitam, pohon tersebut masih tergolong muda, dan belum sampai pada kualitas sebagai kayu hitam.

- Dampak dibidang pendidikan adalah rendahnya angka pendidikan tinggi di Tokorondo dikarenakan Gulat pernah menjadi andalan dan cita-cita bagi laki-laki di Tokorondo untuk segera mempunyai uang. Tawaran pekerjaan yang menggiurkan tersebut segera memupus harapan masyarakat Tokorondo untuk melanjutkan sekolahnya. Sementara Gulat tidak pernah melakukan proses kualifikasi pekerja. Dengan kata lain Gulat tidak pernah memberikan pelajaran secara tidak langsung bagi masyarakat untuk lebih dahulu menuntut ilmu baru kemudian bekerja. Gulat memanfaatkan sisi pendidikan rendah masyarakat sebagai alat untuk menekan upah, ketika ingin bekerja. Hasilnya ketika Gulat tutup, masyarakat hanya mendapati dirinya berstatus pendidikan rendah.
- Dampak psikologis adalah setelah Gulat tutup/tidak beroperasi di Tokorondo, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka hanya menjadi alat dan tenaga eksploitasi Gulat terhadap Kayu Hitam yang ada disekitar mereka. Indikasinya dapat dilihat pada kesaksian mereka dari soal upah yang rendah dan tidak adanya perhatian Gulat terhadap fasilitas masyarakat setempat. Saat ini ketika masyarakat diajak bicara soal Gulat, mereka seperti mengingat sebuah masa emas tetapi berakhir tragis. Hingga ada diantara mereka, saat ditemui, dan diminta berbicara soal Gulat, diawali dengan kesedihan, diawali dengan kebanggaan tetapi diakhiri dengan kesedihan, atau diawali dengan kemarahan.
- Kesedihan secara psikologis merupakan gambaran atas keterpurukan masyarakat atas pengabaian hak-haknya dan ketiadaan ruang masyarakat untuk meng-advokasi diri. Sementara konflik yang terjadi beberapa waktu belakangan di Poso, hanya menjadi tambahan persoalan bahkan persoalan besar yang melupakan persoalan lain seperti hilangnya hak masyarakat karena eksploitasi Gulat.

### **Militerisasi Bisnis**

- Ketidakberesan Gulat mengolah usaha, secara KKN, jelas memberikan ruang bagi individu-individu tertentu seperti anggota (eks) militer; Tungkanan untuk aktif di Gulat. Keterlibatan anggota Militer dalam Gulat mempunyai beberapa tingkatan. Keterlibatan militer dalam Gulat di mulai dari pendirian dan pemilikan Gulat (Asintel Kodam Hassanuddin, Makassar) sampai operasional Gulat (Mistu dan Tungkanan).
- Polarisasi bisnis di Poso terutama bisnis/eksplorasi dan eksploitasi kayu hitam jelas memperlihatkan peran-peran yang dimainkan oleh struktur pemerintahan dan masyarakat di Poso. Berkaitan dengan penelitian ini, posisi militer, ada disetiap level proses bisnis kayu hitam di Poso dan Sulteng secara umum. Dari mulai sejak proses pencarian kayu hitam yang dilakukan oleh masyarakat dan penempatan hasil

penebangan militer sudah ada dan terlibat. Bentuknya berupa pengamanan terhadap proses penebangan dan pengamanan tempat penyimpanan kayu hasil tebangan. Ketika kayu hitam tersebut dibawa dari tempat penyimpanan ke Palu atau ketempat pengolahan atau ke tempat pelabuhan pengiriman, militer terlibat dalam bentuk pemberhentian atas nama pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan. Begitu juga dalam proses pengiriman kayu ke melalui jalur laut ke Malaysia.

- Ancaman terhadap proses diatas juga berpotensi datang dari militer itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena makin lama, kendaraan-kendaraan atau pebisnis-pebisnis kayu hitam menjadi incaran dari individu/kesatuan/kantor lokal aparat militer untuk dimintakan uang. Hal ini jelas membebankan pebisnis, hingga harus juga mengakali ancaman tersebut. Ancaman tersebut juga direspon kebentuk yang lebih besar dan terbuka, seperti penangkapan dengan dalih melakukan illegal logging. Tetapi yang aneh adalah kasus-kasusnya tidak pernah muncul ditingkat penyelesaian secara hukum. Yang terjadi adalah penyelesaian secara kolusif.
- Masa konflik di Poso makin meneguhkan posisi militer (Kepolisian dan TNI) di Poso. Jika di masa sebelum konflik, militer sudah terlibat dalam bisnis militer, terutama bisnis kayu hitam, begitu pula di masa konflik dan sesudah konflik. Di masa sebelum konflik keterlibatan militer berbentuk individual dan institusional, begitu juga saat konflik hanya modus dan cara kerjanya agak berbeda. Ketika sebelum konflik, hampir disemua daerah di Sulteng, keterlibatan militer dalam bentuk pengamanan terhadap pelaku bisnis kayu hitam dan ancaman penghukuman. Sedangkan khusus di Poso tepatnya di Tokorondo, bisnis koorporasi yang dikelola individu militer. Memasuki konflik, disaat konflik sedang memanas, dan paska konflik, bisnis terhadap kayu hitam tetap marak dilakukan oleh militer.
- Masa konflik bahkan merupakan masa dimana perhatian masyarakat semakin rendah terhadap perilaku bisnis militer atas kayu hitam di Poso. Kehadiran militer ditengah rasa ketakutan masyarakat justru meneguhkan posisi militer yang serba mampu melakukan apa saja. Oleh karena itu tidak hanya kayu hitam yang menjadi lahan bisnis militer di Poso. Militer, TNI dan Kepolisian, juga melakukan bisnis lainnya berupa bisnis pengamanan individu-individu kedaerah tertentu untuk kepentingan tertentu. Sementara kayu hitam diolah dalam cara lain dan berbeda saat sebelum konflik. Masa konflik, militer memiliki inisiatif lebih tinggi meskipun bisnis militer atas kayu hitam dilakukan secara seporadis (tidak terinstitusikan/tidak melalui cara koorporasi). Persoalannya adalah kayu hitam yang semakin menipis. Oleh karena itu tidak jarang, militer meminta bantuan masyarakat yang berprofesi sebagai *Chainsawman* untuk mencari sisa kayu hitam yang masih bisa diolah. Selain itu pengolahannya juga dilakukan oleh masyarakat. Itulah sebabnya saat ini di Poso, terutama di daerah Poso Kota, Lembomawo dan Rononuncu, banyak terdapat usaha kecil masyarakat untuk mengolah kayu hitam menjadi souvenir-souvenir.

## 2. Rekomendasi

Keterlibatan militer dalam kegiatan perekonomian di Sulteng memberikan catatan khusus bagi perkembangan ekonomi di Sulteng. Beberapa hal tersebut adalah :

1. Bahwa militer justru menjadi aktor dalam bisnis haram kayu hitam di Poso. Oleh karena itu harus dilakukan penyelidikan untuk melihat sejauhmana kerusakan lingkungan (hutan), yang dijarah dalam kegiatan pengolahan kayu hitam. Selain itu juga harus dilakukan pemeriksaan silang terhadap sejumlah instansi yang terkait, seperti data Dephutbun menunjukkan angka Illegal Logging pertahun di Sulteng, tetapi sejauhmana upaya penegakkan Hukum oleh Kepolisian terhadap Illegal Logging di Sulteng.
2. Perlu pula dilakukan penyelidikan terhadap pola bisnis, terutama bisnis kayu hitam di Sulteng. Hal ini bertujuan untuk melihat level keterlibatan aktor-aktor yang korup dan berpotensi melakukan manipulasi hak publik masyarakat Sulteng (Poso).
3. Perlu pula dilakukan sebuah upaya yang serius untuk melihat bentuk korupsi dan kolusi baik yang dilakukan dalam tubuh pemerintahan sipil, kepolisian, TNI, perusahaan-perusahaan dan yang terjadi di level masyarakat.
4. Khusus terhadap Militer harus dilakukan peninjauan ulang untuk melihat sejauhmana efektifitas penempatan militer (Kepolisian dan TNI), terutama saat ini di Poso yang sedang dalam proses healing massal dan rekonsiliasi akibat konflik komunal yang terjadi di Poso beberapa tahun terakhir. Hal ini bertujuan agar penugasan terhadap Kepolisian dan TNI di Poso bukan justru untuk melakukan teror dan pemiskinan di Poso.
5. Secepatnya juga harus dilakukan sebuah upaya dari pemerintah untuk melihat potensi-potensi ekonomi masyarakat di Sulteng (Poso). Hasil dari pemetaan potensi ekonomi masyarakat tersebut harus diumumkan melalui cara yang demokratis kepada masyarakat. Selanjutnya harus dibuat sarana dan kesempatan pengolahan sumber daya ekonomi bagi masyarakat dilevel yang paling bawah di masyarakat.
6. Pemerintahan Indonesia yang di Pusat maupun yang di Sulteng serta yang di Poso harus melakukan pembenahan sistem demokratisasi ekonomi, hukum dan politik. Hal ini harus ditopang oleh integritas aparat negara, sistem dan sarana yang menjamin masyarakat hak-hak masyarakat, menjamin persamaan pendapatan serta peniadaan dan penghukuman kultur represif oleh aparat negara.
7. Harus segera dilakukan pemenuhan hak-hak korban, baik hak korban secara ekonomis maupun secara pidana, atas kejahatan bisnis militer di Poso.